

LAPORAN  
HIBAH PENELITIAN STRATEGI NASIONAL  
TAHUN ANGGARAN 2009



MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

EVALUASI DAMPAK PROGRAM PENGEMBANGAN  
DESA/KELURAHAN MODEL BINAAN GERAKAN TERPADU  
PENGENTASAN KEMISKINAN DI PROPINSI JAWA TIMUR,  
TAHUN ANGGARAN 2008

Oleh :

1. Prof. Dr. I.B. Wirawan, SU
2. Drs. Doddy Sumbodo Singgih, MS
3. Drs. Gitadi Tegas S., MSi
4. Dra. Tuti Budi Rahayu, MA

Dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan Nasional  
Sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga  
Tentang Kegiatan Penelitian Strategis Nasional  
Nomor : 276/H3/KR/2009  
Tanggal 16 Februari 2009.

UNIVERSITAS AIRLANGGA  
Desember 2009.

**LAPORAN  
HIBAH PENELITIAN STRATEGI NASIONAL  
TAHUN ANGGARAN 2009**



KK-2  
KEB  
LP-20/10  
EVA

MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

**EVALUASI DAMPAK PROGRAM PENGEMBANGAN  
DESA/KELURAHAN MODEL BINAAN GERAKAN TERPADU  
PENGENTASAN KEMISKINAN DI PROPINSI JAWA TIMUR,  
TAHUN ANGGARAN 2008**

Oleh :

1. Prof. Dr. I.B. Wirawan, SU
2. Drs. Doddy Sumbodo Singgih, MS
3. Drs. Gitadi Tegas S., MSi
4. Dra. Tuti Budi Rahayu, MA

Dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan Nasional  
Sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga  
Tentang Kegiatan Penelitian Strategis Nasional  
Nomor : 276/H3/KR/2009  
Tanggal 16 Februari 2009.

**UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
Desember 2009.

MIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
AYAH AYU

## HALAMAN PENGESAHAN

1. JUDUL : Evaluasi Dampak Program Pengembangan Desa/Kelurahan Model Binaan Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan di Propinsi Jawa Timur, Tahun Anggaran 2008.
2. Ketua Peneliti
- a. Nama Lengkap : Prof.Dr.I.B.Wirawan,SU
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. NIP : 130 701 136
- d. Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya/Gol IV d
- e. Jabatan : Guru Besar
- f. Bidang Keahlian : Sosiologi Kependudukan
- g. Fakultas/Jurusan/Puslit : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Sosiologi
- h. Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS AIRLANGGA

## Tim Peneliti

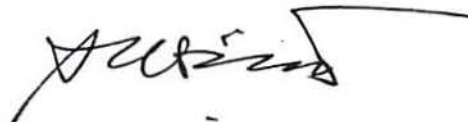
| No | Nama Peneliti            | Bidang Keahlian         | Fak/Jurusan                  | Perguruan Tinggi         |
|----|--------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1  | Drs.Doddy Sumbodo S.,MSi | Sosiologi<br>Pedesaan   | FISIP/Sosiologi              | Universitas<br>Airlangga |
| 2  | Drs.Gitadi Tegas,S. MSi  | Kebijakan Publik        | FISIP/Administrasi<br>Negara | Universitas<br>Airlangga |
| 3  | Dra.Tuti Budi Rahayu,MA  | Sosiologi<br>Pendidikan | FISIP/Sosiologi              | Universitas<br>Airlangga |

## 3. Pendanaan dan Jangka Waktu Penelitian :

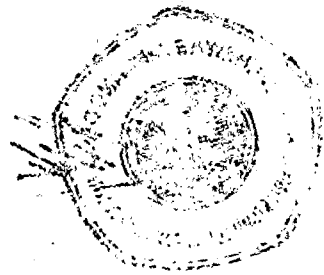
- a. Jangka Waktu Penelitian : 5 (lima) bulan
- b. Biaya yang diusulkan : Rp. 100.000.000,0
- c. Biaya yang Disetujui : Rp. 80.000.000,0

Surabaya, 10 Nopember 2009.

Ketua Peneliti

  
 Prof.Dr.I.B.Wirawan,SU  
 NIP 130 701 136
Mengetahui  
Dekan/Pusat Penelitian
  
 Drs. EBasis Susilo, MA  
 NIP 130 937 977
Mengetahui,  
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
Universitas Airlangga
  
 Prof.Dr.Bambang Sektiari,L.,DEA,drh  
 NIP. 131 837 004





## **RINGKASAN PENELITIAN EVALUASI DAMPAK PROGRAM PENGEMBANGAN DESA/KELURAHAN MODEL BINAAN GERAKAN TERPADU PENGENTASAN KEMISKINAN DI PROPINSI JAWA TIMUR**

### **1.1 .Latar Belakang**

Kemiskinan, sudah sejak lama menjadi agenda permasalahan bagi negara-negara di dunia, baik negara maju maupun negara yang sedang berkembang. Seperti halnya negara berkembang lainnya, Indonesia meletakkan kemiskinan sebagai tujuan bagi pembangunan nasional. Semenjak kebijakan otonomi daerah diberlakukan di Indonesia pada awal tahun 2001 lalu yaitu Undang-undang No.22 Tahun 1999 dan kemudian direvisi menjadi Undang-undang No. 32 Tahun 2004, Pemerintah Daerah telah memiliki kewenangan lebih luas untuk mengendalikan pembangunan di daerahnya masing-masing. Pendekatan pembangunan yang dipakai kemudian berubah, yang awalnya meletakkan masyarakat sebagai obyek pembangunan sekarang berubah menjadi subjek sekaligus obyek dari pembangunan. Untuk itu, berbagai kebijakan pengentasan kemiskinan dilaksanakan dengan prinsip desentralisasi, yaitu kebijakan pengentasan kemiskinan yang memberikan kepercayaan kepada masyarakat, yaitu kepada keluarga dan kelompok masyarakat miskin, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan masyarakat luas.

Sebagai salah satu propinsi terpadat di Indonesia, Propinsi Jawa Timur juga tidak luput dari permasalahan kemiskinan. Mengapa permasalahan kemiskinan ini seakan demikian sulit menemukan jalan keluar, padahal Pemerintah baik Pusat maupun daerah sudah sangat gencar mengeluarkan berbagai program untuk pengentasan kemiskinan. Beberapa program pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan baik Pemerintah Pusat maupun Daerah antara lain adalah: program bantuan Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) dalam bidang pangan, Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin (Askeskin) dalam bidang kesehatan, Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk pengembangan usaha mikro, Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

dalam bidang pendidikan, Program Aksi Mengatasi Dampak Kenaikan Bahan Bakar Minyak (PAM DKB), Jaring Pengaman Ekonomi Sosial (JPES), Program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu-Taskin) dibidang usaha, manusia dan lingkungan hingga yang baru diluncurkan tahun 2007 lalu yaitu Program Keluarga Harapan (PKH).

### 1.1. Rumusan Masalah

Atas dasar alasan penting dan latar belakang sedemikian itulah studi evaluasi ini dirancang untuk dikerjakan di Kabupaten-Kota di Jawa Timur, guna menemukan jawaban terhadap sejumlah masalah pokok sebagai berikut:

1. Model kebijakan pengentasan kemiskinan manakah yang efektif diterapkan untuk memberdayakan rumah tangga sangat miskin di Jawa Timur ?
2. Bagaimanakah efektifitas ditingkat pelaksana Program pengentasan kemiskinan ditinjau dari peran, komitmen dan integritas *stakeholder* sehingga berkontribusi langsung pada rumah tangga sangat miskin?

Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, kajian ini membandingkan program pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu Program Pengembangan Desa Model Binaan Gerdu Taskin dan Program Pusat yakni Program Keluarga Harapan. Untuk itu, muncul rumusan masalah ketiga yaitu:

3. Bagaimanakah sesungguhnya efektifitas Model Binaan Gerdu Taskin jika dibandingkan dengan Model Program Keluarga Harapan ?

#### 1.3.1 Tujuan Umum Penelitian

Secara Umum, penelitian ini bertujuan untuk menemukan Model pengentasan kemiskinan yang paling efektif dalam upaya memberdayakan kelompok miskin, sehingga kelompok ini tidak lagi bergantung kepada segala bentuk bantuan Pemerintah baik Pemerintah daerah maupun Pemerintah Pusat.

### 1.3.2. Tujuan Khusus Penelitian

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk membandingkan dua Model Pengentasan Kemiskinan yang sudah diterapkan di wilayah Jawa Timur yaitu Model Binaan Gerdu Taskin dan Model Program Keluarga Harapan (PKH). Dari kedua Model tersebut, akan diketahui manakah Model yang lebih efektif memberdayakan kelompok miskin di Jawa Timur dalam arti dapat mengurangi bahkan menghilangkan sifat ketergantungan rumah tangga miskin terhadap segala wujud bantuan yang bersumber dari Pemerintah.

### 1.2. Tinjauan Pustaka

Salah satu permasalahan yang telah menjadi agenda pembangunan baik di Pusat maupun Daerah adalah permasalahan pengentasan kemiskinan. Dalam pemikiran sebagian ahli, terutama yang menganut pandangan modernisasi mendefinisikan kemiskinan sebagai fenomena ekonomi, dalam konteks rendahnya penghasilan atau tidak dimilikinya sumber-sumber mata pencaharian yang cukup untuk menopang kebutuhannya. Kemiskinan adalah juga persoalan ada atau tidak adanya peluang atau kemungkinan bagi keluarga-keluarga miskin tersebut untuk mengembangkan usaha serta taraf hidupnya kearah yang lebih baik. (Suyanto, 1999: 9). Menurut Friedman (1979), kemiskinan adalah suatu bentuk ketimpangan di dalam upaya mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Menurut Friedman (1979) apa yang dimaksud dengan basis kekuasaan sosial meliputi: (1) modal produktif atau aset, misalnya dalam bentuk tanah, perumahan, peralatan dan kesehatan; (2) sumber keuangan seperti: penghasilan, dan fasilitas kredit yang memadai; (3) organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama seperti: koperasi, dll; (4) jaringan sosial atau *network* untuk mendapatkan pekerjaan, barang-barang, pengetahuan, keterampilan atau yang memadai, dan (5) informasi-informasi yang fungsional bagi kehidupannya.

Secara sederhana, pengertian terhadap kemiskinan merupakan kondisi yang menggambarkan kadar keterbatasan kemampuan seseorang untuk memenuhi



kebutuhan dasar hidupnya. Indikasi terhadap penggolongan apakah masyarakat tersebut itu miskin atau tidak tergantung pada beberapa hal. Pendekatan standar kemiskinan internasional yang dikeluarkan oleh Bank Dunia berpendapat bahwa, mereka yang berpendapatan di bawah US\$2 perhari tergolong sebagai masyarakat miskin. Badan Pusat Statistik (BPS) sendiri, sebagai lembaga data resmi Pemerintah, mengukur angka kemiskinan dengan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Pemerintah menggunakan asumsi miskin, dengan pendapatan US\$ 0,6 atau sekitar Rp 5.500,- per hari.

#### 1.4. Temuan Penelitian

- Program Pengembangan Desa Model Binaan Gerdu Taskin

Program desa model binaan merupakan program pengentasan kemiskinan yang ditujukan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) yang umumnya memiliki unit usaha kecil. Program ini mengupayakan bantuan melalui pemberian modal awal bagi keberlangsungan usaha kecil tersebut yang dilakukan melalui sistem simpan pinjam. Secara ringkas, Program Pengembangan Desa Model Binaan Gerdu Taskin ini meliputi pelaksanaan tiga aspek pemberdayaan masyarakat yaitu:

1. Pemberdayaan Lingkungan yaitu pembangunan dan perlindungan lingkungan menyangkut masyarakat banyak, terutama untuk kebutuhan fasilitas, sarana dan prasarana bagi masyarakat miskin. Pemberdayaan Lingkungan dilakukan melalui pembangunan sarana fisik lingkungan untuk kebutuhan masyarakat banyak dan memperbaiki sarana dan prasarana desa-kelurahan lokasi program.
2. Pemberdayaan Masyarakat, yaitu kegiatan pembangunan masyarakat yang berorientasi pada pembangunan solidaritas sosial dan keswadayaan masyarakat. Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dilakukan dengan

pemberian bantuan langsung atau tunai kepada golongan masyarakat rentan berupa makanan pokok, bantuan keperluan sekolah bagi masyarakat miskin, dan sebagainya.

3. Pengembangan Usaha/ Ekonomi yaitu upaya-upaya peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat miskin dalam mengembangkan peluang usaha dan akses ke sumberdaya untuk peningkatan pendapatan. Pengembangan Usaha dilakukan dengan pemberian bantuan modal dalam bentuk simpan pinjam untuk mengembangkan usaha kecil kelompok masyarakat miskin.

Dari keseluruhan program tersebut, diharapkan masyarakat akan lebih berdaya dan mandiri karena telah memiliki usaha kecil yang dapat dikembangkan. Selain itu, adanya pemberdayaan lingkungan juga diharapkan semakin akses maupun fasilitas lingkungan terkait.

- Program Keluarga Harapan

Berbeda dengan Program Pengembangan Desa Model Binaan Gerdu Taskin, Program Keluarga Harapan (PKH) difokuskan pada upaya pemutusan rantai kemiskinan antar generasi. Untuk itu, PKH dilaksanakan dengan mengutamakan dua elemen yaitu komponen kesehatan dan komponen pendidikan. PKH merupakan program bagi masyarakat RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin) dengan pemberian bantuan tunai setiap tiga bulan dengan nominal tertentu untuk membantu masyarakat sangat miskin agar lebih mudah mengakses fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan, khususnya bagi anak-anak. Untuk itu, sasaran PKH merupakan ibu hamil/ nifas, ibu yang mempunyai balita dan anak usia sekolah. Dikarenakan terfokus pada dua komponen yaitu kesehatan dan pendidikan, pelaksanaan PKH juga dikaitkan dengan program pengentasan kemiskinan lain yaitu Jamkesmas (untuk bantuan kesehatan) dan BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

### 1.5. Perbandingan Kelebihan Program Pengentasan Kemiskinan

- Program Desa Model Binaan Gerdu Taskin

1. Adanya perbaikan lingkungan desa-kelurahan secara langsung oleh masyarakat melalui dana yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini akan berpengaruh pada meningkatnya kualitas lingkungan hidup masyarakat.
2. Adanya bantuan langsung kepada masyarakat miskin golongan rentan berupa barang-barang kebutuhan pokok melalui program pemberdayaan masyarakat.
3. Adanya bantuan modal awal dalam bentuk simpan pinjam bagi masyarakat miskin yang memiliki usaha kecil, sehingga masyarakat diharapkan akan lebih mandiri seiring dengan berkembangnya usaha kecil tersebut.

- Program Keluarga Harapan

1. Adanya bantuan tunai bagi masyarakat sangat miskin untuk mengakses kebutuhan dasar bagi anaknya yaitu pendidikan dan kesehatan.
2. Adanya bantuan pendukung lain berupa Jamkesmas dan BOS untuk membantu operasionalisasi pemanfaatan fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan.
3. Adanya beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh peserta PKH untuk mendapatkan bantuan sehingga masyarakat tidak akan semena-mena dalam memanfaatkan bantuan tersebut.
4. Diberikannya bantuan secara bertahap sehingga masyarakat dituntut untuk mengendalikan pengeluaran.
5. Adanya peran pendamping yang bertugas mendampingi para peserta PKH secara intensif sehingga meminimalisir ketidak patuhan peserta terhadap kewajiban yang harus dipenuhi.

### 1.6. Perbandingan Kelemahan Program Pengentasan Kemiskinan

- Program Desa Model Binaan Gerdu Taskin

1. pelaksanaan program hanya dapat menyentuh masyarakat miskin yang memiliki usaha kecil, karena bantuan yang diberikan berupa modal usaha.

2. pelaksanaan program kurang menyentuh elemen penting yang susah diakses oleh masyarakat yaitu perihal kesehatan dan pendidikan, khususnya bagi anak-anak RTSM.
3. Pelaksanaan program tidak memiliki sanksi tegas dan pemenuhan kewajiban-kewajiban, sehingga dalam proses pelaksanaannya banyak masyarakat miskin yang menganggap bantuan tersebut sebagai hibah.

- Program Keluarga Harapan

1. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat permasalahan teknis terkait koordinasi operasional sehingga pelaksanaan program menjadi terhambat.
2. Program Keluarga Harapan memfokuskan kegiatan pada pemutusan rantai kemiskinan generasi, sehingga mengabaikan kebutuhan masyarakat miskin yang sudah tua atau masyarakat miskin yang tidak memiliki anak.

\*\*\*



## KATA PENGANTAR

Upaya Pemerintah Propinsi Jawa Timur dalam mengurangi angka kemiskinan telah dilakukan melalui berbagai macam program. Sejumlah dana telah pula disalurkan guna mendukung keseluruhan proses pelaksanaan program-program tersebut. Salah satu program pengentasan kemiskinan yang evaluasinya dilaporkan berikut ini adalah Program Pengembangan Desa-Kelurahan Model Binaan yang diberi nama Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan atau lebih populer disebut Gerdu Taskin.

Program ini telah digulirkan sejak tahun 2007 yang lalu di 10 lokasi Kabupaten/Kota di wilayah Propinsi Jawa Timur. Seperti apa dan sejauhmana hasil pelaksanaan Program Pengembangan Desa dan Kelurahan di 10 lokasi Kabupaten-Kota sebagai Model pengentasan kemiskinan melalui gerakan terpadu berbagai Dinas terkait di Jawa Timur – akan dipaparkan dalam laporan berikut ini.

Terbatasnya waktu yang tersedia untuk memahami seluruh persoalan dalam kegiatan Evaluasi Program Pengembangan Desa-Kelurahan Model Binaan Gerdu Taskin ini yakni 5 bulan, sementara lokasi dan sebaran wilayah desa dan kelurahan yang harus diamati demikian luas, disadari telah ikut membatasi dan mempengaruhi kualitas laporan ini . Oleh karena itu, hasil studi Evaluasi ini tidak luput dari berbagai kekurangan itu. Meskipun demikian, dengan semangat pengabdian dan kontribusi berbagai pihak di lapangan, maka banyak kendala yang dihadapi akhirnya dapat diatasi di lapangan.

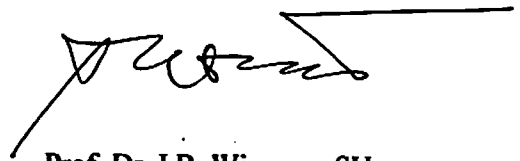
Untuk itulah segenap Tim peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangannya sehingga Laporan Studi Evaluasi ini dapat tersusun seperti adanya saat ini. Terima kasih secara khusus Tim peneliti sampaikan kepada Prof Dr.Bambang Sektiari, L.,DEA, yang telah mempercayakan pekerjaan ini serta dana penelitian dari Kegiatan Penelitian Strategis Nasional yang bersumber dari APBN kepada Tim Peneliti. Seluruh staf Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Airlangga BHMN, yang telah membantu kelancaran administrasi,juga disampaikan terima kasih. Kepada semua Pejabat di Kabupaten-Kota di 10 lokasi pengamatan, kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama studi ini berlangsung. Demikian pula para nara sumber, responden yang telah memberikan informasi yang dibutuhkan Tim selama di lapangan, kami ucapkan banyak terima kasih.

Akhirnya, atas nama Tim Peneliti ;sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan bantuan nyata bapak/ibu dalam pekerjaan ini. Semoga hasil studi ini dapat memenuhi harapan dilaksanakannya Evaluasi Program, dan Pengabdian kepada Masyarakat pada lingkup regional Jawa Timur.

Surabaya, 29 Oktober 2008.

Atas Nama Tim, Peneliti

Ketua



Prof. Dr. I.B. Wirawan, SU  
NIP. 130 701 136

MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

## DAFTAR ISI

|         |  |      |
|---------|--|------|
|         | Kata Pengantar   | viii |
|         | Daftar Isi   | x    |
|         | Daftar Tabel   | xiii |
| Bab 1   | PENDAHULUAN  | 1    |
| 1.1.    | Latar Belakang   | 1    |
| 1.2.    | Rumusan Masalah  | 6    |
| 1.3.    | Dasar Hukum Pelaksanaan  | 7    |
| 1.4.    | Tujuan   | 8    |
| 1.4.1.  | Tujuan Pelaksanaan Program Gerdu Taskin                        | 8    |
| 1.4.1.1 | Tujuan Umum  | 8    |
| 1.4.1.2 | Tujuan Khusus  | 9    |
| 1.4.2.  | Tujuan Pelaksanaan Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Program | 9    |
| 1.5.    | Ruang Lingkup Kegiatan Evaluasi                                | 10   |
| 1.6.    | Tinjauan Pustaka   | 10   |
| 1.7.    | Metode Penelitian  | 23   |
| 1.7.1.  | Penentuan Daerah Penelitian                                    | 23   |
| 1.7.2.  | Jumlah Sampel Penelitian                                       | 24   |
| 1.7.3.  | Cara Pengumpulan Data  | 24   |
| 1.7.4.  | Analisis Data  | 25   |
| 1.7.5.  | Jadual Pelaksanaan Penelitian                                  | 25   |
| Bab 2   | PROGRAM PENGEMBANGAN DESA-KELURAHAN MODEL BINAAN               | 26   |
| 2.1.    | Prinsip Dasar Pelaksanaan Program                              | 26   |
| 2.2.    | Penjelasan Umum Program  | 27   |
| 2.3.    | Penetapan Lokasi Program                                       | 29   |
| 2.4.    | Sasaran Program  | 29   |
| 2.5.    | Pembiayaan   | 30   |
| 2.6.    | Organisasi Pengelola Program                                   | 32   |

|               |   |       |            |
|---------------|---|-------|------------|
| 2.7.          | <b>Indikator Keberhasilan Program</b>   | ..... | 39         |
|               |   | ..... |            |
| <b>Bab 3</b>  | <b>DESKRIPSI HASIL MONITORING PROGRAM PENGEMBANGAN DESA MODEL BINAAN GERDU TASKIN</b> |       | <b>40</b>  |
| 1.            | Kabupaten Pacitan   | ..... | 40         |
| 2.            | Kabupaten Banyuwangi  | ..... | 44         |
| 3.            | Kabupaten Jember  | ..... | 49         |
| 4.            | Kabupaten Lumajang  | ..... | 53         |
| 5.            | Kabupaten Malang  | ..... | 57         |
| 6.            | Kabupaten Kediri  | ..... | 59         |
| 7.            | Kabupaten Mojokerto   | ..... | 62         |
| 8.            | Kabupaten Sidoarjo  | ..... | 65         |
| 9.            | Kabupaten Madiun  | ..... | 69         |
| 10.           | Kota Madiun   | ..... | 73         |
| <b>Bab IV</b> | <b>ANALISIS HASIL EVALUASI PROGRAM PENGEMBANGAN DESA MODEL BINAAN GERDU TASKIN</b>    | ..... | <b>77</b>  |
| 4.1.1         | Proporsi Pembagian Dana Pelaksanaan Program   | ..... | 78         |
| 4.1.2.        | Proses Sosialisasi dan Pelaksanaan program  | ..... | 80         |
| 4.2.          | Model PKH   | ..... | 106        |
| 4.2.1.        | Program Keluarga Harapan  | ..... | 106        |
| <b>Bab 5</b>  | <b>KESIMPULAN DAN REKOMENDASI</b>   | ..... | <b>108</b> |
| 5.1.          | Kesimpulan  | ..... | 108        |
| 5.2.          | Usulan Model Pemberdayaay   | ..... | 114        |
| 5.2.          | Rekomendasi Untuk Gerdu Taskin  | ..... | 114        |
| <b>Bab 6</b>  | <b>PENUTUP</b>  | ..... | <b>119</b> |
|               | Daftar Pustaka  | ..... | 120        |
|               | Lampiran  | ..... | 122        |



### DAFTAR TABEL

| <b>Tabel</b> | <b>Keterangan</b>   | <b>Hal.</b> |
|--------------|---|-------------|
| Tabel 4.1.   | Alokasi Dana Program Pengembangan Desa/ Kelurahan Model Binaan Gerdu Taskin Tahun 2007  | 79          |
| Tabel 4.2.   | Pencairan Dana Program Pengembangan Desa Model Binaan Gerdu Taskin Evaluasi Tahun 2008  | 81          |
| Tabel 4.3.   | Proporsi Alokasi Dana Kegiatan Pengembangan Usaha (PU) UPK Program Pengembangan Desa Model Binaan Gerdu Taskin Evaluasi Tahun 2008                      | 83          |
| Tabel 4.4.   | Alokasi Dana Pemberdayaan Manusia (PM) Program Pengembangan Desa/ Kelurahan Model Binaan Gerdu Taskin Evaluasi Tahun 2008                               | 84          |
| Tabel 4.5.   | Alokasi Dana Pemberdayaan Lingkungan (PL) Program Pengembangan Desa/ Kelurahan Model Binaan Gerdu Taskin Evaluasi Tahun 2008                            | 87          |
| Tabel 4.6.   | Perkembangan Modal Usaha Simpan Pinjam (USP) Pengembangan Usaha (PU) Program Pengembangan Desa/ Kelurahan Model Binaan Gerdu Taskin Evaluasi Tahun 2008 | 89          |
| Tabel 4.7.   | Penetapan Bunga Program Usaha Simpan Pinjam dan Kemitraan Pengembangan Usaha (USP-PU) Desa/ Kelurahan Model Binaan Gerdu Taskin Evaluasi Tahun 2008     | 92          |
| Tabel 4.8.   | Jumlah Pokmas dan Jenis Usaha Pokmas Awal Program Pengembangan Desa/ Kelurahan Model Binaan Gerdu Taskin Evaluasi Tahun 2008                            | 93          |
| Tabel 4.9.   | Perkembangan Jumlah dan Anggota Pokmas Pengembangan Usaha Simpan Pinjam Desa/ Kelurahan Model Binaan Gerdu Taskin Evaluasi Tahun 2008                   | 95          |
| Tabel 4.10.  | Potensi Ekonomi Unggulan Pokmas Desa/ Kelurahan Model Binaan Gerdu Taskin Evaluasi Tahun 2008   | 97          |

|             |  |     |
|-------------|--|-----|
| Tabel 4.11. | Alokasi Dana Kemitraan Pengembangan Usaha (PU) Desa/<br>Kelurahan Model Binaan Gerdu Taskin Evaluasi Tahun 2008                                    | 98  |
| Tabel 4.12. | Perkembangan Jumlah Anggota Kemitraan Program<br>Pengembangan Desa/ Kelurahan Model Binaan Gerdu Taskin<br>Evaluasi Tahun 2008                     | 99  |
| Tabel 4.13. | Jumlah Perkembangan Dana Pengembangan Usaha Desa/<br>Kelurahan Model Binaan Gerdu Taskin Evaluasi Tahun 2008                                       | 101 |
| Tabel 4.14. | Perguruan Tinggi/ Lembaga Swadaya Masyarakat<br>Pendamping dalam Desa/ Kelurahan Model Binaan Gerdu<br>Taskin Evaluasi Tahun 2008                  | 103 |
| Tabel 4.15. | Perbandingan Peran Pendamping (PT/ LSM) dan Tim<br>Fasilitasi (Sektap, TFK) dalam Desa/ Kelurahan Model<br>Binaan Gerdu Taskin Evaluasi Tahun 2008 | 104 |

MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Kemiskinan, sudah sejak lama menjadi agenda permasalahan bagi negara-negara di dunia, baik negara maju maupun negara yang sedang berkembang. Kemiskinan di setiap negara tentu bervariasi, yang ditandai oleh kondisi-kondisi yang penuh dengan keterbatasan, baik dalam hal pemenuhan kesehatan, akses pendidikan, pekerjaan, kebutuhan dasar hidup hingga kelayakan perumahan maupun permukiman. Karena permasalahannya begitu kompleks, maka masalah kemiskinan kerap menjadi agenda utama bagi tujuan pembangunan di Negara Berkembang. Seperti halnya negara berkembang lainnya, Indonesia meletakkan kemiskinan sebagai sasaran bagi pembangunan nasional. Sesuai dengan *preamble* Undang-undang Dasar 1945 dimana tujuan dari pembangunan nasional adalah mencapai kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat diindikasikan sebagai suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur, yang ditandai oleh suatu kondisi masyarakat dengan kualitas hidup yang baik dan mampu memenuhi kebutuhan dasar meliputi; sandang, pangan, papan pendidikan dan kesehatan.

Semenjak kebijakan otonomi daerah diberlakukan di Indonesia pada awal tahun 2001 lalu yaitu Undang-undang No.22 Tahun 1999 dan kemudian direvisi menjadi Undang-undang No. 32 Tahun 2004, Pemerintah Daerah telah memiliki kewenangan lebih luas untuk mengendalikan pembangunan di daerahnya masing-masing. Dengan maksud mempercepat pengurangan angka kemiskinan, Pemerintah Pusat membantu Pemerintah Daerah secara langsung dalam bingkai otonomi daerah untuk menjadikan masyarakatnya lebih berdaya dan mandiri dalam usaha-usaha pencapaian tujuan pembangunan nasional yaitu kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Pendekatan pembangunan yang dipakai kemudian berubah, yang awalnya meletakkan

manusia/ masyarakat sebagai obyek dari pembangunan sekarang berubah menjadi subjek dari pembangunan. Masyarakat selain menjadi tujuan dari pembangunan sekaligus merupakan pelaku proses pembangunan itu sendiri. Untuk itu, berbagai kebijakan pengentasan kemiskinan dilaksanakan dengan prinsip desentralisasi, yaitu kebijakan pengentasan kemiskinan yang memberikan kepercayaan kepada masyarakat, yaitu kepada keluarga dan kelompok masyarakat miskin, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan masyarakat luas.

Menurut Moelyarto Tjokrowinoto, demikian juga Bagong Suyanto, kebijakan dan program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Propinsi selama ini pada dasarnya, telah berupaya antara lain: pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan cara melaksanakan berbagai proyek Inpres. Kedua, mempermudah lapisan masyarakat miskin untuk memperoleh akses dalam berbagai pelayanan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, KB dan berbagai subsidi lainnya. Ketiga, menyediakan fasilitas kredit untuk masyarakat lapisan bawah dalam bentuk Kapedes, KURK, BKK, KCK dan lainnya. Keempat, membangun infrastruktur ekonomi di wilayah pedesaan, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan pertanian. Kelima, pengembangan kelembagaan seperti Program Pengembangan Wilayah Terpadu (PPWT), Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT), Program Peningkatan Pendapatan Petani Kecil (P-4K), Program UEP dan sejenisnya (lihat: Tjokrowinoto, M. 1993; Suyanto, 1999: 2)

Berdasar data perkembangan jumlah penduduk miskin di Indonesia, didapat angka-angka yang fluktuatif terkait kenaikan dan penurunan tingkat kemiskinan. Berikut merupakan perkembangan jumlah penduduk miskin di Indonesia dimulai dari Tahun 1996 hingga 2006.



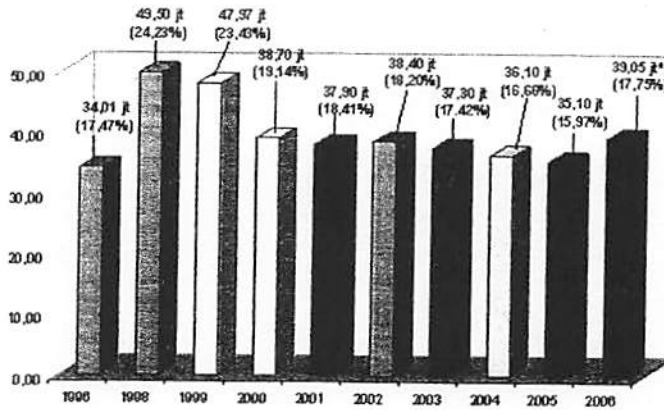


Diagram Perbandingan Tingkat Kemiskinan di Indonesia Dalam 10 Tahun Terakhir

Mengacu pada permasalahan perekonomian pelik yang dialami Indonesia pada tahun 1997 yaitu krisis moneter, maka tahun 1996 merupakan kondisi 'perekonomian stabil' sebelum akhirnya mengalami penurunan pada tahun berikutnya. Dari data tersebut didapat jumlah kenaikan tingkat kemiskinan yang sangat drastis pada tahun 1997 akibat krisis moneter. Tahun-tahun berikutnya, jumlah penduduk miskin masih tergolong tinggi. Pada tahun 2006, jumlah penduduk miskin di Indonesia masih mencapai 39,05 juta jiwa.

Sebagai salah satu propinsi terpadat di Indonesia, Propinsi Jawa Timur juga tidak luput dari permasalahan kemiskinan. Menurut hasil survey Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, sampai akhir tahun 2001, jumlah penduduk miskin di Jatim telah mencapai 24% lebih yaitu kurang lebih 7,267 juta penduduk dari total penduduk ketika itu 34,765 juta jiwa. Ironisnya, dari jumlah penduduk miskin tersebut, 92% berada dalam kategori penduduk sangat miskin atau sebanyak 6,706 juta penduduk. Ini berarti, dari setiap empat orang warga Jawa Timur terdapat satu orang miskin.

Pada tahun 2001, dari 38 Kabupaten/ Kota di Jawa Timur, maka kabupaten yang merupakan daerah termiskin adalah Kabupaten Sampang (45,69% penduduk miskin), Kabupaten Bondowoso (39,85 penduduk miskin), Kabupaten Ponorogo

(31,59% penduduk miskin), Kabupaten Pacitan (31,31% penduduk miskin), Kabupaten Bojonegoro (28,61% penduduk miskin), Kabupaten Probolinggo (27,25% penduduk miskin) dan Kabupaten Situbondo (27,20% penduduk miskin).

Sedangkan pada perhitungan menurut jumlah rumah tangga miskin, pada tahun 2002 jumlah rumah tangga miskin di Indonesia mencapai 23,12% atau sebanyak 2,196 juta rumah tangga dari 9,449 juta rumah tangga. Dari angka tersebut, kabupaten/ Kota yang memiliki jumlah rumah tangga miskin terbanyak adalah sebagai berikut: Kabupaten Bondowoso (45% rumah tangga miskin), Kabupaten Sampang (43,22% rumah tangga miskin), Kabupaten Situbondo (33,75% rumah tangga miskin), Kabupaten Ponorogo (33,06% rumah tangga miskin), Kabupaten Pacitan (33,05% rumah tangga miskin), Kabupaten Probolinggo (30,73% rumah tangga miskin), dan kabupaten Bojonegoro (30,62% rumah tangga miskin).

Tingginya tingkat kemiskinan pada tahun 2001 yaitu mencapai 7.267.000 penduduk miskin ternyata belum mengalami penurunan yang signifikan di tahun-tahun berikutnya. Merujuk pada Survei Sosial Ekonomi nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Timur, hingga Maret 2007 jumlah penduduk miskin di Jawa Timur masih mencapai 7.138.000 penduduk. Penurunan angka kemiskinan selama kurang lebih lima tahun ternyata tidak menembus angka 130.000 penduduk. Angka yang bisa dibilang belum banyak berkurang itupun ternyata diklaim sudah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2006 yang mencapai 7.456.000 penduduk.

Mengapa permasalahan kemiskinan ini sangat sulit untuk menemukan jalan keluar?, padahal Pemerintah baik Pusat maupun daerah sudah sangat gencar mengeluarkan berbagai proyek untuk pengentasan kemiskinan. Beberapa program pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan baik Pemerintah Pusat maupun Daerah antara lain adalah: program bantuan Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) dalam bidang pangan, Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin (Askeskin) dalam bidang kesehatan, Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk pengembangan usaha mikro, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam bidang pendidikan, Program Aksi

Mengatasi Dampak Kenaikan Bahan Bakar Minyak (PAM DKB), Jaring Pengaman Ekonomi Sosial (JPES), Program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu-Taskin) dibidang usaha, manusia dan lingkungan hingga yang baru diluncurkan tahun 2007 lalu yaitu Program Keluarga Harapan (PKH).

Hasil penelitian Dwiyanto (1995) menemukan sekurang-kurangnya ada empat faktor penyebab tidak optimalnya berbagai program pengentasan kemiskinan yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah. *Pertama*, sifat kebijaksanaan pengentasan kemiskinan cenderung menjadi kegiatan-kegiatan “pinggiran”. *Kedua*, kontinuitas dari kebijaksanaan dan program-program pengentasan kemiskinan sering tidak pasti, dimana kebijaksanaan tersebut kerap kali ‘menghilang’ bersamaan dengan terminasi kegiatan proyek. *Ketiga*, kerumitan birokrasi dan lemahnya posisi tawar golongan penduduk miskin ini dan *keempat*, kecenderungan sentralisasi di dalam kebijaksanaan dan pelaksanaan penggunaan dana-dana Inpres. Faktor *kelima*, menurut Bagong Suyanto (1999:5) yang menyebabkan prestasi Propinsi Jawa Timur ini dalam mengentas kemiskinan tergolong lambat adalah karena belum dimilikinya pola dan acuan jelas serta yang bersifat kontekstual di dalam pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan di tiap daerah.

Pemerintah Propinsi Jawa Timur sendiri telah meletakkan program penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu dari tujuh prioritas pembangunan Jawa Timur seperti yang telah termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2006-2008. Kebijakan penanggulangan kemiskinan diarahkan pada upaya penurunan angka kemiskinan, pengurangan jumlah pengangguran, peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi Rumah Tangga Miskin (RTM), pengurangan beban dan perbaikan mutu hidup kelompok miskin rentan dan penguatan kapasitas kelembagaan.

Salah satu program andalan Pemerintah Propinsi dalam upayanya menanggulangi kemiskinan adalah Program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu Taskin) yang digulirkan sejak tahun 2002 hingga saat ini. Adapun model pengentasan kemiskinan program ini difokuskan pada penciptaan

Desa/ Kelurahan Model Binaan dengan konsep pendekatan Tridaya yaitu pemberdayaan manusia, pemberdayaan usaha dan pemberdayaan lingkungan, yang dengan program ini diharapkan Desa/ Kelurahan Model Binaan akan lebih berdaya dan mandiri serta mampu mengentaskan masyarakatnya dari belenggu kemiskinan. Sejalan dengan hal tersebut, hingga tahun 2006, Desa/ Kelurahan yang telah dijangkau mencapai 1.801 Desa/ Kelurahan kategori merah. Dalam rangka mempercepat pengurangan angka kemiskinan, maka hingga saat ini Pemerintah Propinsi Jawa Timur masih melaksanakan Program Gerdu-Taskin. Tentunya, segala keberhasilan dan kegagalan terhadap suatu pelaksanaan program tidak dapat terlepas dari semua pihak yang terlibat maupun kondisi ekonomi dan sosial masyarakat yang melingkupinya.

Untuk itu, melalui studi evaluasi berikut ini diharapkan segala permasalahan yang teridentifikasi yang ada di lapangan menyangkut pelaksanaan Program Gerdu-Taskin ini dapat diungkapkan secara komprehensif. Dengan adanya identifikasi permasalahan di lapangan diharapkan akan ditemukan upaya-upaya perbaikan dan pengembangannya sehingga usaha pencapaian tujuan yaitu pengentasan kemiskinan dapat diwujudkan di Jawa Timur.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Atas dasar alasan penting dan latar belakang sedemikian itulah studi evaluasi ini dirancang untuk dikerjakan di Kabupaten-Kota di Jawa Timur, guna menemukan jawaban terhadap sejumlah masalah pokok sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kinerja, kontribusi dan kemampuan dari Perguruan Tinggi dan atau LSM Pendamping di dalam melaksanakan fasilitasi Program Pengembangan Desa/ Kelurahan Model Binaan Gerdu Taskin serta dalam mewujudkan laboratorium Pembangunan Desa Terpadu?

2. Bagaimanakah kinerja, kontribusi dan kemampuan dari Sektap Kabupaten/ Kota dan TFK Pendamping dalam melakukan fasilitasi Pengembangan Desa/ Kelurahan Model Binaan Gerdu Taskin di Jawa Timur?
3. Seberapa besar manfaat dari program ini dalam meningkatkan pendapatan masyarakat lokal serta sarana dan prasarana apa saja yang mendukung terjadinya peningkatan pendapatan tersebut?
4. Bagaimanakah kemampuan UPK di dalam mengelola usahanya serta berapa besar perkembangan usaha yang telah terjadi sejak pertama kali dibentuk?
5. Seberapa besar jumlah tenaga kerja lokal yang mampu diserap oleh kegiatan unit-unit usaha yang telah terbentuk, dan seberapa besar telah terjadi penurunan jumlah rumah tangga miskin (RTM) di lokasi sasaran program?
6. Bagaimanakah sesungguhnya efektifitas Model Binaan Gerdu Taskin jika dibandingkan dengan Model Program Keluarga Harapan ?

### **1.3. Dasar Hukum Pelaksanaan**

Landasan hukum yang mendasari kegiatan Studi Evaluasi Program Desa/ Kelurahan Model Binaan Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten/ Kota di Jawa Timur ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur, Nomor 10 Tahun 2001 tentang Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Timur
5. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/27/KPTS/013/2005 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan Propinsi Jawa Timur

6. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2006-2008
7. Peraturan Gubernur Nomor 914/22/043/2006 tanggal 2 Januari 2006, tentang DASK Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur tahun Anggaran 2006

### **1.3.1 Tujuan Umum Penelitian**

Secara Umum, penelitian ini bertujuan untuk menemukan Model pengentasan kemiskinan yang paling efektif memberdayakan kelompok miskin, sehingga kelompok ini tidak lagi bergantung kepada segala bentuk bantuan Pemerintah baik Pemerintah daerah maupun Pemerintah Pusat.

### **1.3.2. Tujuan Khusus Penelitian**

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk membandingkan dua Model Pengentasan Kemiskinan yang sudah diterapkan di wilayah Jawa Timur yaitu Model Binaan Gerdu Taskin dan Model Program Keluarga Harapan (PKH). Dari kedua Model tersebut, akan diketahui manakah Model yang lebih efektif memberdayakan kelompok miskin di Jawa Timur.

## **1.4. Tujuan Program Gerdu Taskin**

### **1.4.1. Tujuan Umum**

Secara umum, Program Gerdu-Taskin bertujuan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat Desa/ Kelurahan dalam penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus utama pengembangan usaha ekonomi produktif RTM melalui pendekatan TRIDAYA, pemberdayaan RTM serta penguatan kelembagaan dalam lingkungan perekonomian RTM.

#### 1.4.2. Tujuan Khusus:

Secara khusus, Program Gerdu-Taskin ini memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Meningkatkan peran serta aktif RTM dalam pengambilan keputusan pembangunan secara terbuka, demokratis dan bertanggung jawab.
2. Mengembangkan kemampuan usaha dan peluang berusaha dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan bagi RTM berpotensi.
3. Menciptakan kesempatan kerja melalui pengembangan usaha UPK dan RTM dalam rangka mengatasi pengangguran.
4. Menyediakan pelayanan kebutuhan dasar dengan orientasi pada peningkatan mutu kehidupan, pengurangan beban hidup dan peningkatan kesejahteraan RTM-R
5. Mengoptimalkan fungsi fasilitas umum Desa/ Kelurahan sebagai investasi untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal dan penanggulangan kemiskinan
6. Memperkuat kapasitas kelembagaan agar berfungsi dan berperan optimal sebagai pengelola program penanggulangan kemiskinan maupun pengelolaan pembangunan Desa/ Kelurahan pada umumnya.
7. Mengoptimalkan kemitraan antar *stakeholders* dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan secara partisipatif.

#### 1.4.2. Tujuan Pelaksanaan Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Program

Secara umum, studi evaluasi pelaksanaan program ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui manfaat dan atau dampak dari serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi/ LSM berkaitan dengan fasilitasi pendampingan Desa/ Kelurahan Model Binaan Gerdu-Taskin di 10 Kabupaten/ Kota di Jawa Timur.

- b. Menilai peran dan kontribusi Pendamping, Sektap dan TFK di masing-masing Kabupaten/ Kota dalam mencapai keberhasilan program melalui fasilitasi pembinaan dan pengembangan Desa/ Kelurahan Model Binaan Gerdu-Taskin
- c. Mengetahui kemampuan UPK dalam mengelola sumber dana untuk pengembangan usaha dan pengembangan modal produktif di masyarakat .
- d. Mengetahui perkembangan usaha produktif masyarakat penerima program sebagai hasil nyata pendampingan yang dilaksanakan oleh PT dan LSM.
- e. Mengetahui kemampuan usaha ekonomi mikro dalam menyerap tenaga kerja lokal dalam rangka pengurangi pengangguran dan tujuan mengentas kemiskinan, serta peningkatan kualitas lingkungan dalam mendukung pengembangan sarana dan prasarana ekonomi lokal.

### **1.5. Ruang Lingkup Kegiatan Evaluasi Program**

Studi Evaluasi Program tahun 2008 ini adalah program atau kegiatan untuk pengembangan Desa- Kelurahan Model Binaan Gerdu Taskin yang dilaksanakan bekerjasama dengan Perguruan Tinggi dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) di lokasi Desa-Kelurahan yang tersebar di sepuluh Kabupaten-Kota di Jawa Timur. Ruang Lingkup Studi ini difokuskan pada kegiatan evaluasi kemampuan, kinerja dan kontribusi Sektap, TFK, Perguruan Tinggi dan LSM Pendamping dalam memfasilitasi pengembangan Desa-Kelurahan Model. Disamping itu, studi ini juga difokuskan untuk menemukan Model Pemberdayaan Kelompok Miskin yang lebih efektif dalam jangka panjang di Jawa Timur .

### **1.6. Tinjauan Pustaka**

Semenjak diberlakukannya pada tahun 2001 lalu, UU Otonomi Daerah hingga saat ini masih banyak menjadi wacana dan perdebatan publik. Kewenangan yang dilimpahkan kepada Daerah seolah memunculkan dua asumsi. Pertama; bahwa untuk mempercepat proses pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan yang



efektif dan efisien, maka keterlibatan Pemerintah Daerah secara langsung terhadap pembangunan masyarakatnya adalah aspek penting dalam proses pembangunan dan pengendalian daerah. Asumsi kedua, adanya otonomi daerah dianggap sebagai jalan keluar atas ketidak mampuan Pemerintah Pusat dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan melimpahkannya pada Pemerintah Daerah. Terlepas dari kedua asumsi tersebut, dewasa ini Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/ Kota bertanggung jawab terhadap pembangunan dan pengendalian di daerahnya.

Salah satu permasalahan yang telah menjadi agenda pembangunan baik di Pusat maupun Daerah adalah permasalahan pengentasan kemiskinan. Sejak periode tahun 1970-an, sebenarnya sudah sangat banyak penelitian yang dikerjakan untuk mempelajari, mendeskripsikan dan menemukan solusi dari masalah kemiskinan ini (lihat selanjutnya: Singarimbun dan D.H. Penny, 1976; Alfian, et al, 1980; Sayogyo, 1977; Suparlan, P., 1984; Siahaan, H., 1977 dan lainnya). Meskipun demikian, nampaknya pertanyaan klasik tentang apa itu kemiskinan dan faktor apa yang menyebabkan penduduk mengalami tekanan kemiskinan, kiranya belum ada visi jawaban yang jelas dan memuaskan. Di antara para ahli sendiripun masih terdapat perbedaan konsepsi yang tajam tentang kemiskinan dan faktor-faktor penyebab kemiskinan yang dialami sebagian penduduk tersebut. Levitan (1980) misalnya, mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup layak. Sementara itu, Schiller (1979) berpendapat bahwa, kemiskinan adalah bentuk dari ketidak sanggupuan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas. Senada dengan itu, Emil Salim (1980) mendefinisikan kemiskinan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. (lihat: Ala, A., Bayo, 1981: 1-3)

Dalam pemikiran sebagian ahli, terutama yang menganut pandangan modernisasi -- mendefinisikan kemiskinan sebagai fenomena ekonomi, dalam konteks rendahnya penghasilan atau tidak dimilikinya sumber-sumber mata pencaharian yang cukup untuk menopang kebutuhannya. Pandangan seperti ini,

dalam beberapa hal mungkin benar, tetapi diakui atau tidak, konsepsi semacam itu kurang mampu mencerminkan kondisi riil yang sebenarnya dihadapi oleh para keluarga-keluarga miskin itu. Kemiskinan dalam banyak hal tidak sekedar bermakna kurangnya pendapatan atau terbatasnya sumber-sumber penghidupan yang layak menurut ukuran ekonomi semata-mata, akan tetapi lebih dari itu, bahwa; kemiskinan adalah juga persoalan ada atau tidak adanya peluang atau kemungkinan bagi keluarga-keluarga miskin tersebut untuk mengembangkan usaha serta taraf hidupnya kearah yang lebih baik. (Suyanto, 1999: 9)

Definisi kemiskinan yang lebih komprehensif pernah dikemukakan oleh John Friedman (1979). Menurut Friedman, kemiskinan adalah suatu bentuk ketimpangan di dalam upaya mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Menurut Friedman (1979) apa yang dimaksud dengan basis kekuasaan sosial meliputi: (1) modal produktif atau aset, misalnya dalam bentuk tanah, perumahan, peralatan dan kesehatan; (2) sumber keuangan seperti: penghasilan, dan fasilitas kredit yang memadai; (3) organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama seperti: koperasi, dll; (4) jaringan sosial atau *network* untuk mendapatkan pekerjaan, barang-barang, pengetahuan, keterampilan atau yang memadai, dan (5) informasi-informasi yang fungsional bagi kehidupannya.

Secara teoritis kemiskinan dibedakan menjadi dua kategori besar menurut akar penyebab atau faktor-faktor yang melatar belakangnya. Pertama, kemiskinan alamiah atau biasa disebut kemiskinan *absolute*, yakni kemiskinan yang timbul sebagai akibat terbatasnya atau langkanya sumber-sumber daya alam (dan teknologi) sehingga penduduk tidak dapat hidup secara layak. Artinya, faktor-faktor yang menyebabkan suatu masyarakat menjadi miskin, secara alami memang ada, dan bukan merupakan takdir atau kodrat (sebuah anggapan yang meyakini bahwa, akan selalu ada masyarakat atau orang yang hidupnya lebih miskin dan lebih sengsara dari yang lain). Didalam kondisi kemiskinan alamiah tersebut, bisa saja terjadi situasi yang harmonis antara sesama warga masyarakat, meskipun senyatanya memang ada perbedaan kekayaan. Namun dampak dari perbedaan kekayaan itu tidak sampai

menimbulkan konflik, karena terdapat mekanisme yang mengeliminir atau memperlunak sikap kecemburuan sosial dalam masyarakat melalui pranata-pranata tradisional, seperti: hubungan patron-klien, adat hidup gotong royong, serta relasi khusus Kaula-Gusti atau santri-kyai dan sejenisnya.

Kedua, kemiskinan buatan atau biasa disebut dengan kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural dapat terjadi karena struktur sosial di dalam masyarakat itu tidak memberikan peluang bagi golongan tertentu untuk ikut berperan serta di dalam seluruh ruang gerak utama perekonomian masyarakat. Dengan kata lain, ada golongan masyarakat yang tidak memperoleh kesempatan untuk ikut ambil bagian serta memanfaatkan sarana dan prasarana kehidupan ekonomi, sosial, politik yang tersedia dalam masyarakat itu. Implikasi dari pengertian kemiskinan semacam ini adalah, bahwa struktur sosial itulah yang menyebabkan segolongan anggota masyarakat itu tetap miskin – walaupun sebenarnya jumlah total produksi yang dihasilkan oleh masyarakat itu mampu membebaskan semua anggota masyarakat dari kemiskinan – jika saja total produksi tadi dibagi rata ke seluruh penduduk. (lihat: Sumardjan, Selo, 1980 dan Siahaan, H., 1990: 37)

Secara sederhana, pengertian kemiskinan merupakan kondisi yang menggambarkan kadar keterbatasan kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Indikasi terhadap penggolongan apakah masyarakat tersebut itu miskin atau tidak tergantung pada beberapa hal. Pendekatan standar kemiskinan internasional yang dikeluarkan oleh Bank Dunia berpendapat, bahwa mereka yang berpendapatan di bawah US\$2 perhari tergolong sebagai masyarakat miskin. Badan Pusat Statistik (BPS) sendiri, sebagai lembaga data resmi Pemerintah, mengukur angka kemiskinan dengan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Pemerintah menggunakan asumsi miskin, dengan pendapatan US\$ 0,6 atau sekitar Rp 5.500,- per hari.

sebagai pedoman pelaksanaan pengentasan kemiskinannya. Pemberdayaan Manusia dimaksudkan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat, bahwa berperan serta aktif dalam proses pelaksanaan pembangunan itu penting dengan dukungan/ bantuan berupa beberapa kebutuhan pokok. Pengembangan Usaha dimaksudkan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran berusaha memanfaatkan sebanyak-banyaknya sumber daya lokal, bantuan modal bergulir hingga kesempatan membuka usaha bagi masyarakat miskin berpotensi melalui kelompok usaha bersama. Pengembangan usaha tersebut dapat diupayakan melalui banyak cara, misalnya pelatihan keterampilan wirausaha kecil, pengadaan pendampingan, pembentukan asosiasi kelompok usaha hingga penyerapan investasi ke masyarakat dengan difasilitasi oleh Kecamatan maupun Kabupaten. Sedangkan Pemberdayaan Lingkungan (PL) adalah upaya untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran akan arti penting lingkungan sehingga dalam proses pembangunan lingkungan perlu diperhatikan kelestarian serta kontribusi/ manfaatnya bagi masyarakat sekitar.

Adapun konsep Tridaya (lingkungan, usaha, manusia) yang selama ini menjadi sasaran program kini juga harus disesuaikan dengan indikator yang dibutuhkan untuk menunjang Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM secara umum dilihat dari tiga aspek, yaitu peningkatan kesehatan atau keselamatan ibu melahirkan, peningkatan pendidikan dan pendapatan masyarakat.

### 1) Teori dan Konsep Kemiskinan

Hingga saat ini, kemiskinan belum memiliki definisi baku yang digunakan di setiap negara. Dari perbedaan definisi dan pemaknaan kemiskinan yang digagas oleh para ahli, setidaknya terdapat dua konsep kemiskinan yang selama ini masih menjadi perdebatan seperti disinggung di atas. Dua konsep tersebut adalah kemiskinan *absolut* dan kemiskinan *struktural*. Untuk konsep yang *pertama* yaitu kemiskinan *absolut* atau juga dikenal dengan kemiskinan alamiah adalah kemiskinan

Mengingat rendahnya nilai tersebut, tentu tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, Pemerintah terus berupaya menangani kemiskinan dengan berbagai strategi. Penerapan strategi pengentasan kemiskinan yang hanya bewujud pemberian bantuan fisik seperti bantuan langsung yang bersifat *charity* kini tidak lagi menjadi pilihan yang populer. Disamping, pola bantuan yang hanya bersifat sementara dan tidak berkelanjutan, bantuan seperti itu tak ayal membawa masyarakat kembali kepada kondisi miskin. Untuk itu, konsep baru bagi pengentasan kemiskinan yang berorientasi terhadap pemberdayaan masyarakat dan kemandirian masyarakat kini mulai diterapkan.

Strategi yang dimaksud adalah pendekatan Tridaya, yakni meliputi: (1) Pemberdayaan Manusia; (2) Pemberdayaan Usaha; (3) Pemberdayaan Lingkungan. Berikut merupakan penjelasan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Tridaya:

1. Pemberdayaan Lingkungan yaitu pembangunan dan perlindungan lingkungan baik dalam proses pelaksanaan kegiatan yang menyangkut masyarakat banyak, terutama kepentingan masyarakat miskin sehingga kebutuhan masyarakat miskin akan fasilitas, sarana dan prasarana menjadi terpenuhi disamping menjaga kelestarian lingkungan.
2. Pemberdayaan Masyarakat, yaitu kegiatan pembangunan masyarakat yang berorientasi pada pembangunan solidaritas sosial dan keswadayaan masyarakat sehingga tercipta pondasi yang kokoh dalam penanggulangan kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan, terutama dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin yang rentan dan marjinal
3. Pengembangan Usaha/ Ekonomi yaitu upaya-upaya peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat miskin dalam mengembangkan peluang usaha dan akses ke sumberdaya kunci untuk peningkatan pendapatan, dengan tetap memperhatikan dampak lingkungan fisik dan sosial.

Program Pengembangan Desa/Kelurahan Model Binaan Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu Taskin) menggunakan pendekatan konsep Tridaya

yang muncul, akibat keterbatasan sumber-sumber daya (alam dan atau tingkat teknologi masyarakat) yang memang melekat pada penduduk di wilayah itu untuk memperoleh kondisi dan hidup secara layak. (lihat: Mochtar Mas'ud, 1994 : 18) Dalam hal ini, faktor-faktor alami yang menyebabkan seseorang dalam masyarakat itu miskin memang ada, dan bukan karena "takdir" yang dipercaya bahwa di dalam setiap kehidupan manusia akan selalu ada orang atau sekelompok orang lebih miskin dari yang lain. Meskipun mungkin benar, bahwa di dalam keadaan miskin alamiah seperti itu akan terjadi varian-varian kepemilikan kekayaan, di antara masyarakat miskin tersebut. Tetapi dampak dari perbedaan-perbedaan itu tidak sampai menimbulkan polarisasi, atau kebencian yang sifatnya terbuka, karena seringkali ada mekanisme psikologis yang menekan kesenjangan itu ke alam bawah sadar warga masyarakat, yang sering disebut sebagai kearifan lokal (misalnya lewat hubungan patron-klien, semangat gotong royong, dll) yang berfungsi mengeliminasi perbedaan atau kesenjangan tersebut.

Kedua, yakni kemiskinan struktural atau juga dikenal dengan kemiskinan buatan. Konsep kemiskinan ini sering pula digunakan silih berganti dengan konsep serupa, misalnya kemiskinan relatif. Kemiskinan struktural dapat terjadi karena struktur sosial yang ada di dalam masyarakat itu tidak memberikan peluang yang sama kepada warga masyarakat untuk menguasai sumber-sumber ekonomi yang tersedia di dalam masyarakat itu. Dengan demikian sebagian warga masyarakat akan tetap miskin, meskipun jika jumlah total produksi yang dihasilkan oleh masyarakat itu -- seandainya dibagi rata dan adil akan -- akan dapat membebaskan semua warga masyarakat dari kemiskinan (Suyanto, B., dan Septi Ariadi, eds; 2003 : 18) Di sinilah letak persoalan kemiskinan itu.

Kemiskinan struktural, dalam banyak hal terjadi bukan karena seorang individu atau anggota keluarga itu malas bekerja atau tidak menghargai karya dan waktu. Berbeda dengan pandangan kaum modernism, yang cenderung memvonis akar kemiskinan berada pada lemahnya etos kerja orang miskin, tiadanya semangat

*enterprenuer*, dan tidak terbiasa dengan budaya kerja keras -- maka bagi ilmuwan sosial, kemiskinan struktural diidentikkan dengan kemiskinan yang terjadi akibat kondisi sosial yang berpengaruh pada sistem perekonomian masyarakat secara makro, maupun mikro. Menurut Selo Soemardjan (dalam Alfian, Melly G.Tan dan Selo Soemardjan, eds, 1980), makna kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat, karena struktur sosial dalam masyarakat itu tidak memberikan kesempatan kepada golongan miskin ini untuk ikut menguasai dan memanfaatkan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka (lihat: Suyanto, B., dan Septi Ariadi, eds; 2003 : 31)

Secara operasional, kemiskinan struktural dapat diterjemahkan sebagai kondisi keterbatasan yang dialami oleh sebagian besar warga masyarakat, yang penyebab utamanya bersumber dari struktur sosial yang berlaku (yang sengaja dibentuk oleh kaum penguasa) dan oleh karena itu pemecahannya harus dicari lewat pemahaman mendalam tentang struktur sosial itu sendiri sebagai penyebab terjadinya kemiskinan. Umumnya kemiskinan struktural terjadi di dalam suatu masyarakat dimana terdapat perbedaan yang tajam antara sebagian kecil kelompok yang hidup dalam kemewahan atau kaya raya -- berhadapan dengan sebagian terbesar kelompok masyarakat yang hidup melarat atau penuh dengan keterbatasan. Meskipun mayoritas dalam jumlah, tetapi dalam realita -- kaum miskin ini tidak memiliki kekuatan apa-apa untuk mengubah dan memperbaiki kualitas hidupnya. Sementara minoritas warga yang kaya raya biasanya memiliki posisi yang kuat untuk mengontrol dan memonopoli berbagai sumber pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat; baik itu ekonomi, politik maupun sosial. Selama golongan minoritas yang kaya raya ini masih menguasai berbagai sumber pemenuhan hidup masyarakat, maka selama itu pula diperkirakan struktur sosial yang berlaku akan bertahan. Akibatnya terjadilah apa yang kemudian disebut dengan kemiskinan struktural. (Suparlan, P., 1984 : 16)

Ciri utama dari kemiskinan struktural adalah peluang untuk terjadinya mobilitas sosial vertikal dikalangan kaum miskin sangatlah kecil, bahkan



digambarkan tidak mungkin terjadi. Kalaupun itu terjadi, maka prosesnya pun akan berjalan sangat lambat. Hal ini karena penguasaan sistem dilakukan oleh golongan kaum minoritas (masyarakat yang kaya). Maka, mereka yang miskin akan tetap hidup melarat, sementara mereka yang kaya tetap bisa menikmati kekayaannya. Kondisi ini dapat saja terjadi karena menurut pendekatan struktural, tekanan struktur sosial itulah yang telah menyebabkan kaum miskin ini menghadapi berbagai rintangan atau hambatan untuk keluar dari kemiskinannya. Dalam kondisi miskin, tidaklah mungkin mereka mampu menyekolahkan anak-anak keturunan mereka ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi agar kelak mereka mampu bersaing dalam dunia kerja. Akibatnya, tidak ada peluang untuk bisa keluar dari kondisi kemiskinannya.

Ciri yang lain dari kemiskinan struktural adalah munculnya ketergantungan kaum miskin terhadap kelas sosial di atasnya. Menurut Mohtar Mas'ood, adanya ketergantungan inilah yang (selama ini) berperan besar di dalam melemahkan posisi tawar (*bargaining position*) golongan miskin dalam hubungan sosial yang sudah timpang itu (Mas'ood, Mochtar : 21) Dalam kenyataannya, buruh tidak pernah punya kemampuan untuk menetapkan upah yang seharusnya lebih pantas mereka terima. Demikian pula para petani kecil, senantiasa tidak berdaya dalam menetapkan harga produksi pertanian mereka -- ketika berhadapan dengan para tengkulak dan pengijon. Pendek kata, golongan miskin ini hampir pasti tidak dapat berbuat banyak atas eksploitasi dan proses marginalisasi oleh struktur masyarakat dimana mereka menjadi bagian di dalamnya.

Konsep kemiskinan struktural yang diajukan oleh Selo Soemardjan (1980) tersebut di atas, ternyata tidak luput dari kritik. Menurut Parsudi Suparlan definisi kemiskinan yang dikemukakan oleh Selo Soemardjan nampak sangat normatif dan bersifat ideologis serta kurang tajam dalam memberikan penjelasan mengapa orang atau sekelompok orang itu menjadi miskin di bawah tekanan struktur masyarakatnya (Suparlan, P., 1984 : 21)



Konsep dan definisi kemiskinan yang nampak lebih realistis adalah konsep yang pernah diajukan oleh Robert Chambers. Menurut Chambers (1987 : 21) inti dari persoalan kemiskinan sesungguhnya terletak pada apa yang ia sebut dengan *'deprivation trap'* yakni terperangkap dalam keadaan ketidak beruntungan situasi (Faturachman, *et al*, 2007 : 6) atau perangkap kemiskinan. (lihat: Suyanto, B., dan Septi Ariadi, 2003 : 19) Dalam penjelasannya, Chambers menunjukkan adanya 5 (lima) faktor yang menyebabkan orang atau sekelompok orang terperangkap ke dalam kondisi kemiskinan. Kelima faktor itu meliputi ; (1) kemiskinan itu sendiri, (2) fisik yang lemah, (3) keterasingan atau terisolasi dari dunia luar, (4) kerentanan dan (5) ketidak berdayaan atau *powerlessness* (Chambers, R., 1987 : 21) Dari ke lima faktor tersebut, kerentanan dan ketidakberdayaan merupakan masalah utama yang perlu mendapatkan perhatian. Menurut Chambers, kerentanan dapat dilihat dari ketidak mampuan keluarga miskin ini untuk menyediakan sesuatu saat menghadapi krisis atau situasi darurat seperti; datangnya bencana alam, gagal panen atau sakit mendadak. Kondisi ini kerap kali menimbulkan *'poverty rackets'* atau pemicu kemiskinan, karena dalam situasi tidak berdaya seperti itu (sakit atau gagal panen), alternatif yang tersedia ; mereka terpaksa harus menjual atau menggadaikan barang barang rumah tangganya atau aset produksinya yang akan membuat mereka semakin terpuruk dalam kemiskinan.

Golongan miskin juga identik dengan ketidak berdayaan. Ini dapat dilihat dari berbagai bentuk bantuan yang digulirkan dan mengatas namakan *charity* (amal) bagi kaum miskin. Ketika bantuan datang, kerap kali jumlah yang seharusnya mereka terima sudah tidak sesuai lagi dengan kuota yang sebenarnya, karena para elit di tingkat kecamatan maupun di desa sudah lebih dulu 'memanfaatkan' bantuan itu untuk kelompoknya (pungutan liar dalam birokrasi/ tindakan korupsi birokrasi yang kronis). Dalam kondisi demikian, orang-orang miskin hanya pasrah, karena tidak berdaya melawan kekuatan dan kekuasaan kelas sosial di atasnya (Dewanta, A., S., dkk., 1995 : 20)

Seseorang atau sebuah keluarga miskin, kerap kali mampu tetap 'survive' dan bahkan bangkit kembali terutama jika mereka ini memiliki pranata atau jaringan sosial yang melindungi dan menyelamatkannya. Tetapi seseorang atau keluarga yang sudah masuk ke dalam perangkap kemiskinan (*visiuous circle*) mereka umumnya akan sulit untuk bangkit kembali. Kelompok masyarakat seperti ini acapkali tidak bisa ikut menikmati hasil pembangunan dan bahkan justru sebaliknya, mereka sering menjadi korban dari proses pembangunan itu sendiri (Suyanto, B., dan Septi Ariadi, eds; 2003 : 22)

Ada bukti empirik yang menunjukkan bahwa naiknya golongan penduduk di atas garis kemiskinan, tidak serta merta bermakna bebas dari segala ancaman dan perangkap kemiskinan. Jika dicermati benar, maka akan nampak bahwa kelompok miskin ini sesungguhnya hanya berpindah dari satu tahap kemiskinan yang paling bawah (disebut : *destitute*) ke tahap di atasnya (*near poor*) Dibandingkan dengan kelompok miskin *destitute*, kelompok miskin *near poor* memang relatif lebih baik kondisinya, tetapi mereka belum benar-benar stabil. Jika terjadi krisis ekonomi di tingkat makro, gagal panen atau bencana lainnya, maka bukan mustahil kelompok *near poor* ini akan kembali merosot ke tahap *destitute*.

Apa yang telah dipaparkan di atas, sebenarnya menunjukkan bahwa akar penyebab kemiskinan memang sangat kompleks, apakah itu tingkat pendapatan yang rendah, tidak dimilikinya akses terhadap sumber-sumber daya ekonomi, ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup layak, sikap apatis dalam proses politik dan sosial, keterasingan dan kerentanan dan pada akhirnya ketidak berdayaan secara sosial maupun ekonomi. Kemiskinan dan kelaparan diyakini sebagai akar permasalahan 'hilangnya martabat manusia', hilangnya rasa keadilan, belum terwujudnya kehidupan masyarakat madani (*civil society*), tidak berjalannya demokrasi dan terjadinya degradasi lingkungan (Faturochman, et al, 2007 : 4)

Dalam fenomena Program Pemberdayaan, usaha pengentasan kemiskinan dilakukan untuk menyentuh keranah dasar, yaitu akar permasalahan terjadinya proses pemiskinan masyarakat, khususnya di Propinsi Jawa Timur. Untuk itu, pelaksanaan Program Gakin dibentuk berdasar tujuan yaitu penciptaan masyarakat yang berdaya dan mandiri sehingga mengurangi ketergantungan masyarakat pada struktur sosial yang dinilai kurang menguntungkan bagi masyarakat miskin itu sendiri. Pemerintah, dalam hal ini Bapemas bermaksud menciptakan suatu lembaga kemasyarakatan secara mandiri dikelola oleh masyarakat sehingga akan memudahkan akses dan proses pemanfaatan bantuan.

## **2) Konsep Pemberdayaan Perempuan**

Secara konseptual, program pengembangan masyarakat berpijak pada tiga pendekatan utama, yakni pendekatan peningkatan pendapatan, pendekatan modernisasi dan pendekatan pemberdayaan. Cukup banyak ilmuwan sosial yang sependapat bahwa salah satu fase penting dalam proses pengembangan masyarakat adalah bagaimana meningkatkan ekonomi keluarga (Adelman, Irma and Sherman Robinson, 1978 : 227)

Dalam kaitannya dengan konsep pemberdayaan , maka upaya pemberdayaan harus lebih dari hanya sekedar memfasilitasi adanya peningkatan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang kehidupan (ekonomi, sosial dan politik). Tetapi konsep pemberdayaan harus pula mendorong proses -- yang menyebabkan kaum perempuan merasa bahwa hak dan kepentingannya dijamin, dan agar tumbuh kemampuan untuk menyuarkan tuntutan-tuntutannya, serta ada peningkatan akses terhadap berbagai kesempatan pengambilan keputusan. Pemberdayaan juga harus menekankan langkah konkrit untuk mengubah nilai hegemoni patriarkhi, akses terhadap sumber daya dan lembaga-lembaga publik yang cenderung memperkuat perlakuan-perlakuan subordinasi terhadap kaum perempuan (Google,

[http://www.kalteng.go.id/indo/Pemberdayaan\\_Perempuan.htm](http://www.kalteng.go.id/indo/Pemberdayaan_Perempuan.htm) diakses tanggal 2 Agustus 2008.

Pemberdayaan perempuan memerlukan tidak hanya dukungan dari Pemerintah, tetapi juga seluruh anggota masyarakat, karena hal ini akan dapat membantu mencegah adanya marginalisasi perempuan oleh tindakan-tindakan antara lain: isolasi, perlakuan tidak adil dan konflik kewajiban yang harus dipikul oleh perempuan antara tugas ranah domestik dan tugas di sektor publik (Google, [http://www.kalteng.go.id/indo/Pemberdayaan\\_Perempuan.htm](http://www.kalteng.go.id/indo/Pemberdayaan_Perempuan.htm)). Untuk itu, pemberdayaan perempuan diupayakan untuk mencapai tujuan menunjang dan mempercepat tercapainya kualitas hidup dan mitra kesejajaran antara laki-laki dan perempuan. Upaya ini salah satu di antaranya dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi atau advokasi pendidikan dan latihan bagi kaum perempuan meliputi seluruh sektor dalam bidang kehidupan.

Menurut sumber di atas, perempuan dapat diberdayakan melalui proses *local budgeting*. Upaya ini dapat melengkapi kemampuan perempuan tentang "*budget literacy*", yakni pengetahuan dasar mengenai apa yang dimaksud dengan anggaran, bagaimana anggaran itu harus dikelola dan dikembangkan, apa saja keterbatasan-keterbatasannya, dan hak-hak apa yang dimiliki masyarakat dalam kaitannya dengan alokasi sumber daya dan terutama dalam proses yang menyangkut segala macam bentuk *cash flow* anggaran tersebut.

Kemampuan perempuan selama ini dianggap lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, terutama dalam lingkup kehidupan pertanian, karena budaya patriarkhi memandang peran perempuan hanya berada pada lingkup domestik (rumah tangga saja). Oleh sebab itu mereka selalu diposisikan lebih rendah dibandingkan laki-laki.

### 3) Konsep Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

Sebagaimana telah disinggung di bagian awal, bahwa peningkatan kualitas hidup perempuan berkaitan erat dengan upaya penanggulangan kemiskinan melalui tiga aspek pemberdayaan. Ketiga aspek tersebut meliputi peningkatan daya fisik, daya sosial, dan daya ekonomi ke dalam sebuah konsep yang disebut **Tridaya** (Kompas, *CyberMedia*, 5 Oktober 2001; <http://www.kompas.com/kompas-cetak/011/05/iptek>, diakses tanggal 2 Agustus 2008).

## 1.7. Metode Penelitian

### 1.7.1. Penentuan Daerah Penelitian

Studi Evaluasi ini pada dasarnya dirancang menggunakan pendekatan Survey dengan mengutamakan analisis deskriptif kualitatif terutama untuk dapat memenuhi tujuan penelitian tersebut di atas. Daerah Kabupaten-Kota yang menjadi lokasi studi ini telah ditentukan sebanyak sepuluh lokasi, antara lain:

1. Desa Kebonagung, di Kabupaten Madiun
2. Desa Kemasentani, di Kabupaten Mojokerto
3. Desa Jambu, di Kabupaten Kediri
4. Desa Taji, di Kabupaten Malang
5. Desa Ngromo, di Kabupaten Pacitan
6. Desa Pronojiwo, di Kabupaten Lumajang
7. Desa Gambirono, di Kabupaten Jember
8. Kelurahan Josenan, di Kota Madiun
9. Desa Penambangan, di Kabupaten Sidoarjo
10. Desa Gambor, di Kabupaten Banyuwangi

Penentuan sepuluh lokasi Desa/ Kelurahan di Kabupaten/ Kota tersebut di atas, didasarkan pada pertimbangan, bahwa kesepuluh lokasi tersebut merupakan

daerah yang menjadi sasaran Program Desa-Kelurahan Model Binaan Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan, tahun 2007 yang merupakan program Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Timur. Dengan demikian pemilihan lokasi dan sasaran pengamatan dilakukan berdasarkan pertimbangan “*purposive sampling*” yakni desa-desa/ kelurahan yang merupakan desa Model Binaan 2007.

### 1.7.2. Jumlah Sampel Penelitian

Unit analisis di dalam studi ini terdiri dari: kepala-kepala keluarga (RTM) yang menjadi sasaran program Desa/ Kelurahan Model Binaan Gerdu Taskin 2007, para Kepala Desa- Kelurahan, Pejabat Sektap, Pengurus UPK, TFK dan Perguruan Tinggi/ LSM Pendamping yang ditetapkan di masing-masing lokasi pengamatan. Dengan cara “*availability sampling*” atau unit sampel yang tersedia di tiap lokasi pengamatan, telah diwawancarai sebanyak 5 (lima) responden menurut tugas pokok dan fungsi masing-masing di setiap lokasi Program. Dengan demikian jumlah sampel responden yang diwawancarai dalam studi ini sebanyak 50 (lima puluh) orang responden.

### 1.7.3. Cara Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam studi ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer untuk responden rumah tangga meliputi: karakteristik responden, jenis pekerjaan/ usaha, jumlah anggota Pokmas awal yang terlibat dan jumlah akhir anggota Pokmas, jumlah tenaga kerja lokal yang mampu diserap, jenis sumber-sumber produksi yang dimiliki dan dikuasai, besar penghasilan, tingkat dan jenis konsumsi, pengeluaran untuk kesehatan, pendidikan, rekreasi dan lainnya – dikumpulkan dengan menggunakan perangkat kuesioner semi terstruktur yang sudah diuji coba terlebih dahulu. Sedangkan untuk responden Kades/ Lurah, Sektap, Pengurus UPK dan TFK serta Pendamping dari PT/ LSM, data difokuskan pada



Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) masing-masing, untuk mengukur seberapa besar kontribusinya dalam program ini.

Data sekunder yang relevan dengan studi ini juga dikumpulkan dari berbagai sumber yang otentik dan kompeten, antara lain dari Kantor Desa/ Kelurahan, UPK, Dinas Pemberdayaan Masyarakat setempat, menyangkut jumlah RTM dan program-program pengentasan kemiskinan serta hasil yang sudah dicapai dan atau yang sedang dilaksanakan selama ini.

#### **1.7.4. Analisis Data**

Studi Evaluasi yang dirancang menggunakan pendekatan Survey ini, menekankan pada analisis-analisis yang bersifat kualitatif terhadap data kuantitatif yang diformat ke dalam bentuk monografi-monografi ringkas guna memenuhi tujuan studi di atas. Setelah seluruh data primer dikumpulkan melalui kuesioner, langkah selanjutnya data tersebut diolah terlebih dahulu dengan menggunakan bantuan program komputasi (SPSS) untuk menghasilkan informasi-informasi kuantitatif yang lebih sederhana (dalam bentuk tabel frekuensi) agar lebih mudah untuk dibaca dan dianalisis. Tahap berikutnya, data sebagaimana ditampilkan dalam format tabel-tabel frekuensi tersebut di atas, selanjutnya di analisis dengan mengandalkan kecermatan dan ketajaman deskripsi dan interpretasi untuk dipakai menjawab permasalahan sebagaimana di ajukan di muka.

#### **1.7.5. Jadwal Pelaksanaan Penelitian**

Studi Evaluasi tentang program Pengembangan Desa/ Kelurahan Model 2007 ini telah dilaksanakan selama 5 (lima) bulan efektif, mulai dari tahap persiapan penelitian, penyusunan instrumen, pengumpulan data, pengolahan, analisis hingga penulisan laporan.

## BAB 2

### DESKRIPSI PROGRAM PENGEMBANGAN DESA/ KELURAHAN MODEL BINAAN GERDU TASKIN TAHUN 2008

#### 2.1. Prinsip Dasar Pelaksanaan Program

Beberapa prinsip yang berlaku dalam pelaksanaan program ini antara lain adalah:

1. Berbasis Potensi Lokal, bahwa penentuan kegiatan didasarkan pada pendayagunaan dan pengembangan potensi aktual yang ada di lokasi program.
2. Partisipatif, bahwa pengambilan keputusan dalam pengelolaan kegiatan dalam semua tahapannya dilakukan dengan memerankan sertakan semua pelaku program, terutama kelompok masyarakat miskin.
3. Transparan dan akuntansi, bahwa pengelolaan kegiatan dipastikan diketahui oleh masyarakat luas, agar warga masyarakat mempunyai peluang dalam memberikan kritik dan pengawasan.
4. Keterpaduan, bahwa pengelolaan program dilakukan secara utuh dan menyeluruh sesuai dengan potensi, kemampuan dan dukungan yang ada serta mengoptimalkan kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah, pengusaha, LSM, Perguruan Tinggi dan pihak peduli lainnya.
5. Keberlanjutan, bahwa pengelolaan program secara dini telah merencanakan keberlanjutan program dengan melakukan pengembangan sesuai dengan kinerja dan kondisi yang ada.
6. Pembelajaran, bahwa pengelolaan program ini merupakan suatu proses pembelajaran pola penanggulangan kemiskinan yang efektif berdasarkan praktik-praktik di lapangan melalui proses transfer pengetahuan, sumber daya, teknologi dan informasi dari Perguruan Tinggi sebagai pusat keahlian dan kepakaran.



## 2.2. Penjelasan Umum Program

Pengembangan Desa/ Kelurahan Model Binaan Gerdu-Taskin ini diarahkan untuk :

1. Pemberdayaan RTM melalui pola pendekatan Tribina dan Pengembangan Potensi Unggulan Desa/ Kelurahan.
  - a. Pengembangan RTM difokuskan pada:
    - Pemberdayaan usaha berupa fasilitasi pengembangan usaha RTMB dalam bentuk pelayanan Usaha Simpan Pinjam (USP) dan kemitraan usaha yang dikelola oleh UPK
    - Pemberdayaan manusia dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar RTM-R di bidang pendidikan dan kesehatan. UPK juga merintis terwujudnya Sistem Keterjaminan Sosial bagi RTM-R.
    - Pemberdayaan lingkungan berupa sarana dan prasarana fisik pendukung pengembangan potensi ekonomi unggulan Desa/ Kelurahan.
  - b. Pengembangan Potensi Unggulan Desa/ Kelurahan disesuaikan dengan karakteristik tipologi Desa/ Kelurahan dengan fokus kegiatan antara lain, meliputi:
    - Pengkajian komoditi dan produk unggulan masyarakat miskin dan atau produk unggulan Desa/ Kelurahan miskin yang mampu mendukung pemberdayaan masyarakat miskin.
    - Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Kemampuan Kewirausahaan
    - Pengembangan dukungan sarana dan prasarana produksi/ Budi daya/ Usaha jasa.
    - Mendukung pengembangan Teknologi Tepat Guna untuk pengolahan dan pemasaran hasil.
    - Pengembangan kelembagaan dan manajemen usaha.
    - Penguatan permodalan.

- Pengembangan akses informasi dan promosi produk serta lain-lain kegiatan sesuai kebutuhan
- c. Pengembangan Laboratorium Desa/ Kelurahan Model Binaan Gerdu-Taskin oleh Perguruan Tinggi/ LSM, yang meliputi kegiatan antara lain:
- Pemetaan kondisi awal Desa/ Kelurahan
  - Pengkajian potensi ekonomi unggulan Desa/ Kelurahan
  - Perumusan model pengelolaan dan pengembangan
  - Perencanaan Kegiatan
  - Implementasi Kegiatan
  - Pengkajian, monitoring, evaluasi dan refleksi implementasi model pengelolaan dan pengembangan
  - Publikasi model dan pengembangan wahana pembelajaran (*learning site*)
- d. Pengembangan sinergi peran Dinas/ Instansi Propinsi dan Kabupaten/ Kota serta *stakeholders* lainnya dalam memfasilitasi Desa/ Kelurahan Model Binaan Gerdu-Taskin
- e. Manajemen Program  
Dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme program yang telah ditetapkan yang menjamin terwujudnya prinsip-prinsip pengelolaan Desa/ Kelurahan Model Binaan Gerdu –Taskin.
- f. Pendampingan  
Dilaksanakan oleh PT/LSM secara purna waktu dalam bentuk:
- Fasilitasi proses kegiatan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan
  - Fasilitasi pengembangan Potensi Ekonomi Desa/ Kelurahan dan pengembangan model pemberdayaan RTM dengan mendayagunakan sumber daya yang ada

- Peran mediasi untuk membangun kemitraan terutama dengan Dinas/ Instansi dan *stakeholders* lainnya
- Memfasilitasi penguatan, perluasan akses dan jaringan kerja terutama bagi UPK dan Pokmas UEP.

### 2.3. Penetapan Lokasi Program

#### 1. Lokasi Kabupaten/ Kota ditetapkan berdasarkan kriteria:

- a. Komitmen dan realisasi dana *sharing* program Gerdu-Taskin
- b. Kinerja Sektap program Gerdu-Taskin Kabupaten/ Kota

#### 2. Lokasi Desa/ Kelurahan ditetapkan berdasarkan kriteria:

- a. Desa/ Kelurahan kategori merah yang belum mendapatkan program Gerdu-Taskin Reguler. Jika Desa/ Kelurahan berkategori merah sudah tergarap semua, maka dapat diprioritaskan yang berkategori kuning.
- b. Desa/ Kelurahan memiliki potensi dan modal sosial lokal yang bisa dikembangkan menjadi unggulan daerah sesuai dengan karakteristik dan tipologinya.

#### 3. Perguruan Tinggi/ Lembaga Swadaya Masyarakat (PT/ LSM)

- a. Memiliki pengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat yang dibuktikan dengan profil lembaga
- b. Perguruan Tinggi yang memiliki fakultas yang mampu mendukung kegiatan program (antara lain: Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Fakultas Pertanian, Fakultas Peternakan) dengan kategori akreditasi baik, akan lebih diutamakan untuk dipilih sebagai Perguruan Tinggi Pendamping

### 2.4. Sasaran Program

- a. RTM berdasarkan data hasil PKIB BPS Jawa Timur, pada masing-masing Desa/ Kelurahan lokasi setelah dilaksanakan klarifikasi secara partisipatif

- b. Usaha Ekonomi Produktif khususnya yang berkaitan dengan pengembangan potensi ekonomi unggulan Desa/ Kelurahan
- c. Lembaga Sosial Ekonomi Desa/ Kelurahan, terutama yang memiliki kaitan dengan pengembangan potensi ekonomi unggulan Desa/ Kelurahan

Proses Penetapan Desa/ Kelurahan lokasi ditentukan sebagai berikut:

- a. Masing-masing Kabupaten lokasi mengajukan 2 (dua) nominator lokasi Desa/ Kelurahan binaan sebagaimana kriteria di atas
- b. Desa/ Kelurahan lokasi definitif ditentukan berdasarkan pembahasan oleh Tim Propinsi dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Untuk tahun Anggaran 2007 Kabupaten/Kota yang terpilih adalah ,sbb :

|     |                      |             |                   |
|-----|----------------------|-------------|-------------------|
| 1.  | Kota Madiun          | Taman       | Kelurahan Josenan |
| 2.  | Kabupaten Pacitan    | Nawangan    | Desa Ngromo       |
| 3.  | Kabupaten Malang     | Jabung      | Desa Taji         |
| 4.  | Kabupaten Mojokerto  | Gondang     | Desa Kemasentani  |
| 5.  | Kabupaten Banyuwangi | Singojuhur  | Desa Gambor       |
| 6.  | Kabupaten Lumajang   | Pronojiwo   | Desa Pronojiwo    |
| 7.  | Kabupaten Kediri     | Kayenkidul  | Desa Jambu        |
| 8.  | Kabupaten Sidoarjo   | Balongsari  | Desa Penambangan  |
| 9.  | Kabupaten Madiun     | Balerejo    | Desa Kebonagung   |
| 10. | Kabupaten Jember     | Bangsalsari | Desa Gambirono    |

## 2.5. Pembiayaan

1. Pembiayaan program bersumber dari APBD Propinsi Jawa Timur yang antara lain dipergunakan untuk:
  - a. Dana kegiatan sebesar Rp 153.000.000,- (100%) digunakan untuk :

- Kegiatan PM (10%)
  - Kegiatan PU (90%)
    - = minimal 50% untuk Usaha Simpan Pinjam (USP)
    - = maksimal 50% untuk usaha Kemitraan
- b. Biaya Operasional Program (BOP) sebesar Rp 17.000.000,- (10%)
- Untuk Sektap Kabupaten/ Kota 60% dengan rincian:
    - = 15% untuk Operasional Tenaga Fasilitas Kecamatan (TFK)
    - = 85% untuk Operasional Tenaga Sektap Kabupaten/ Kota
  - Untuk UPK 40% yang digunakan untuk :
    - = Operasional pengelola kegiatan sebesar 80%
    - = Insentif pengurus UPK 20%
- c. Dana *Sharing* Kabupaten/ Kota (3/7 dari dana Propinsi)
- Untuk pemberdayaan lingkungan sebesar 90% (PL)
  - Untuk Dana Operasional Kegiatan (DOK) sebesar 10%
    - = Sektap Kabupaten/ Kota 50%
    - = TKPK Kabupaten/ Kota 50%
2. Dana dari Dinas/ Instansi Propinsi Jawa Timur, yakni dana yang dialokasikan oleh Dinas/ Instansi terkait untuk mendukung Program Pengembangan Desa/ Kelurahan Model Binaan.
3. Dana APBD Kabupaten lokasi, yakni dana yang akan dialokasikan oleh Dinas/ Instansi terkait untuk mendukung program kemitraan dalam Pengembangan Desa/ Kelurahan Model Binaan
4. Dana PT/ LSM Pendamping, merupakan dana atau kegiatan sebagai bentuk komitmen PT/ LSM pendamping untuk mendukung fasilitasi penguatan UPK dan pengembangan potensi ekonomi Desa/ Kelurahan model binaan.
5. Dana Partisipasi Masyarakat, merupakan dana kegiatan atau fasilitas lain baik bersumberr dari masyarakat dan Pemerintah Desa/ Kelurahan maupun dari Pihak lain untuk mendukung program.

## 2.6. Organisasi Pengelola Program

Pengelola Program Pengembangan Desa/ Kelurahan Model Binaan Gerdu-Taskin Kerjasama dengan PT/ LSM, dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). Propinsi dan Kabupaten/kota

### A. Organisasi Pengelola Propinsi

#### 1. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Propinsi

TKPK Propinsi adalah penanggung jawab seluruh kegiatan program penanggulangan kemiskinan di Propinsi Jawa Timur Nomor: 188/63/KPTS/013/2006 tentang TKPK Propinsi Jawa Timur. Secara fungsional TKPK Propinsi dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pengembangan Propinsi Jawa Timur.

TKPK-Propinsi secara fungsional dikoordinasikan oleh Bappeprop. Dalam pelaksanaan program Pengembangan Desa/ Kelurahan Model Binaan Gerdu-Taskin, TKPK Propinsi mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi:

- a. Menyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi
  - b. Menyiapkan data terkini tentang jumlah penduduk miskin di Jawa Timur
  - c. Membahas rencana kegiatan pengelolaan program Gerdu-Taskin beserta dukungan operasionalnya
  - d. Mengkoordinasikan peran dinas/ instansi dan *stakeholders* lainnya dalam mendukung program
  - e. Membahas usulan dan menetapkan jumlah dana program
  - f. Melakukan evaluasi pelaksanaan program
  - g. Melaporkan pelaksanaan program kepada Gubernur secara berkala
- #### 2. Sekertaris Tetap Propinsi (Sektap Propinsi)

Sekretaris Tetap Propinsi adalah penanggung jawab operasional Program Pengembangan Desa/ Kelurahan Model Binaan Gerdu-Taskin yang diketuai oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Timur,

yang telah dibentuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua TKPK Propinsi Jawa Timur Nomor: 460/572/031/2005 tanggal 30 Maret 2005. Dalam kaitannya dengan Program Pengembangan Desa/ Kelurahan Model Binaan Gerdu-Taskin kerjasama dengan PT/ LSM, tugas dan tanggung jawab Sektap Propinsi meliputi:

- a. Memfasilitasi proses penetapan lokasi program
  - b. Melaksanakan seleksi dan penetapan PT/ LSM Pendamping
  - c. Melaksanakan orientasi PT/ LSM Pendamping
  - d. Menyelenggarakan sosialisasi program Desa Model Binaan Gerdu-Taskin
  - e. Menyelenggarakan rakor Dinas/ Instansi Propinsi dalam rangka memfasilitasi pengembangan Desa/ Kelurahan Model Binaan
  - f. Menyelenggarakan lokakarya pembahasan proposal kegiatan Desa/ Kelurahan Model Binaan
  - g. Melaksanakan orientasi bagi pengelola program Desa/ Kelurahan Model Binaan
  - h. Mengkoordinasikan proses pencairan dana program di Propinsi
  - i. Melakukan pemantauan dan mengkoordinasikan pelaporan berkala
  - j. Melaporkan pelaksanaan program pengembangan Desa/ Kelurahan Model Binaan Gerdu- Taskin kepada TKPK
  - k. Melaksanakan tugas-tugas teknis yang lain dalam rangka pengelolaan kegiatan dan pengembangan Desa/ Kelurahan Model Binaan.
3. Tim Asistensi

Tim Asistensi adalah Tenaga Pendamping Sektap Propinsi dalam pengelolaan Program Pengembangan Desa/ Kelurahan Model Binaan Gerdu-Taskin kerjasama dengan PT/ LSM.

Tim Asistensi berasal dari tenaga ahli yang berpengalaman di bidang pengembangan masyarakat dari unsur PT/ LSM, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Sektap Propinsi.

Tugas dan tanggung jawab Tim Asistensi:

- a. Mendampingi Sekdap Propinsi dalam pengelolaan Program Pengembangan Desa/ Kelurahan Model Binaan Gerdu-Taskin
- b. Membantu perumusan kebijakan Desa/ Kelurahan Model Binaan, terutama dalam bentuk Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional
- c. Bersama Sekdap Propinsi, melaksanakan pemetaan awal potensi ekonomi unggulan Desa/ Kelurahan Model Binaan
- d. Member layanan konsultasi bagi PT/ LSM Pendamping dalam pelaksanaan pendampingan Desa/ Kelurahan
- e. Memfasilitasi Orientasi Pengelola Program
- f. Membantu monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program

## **B. Organisasi Pengelola Kabupaten/ Kota**

### **1. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Kota**

TKPK Kabupaten/ Kota adalah penanggung jawab seluruh kegiatan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten/ Kota, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/ Walikota.

TKPK Kabupaten/ Kota secara fungsional dikoordinasikan oleh Bappekab/ Bappeko. Dalam pelaksanaan program pengembangan Desa/ Kelurahan Model Binaan Gerdu-Taskin TKPK Kabupaten/ Kota mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Menyusun strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten/ Kota masing-masing dengan mempertimbangkan kebijakan Pemerintah Propinsi.
- b. Menyusun kebijakan lokal yang mendukung pelaksanaan Program Pengembangan Desa/ Kelurahan Model Binaan Gerdu-Taskin Kabupaten/ Kota dengan tetap mengacu pada Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional Propinsi
- c. Menetapkan Rencana kegiatan Pengelolaan Program beserta dukungan operasionalnya



- d. Menetapkan dana penyertaan (*sharing*) dan mendorong realisasi dana program Dinas/ Instansi dari APBD Kabupaten/ Kota
- e. Melakukan evaluasi pelaksanaan program
- f. Mengkoordinasikan peran Dinas, Instansi, Lembaga maupun *stakeholders* lainnya dalam pelaksanaan program.
- g. Melaporkan pelaksanaan program kepada Bupati/ Walikota maupun kepada TKPK Propinsi secara berkala maupun incidental.

## 2. Sekertariat Tetap Kabupaten/ Kota (Sektap Kab./ Kota)

Sekretarian Tetap (Sektap) Kabupaten/ Kota adalah penanggung jawab operasional Program Pengembangan Desa/ Kelurahan Model Binaan Gerdu-Taskin kerjasama dengan PT/ LSM di Kabupaten/ Kota, diketuai oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pemberdayaan masyarakat pada masing-masing Kabupaten/ Kota lokasi program. Sektap Kabupaten/ Kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua TKPK Kabupaten/ Kota.

Adapun tugas dan tanggung jawab Sektap Kabupaten/ Kota meliputi:

- a. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan operasional seluruh kegiatan program di Kabupaten/ Kota
- b. Menyelenggarakan sosialisasi Kabupaten/ Kota
- c. Mengajukan usulan lokasi program kepada Sektap Propinsi
- d. Menyelenggarakan rakor Dinas/ Instansi dalam rangka fasilitasi pengembangan Desa/ Kelurahan model binaan Gerdu-Taskin
- e. Mendukung kegiatan Pendampingan dan Pengembangan Laboratorium Desa/ Kelurahan Model Binaan oleh PT/ LSM
- f. Memfasilitasi Lokakarya Penyusunan Proposal
- g. Memantau pelaksanaan kegiatan Desa/ Kelurahan model binaan
- h. Memantau pelaksanaan pertanggung jawaban UPK.
- i. Menyelenggarakan Lokakarya Pertanggung jawaban dan Pelestarian

- j. Melaporkan pelaksanaan program secara berkala kepada Sektap Propinsi

### 3. Tenaga Fasilitasi Kecamatan (TFK)

TFK adalah bagian dari Sektap Kabupaten/ Kota yang bertugas memberikan bimbingan, monitoring dan bantuan teknis yang diperlukan guna mendukung kelancaran pelaksanaan program.

TFK berada di bawah tanggung jawab Camat, yang dalam pelaksanaannya dapat menugaskan Kasi yang membidangi pemberdayaan masyarakat, dibantu oleh Dinas/ Instansi sektoral terkait. Dukungan operasional TFK berasal dari BOP dan DOK atau sumber-sumber lain berdasarkan kebijakan TKPK dan Sektap Kabupaten/ Kota.

Tugas dan tanggung jawab TFK meliputi:

- a. Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi program di Desa/ kelurahan bersama dengan PT/ LSM Pendamping
- b. Bersama PT/ LSM Pendamping memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi lainnya sesuai kebutuhan masyarakat Desa/ Kelurahan
- c. Membantu Sektap Kabupaten/ Kota dalam monitoring pelaksanaan dan perkembangan program
- d. Melaporkan kegiatan sosialisasi, fasilitasi, monitoring yang telah dilaksanakan kepada Sektap Kabupaten/ Kota secara berkala.

### C. Organisasi Pengelola di Desa/ Kelurahan

#### 1. Unit Pengelola Keuangan (UPK)

UPK adalah pengelola program di Desa/ Kelurahan. Pengurus UPK dibentuk melalui musyawarah pembentukan UPK dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa/ Kelurahan. Apabila di Desa/ Kelurahan lokasi sudah terdapat lembaga ekonomi milik Pemerintah Desa/ Kelurahan sejenis UPK, maka sepanjang lembaga tersebut fungsional, tidak bermasalah dan disepakati dalam musyawarah, maka dapat difungsikan sebagai UPK.

Struktur organisasi UPK terdiri dari unsur Pengurus dan unsur Pengawas. Unsur Pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari seorang ketua, seorang sekertaris dan seorang bendahara. Sedangkan unsur pengawas terdiri dari Kepala Desa/ Kelurahan dan 2 (dua) orang tokoh masyarakat yang dipilih melalui musyawarah Desa/ Kelurahan.

Unsur Pengurus UPK dipilih berdasarkan kriteria:

- a. Warga Desa/ Kelurahan setempat yang dikenal jujur, kreatif dan bertanggung jawab
  - b. Mempunyai kemampuan dalam pengelolaan keuangan dan atau berpendidikan minimal SLTA/ sederajat
  - c. Berusia minimal 20 tahun dan maksimal 50 tahun
  - d. Bukan aparat Desa/ Kelurahan maupun anggota BPD
  - e. Bukan anak/ isteri Kepala Desa/ Kelurahan
  - f. Dapat berasal dari kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)
2. Tugas dan tanggung jawab UPK meliputi:
- a. Melakukan klarifikasi dan klasifikasi RTM (Rumah Tangga Miskin)
  - b. Bersama PT/ LSM Pendamping melaksanakan pemetaan kondisi awal Desa/ Kelurahan dan pengkajian potensi ekonomi unggulan Desa/ Kelurahan
  - c. Berdasarkan musdes/ muskel, menetapkan skala prioritas kebutuhan Pemberdayaan RTM dan Pengembangan Potensi Ekonomi Unggulan Desa/ Kelurahan
  - d. Bersama dengan PT/ LSM Pendamping menyusun usulan Desa/ Kelurahan yang akan dibahas lebih lanjut dalam forum lokakarya Penyusunan Proposal oleh Sektap Kabupaten/ Kota
  - e. Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah Desa/ Kelurahan
  - f. Memfasilitasi pembentukan Pokmas UEP dan melayani permohonan pinjaman

- g. Melakukan analisis kelayakan usaha dan peminjam serta menetapkan persetujuan pinjaman yang diusulkan oleh Pokmas UEP
- h. Menyusun dan menetapkan berbagai aturan, terutama berkaitan dengan Usulan Simpan Pinjam dan kegiatan lainnya
- i. Melakukan perjanjian dengan Pokmas UEP maupun pihak lain dalam bentuk akad
- j. Mengembangkan kamitraan usaha untuk pengembangan potensi ekonomi unggulan Desa/ Kelurahan
- k. Membuka rekening atas nama UPK
- l. Bertanggung jawab terhadap pengembalian dana pinjaman dari Pokmas UEP sesuai akad pinjaman
- m. Memfasilitasi pembentukan Tim Pelaksana (Tim-Lak) Kegiatan Pemberdayaan Manusia dan Pemberdayaan Lingkungan melalui musyawarah Desa/ Kelurahan
- n. Membukukan secara teratur, tertib dan rapi semua transaksi UPK sesuai kaidah pencatatan yang diterima umum
- o. Memfasilitasi pengembangan kelompok usaha produktif/ Pokmas UEP
- p. Bertanggung jawab terhadap keberlanjutan dan pelestarian program, meliputi kegiatan Pemberdayaan Usaha, Pemberdayaan Manusia maupun Pemberdayaan Lingkungan.
- q. Mendokumentasikan kegiatan Tridaya
- r. Merintis pelembagaan UPK sebagai BUMDes dengan menyusun AD-ART sesuai kesepakatan Pemerintah Desa/ Kelurahan
- s. Melaporkan proses pelaksanaan, hasil kegiatan, dan realisasi penggunaan dana maupun perkembangan usaha kepada Pemerintah Desa/ Kelurahan dan Sektap Kabupaten/ Kota secara berkala
- t. Menjalin koordinasi secara optimal dengan PT/ LSM Pendamping maupun segenap unsur pengelola program.

## 2.6. Indikator Keberhasilan Program

Indikator keberhasilan program pengembangan Desa/ Kelurahan Model Binaan Gerdu-Taskin Kerjasama dengan PT/ LSM meliputi:

1. Perkembangan usaha dan peningkatan pendapatan RTM.
2. Peningkatan Kualitas Hidup RTM dengan tersedianya kebutuhan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan.
3. Peningkatan mutu sumber daya manusia, baik dari segi pengetahuan, sikap maupun keterampilan.
4. Peningkatan sarana/ prasarana Desa/ Kelurahan.
5. Pengembangan usaha masyarakat Desa/ Kelurahan khususnya usaha RTM anggota Pokmas UEP.
6. UPK Profesional dalam mengelola simpan pinjam/ LKM dan kemitraan usaha berbasis potensi ekonomi unggulan Desa/ Kelurahan.
7. UPK mampu meningkatkan kinerja manajemen dan kelembagaan secara optimal.
8. UPK mampu mengelola program secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.
9. Potensi lokal mampu dikembangkan melalui Kelompok Usaha Produktif atau bentuk lain.

\*\*\*

### BAB 3

#### HASIL EVALUASI PROGRAM PENGEMBANGAN DESA/ KELURAHAN MODEL BINAAN GERDU TASKIN

##### 1. Lokasi: Desa Ngromo

Kabupaten : Pacitan

Kecamatan : Nawangan

- Responden: Heny Prasetyawan (30 tahun)/ Bendahara UPK
- Keterangan Pelaksana Program:

Tim Pendamping : Nur Rachma (Univ. Muhamadiyah Ponorogo)

TFK : Bpk. Sunarso

Sektap : Bpk. Kasidi

Proses Pelaksanaan Program Pengembangan Desa/ Kelurahan Model Binaan:

##### a. Sosialisasi program

Sosialisasi program Pengembangan Desa Model Binaan Gerdu-Taskin dilaksanakan di Desa Ngromo, Kabupaten Pacitan pada Bulan Mei Tahun 2007. Sosialisasi ketika itu dihadiri oleh Kepala Desa beserta perangkat-perangkatnya, Camat, Sektap, TFK beserta pengurus UPK yang telah terpilih. Proses sosialisasi merujuk pada penggambaran/ penjelasan mengenai bagaimana tata cara pengelolaan modal usaha untuk masyarakat miskin, bagaimana membina usaha mikro kecil dan bagaimana masyarakat dapat terlibat secara langsung dalam upaya memberantas kemiskinan di desa tersebut.

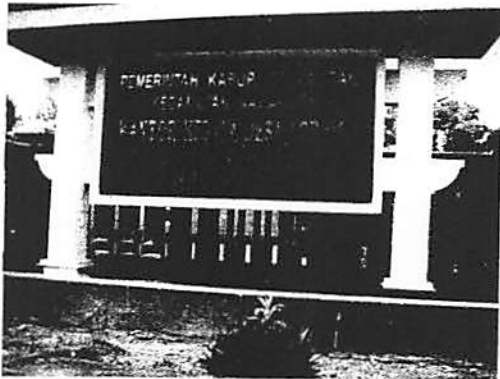
##### b. Perencanaan Program

Proses pembentukan UPK dilakukan pada Bulan Mei 2007 melalui Musyawarah Desa (Musdes) sesuai dengan pedoman umum program. UPK kemudian mulai menjalankan program sesuai dengan tupoksi yang telah diberikan meliputi klarifikasi dan klasifikasi data RTM baik yang termasuk dalam kategori R maupun B, melakukan orientasi untuk menentukan potensi unggulan Desa serta mengidentifikasi

kondisi Desa untuk penerapan usaha Pemberdayaan Manusia (PM), Pemberdayaan Usaha (PU), dan Pemberdayaan Lingkungan (PL). Penyusunan proposal kegiatan dilakukan UPK bersama dengan Pengawas yang telah ditunjuk, Tim Pendamping, beserta dengan tokoh masyarakat dan TFK.

### c. Pelaksanaan Program

Proses pelaksanaan program diawali dengan pencairan dana pada Bulan Oktober 2007. Dari hasil klarifikasi dan klasifikasi RTM yang telah dilakukan,



teridentifikasi 62 RTM-(R) dan 518 RTM-(B) di Desa Ngromo, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan. Hasil orientasi terhadap potensi ekonomi desa menetapkan produk “jahe instan” sebagai produk unggulan pada awal pelaksanaan program, tetapi karena

komoditas ini sangat rentan terhadap ‘permainan’ tengkulak, maka masyarakat beralih menjadi peternak kambing. Hingga saat evaluasi dilakukan, ternak kambing telah menjadi usaha ekonomi mikro unggulan di Desa Ngromo ini. Selain kambing, pengembangan usaha mikro juga menjangkau pembuat makanan ringan/ keripik seperti samiler, keripik pisang dan sebagainya. Sedangkan disektor pertanian, usaha yang cukup berkembang antara lain adalah petani cabe rawit, petani jagung dan ketela pohon yang merupakan bahan baku pembuatan keripik.

Total pencairan dana pada Bulan Oktober 2007 adalah sebesar Rp 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah), dengan proporsi penggunaan sebagai berikut:

1. BOP sebesar 10%
2. Pengembangan sektor riil sebesar Rp 137.000.000,- dengan pembagian: USP swakelola sebesar Rp 68.850.000,- dan usaha kemitraan (kredit kambing) sebesar Rp 68.850.000,-. Adapun bunga yang dibebankan untuk kedua model

usaha itu adalah 2% perbulan dengan intensitas pembayaran 10 kali dalam sepuluh bulan.

d. Perkembangan Program

Hasil evaluasi terhadap program ini di lapangan menemukan sejumlah kenyataan sebagai berikut:

- Sebesar Rp 15.000.000,- digunakan untuk program PM (Pemberdayaan Masyarakat). Pada tahap pertama, sebanyak 48 fakir miskin dan 14 RTM-R mendapat bantuan berupa: susu kaleng, telur, gula pasir, minyak goreng, baju untuk lanjut usia serta perlengkapan sekolah untuk anak seperti tas dan buku pelajaran untuk anak SD.
- Dalam program PU (Pemberdayaan Usaha), jumlah Pokmas pada waktu pertama kali dana PDMB Gerdu Taskin dicairkan ada sebanyak 14 Pokmas dengan 92 anggota. Jumlah ini telah mengalami perkembangan cukup pesat menjadi 63 Pokmas dengan jumlah anggota rata-rata setiap Pokmas adalah 5 orang atau dengan total anggota USP keseluruhan adalah 315 orang hingga September 2008.
- Dari jumlah tersebut, sebanyak 50 Pokmas atau sebanyak 230 orang memiliki usaha budi daya kambing, sedangkan 13 Pokmas lain menekuni usaha ekonomi produktif seperti pembuat makanan ringan, keripik, mracang dan sebagainya.
- Perkembangan modal usaha UPK juga dilaporkan mengalami kenaikan dari awalnya sebesar Rp 152.700.000,- menjadi Rp 196.699.000,- pada September 2008. Dan dari perolehan tersebut, SHU yang didapatkan selama periode tersebut adalah sebesar Rp 32.000.000,-
- Kegiatan PL (Pemberdayaan Lingkungan) terealisasi dalam bentuk pengerasan jalan desa sepanjang 8 Km. Pihak pelaksana pengerasan jalan belum teridentifikasi dengan jelas. Ini karena pihak Bina Marga tidak ada koordinasi dengan UPK dan Kades setempat. Pihak PU hanya meminta data



jalan desa, kemudian selesai. Pemerintah Desa hanya tahu bahwa jalan sudah diperbaiki.

e. Peran Sektap, TFK dan Tim Pendamping

Peran Sektap dan TFK sebenarnya diharapkan dapat terlaksana secara optimal. Tetapi mengingat jarak tempuh serta akses jalan ke Desa Ngromo ini sangat jauh dan berada di punggung bukit diperbatasan Propinsi Jawa Tengah maka kemungkinan besar kendala ini menyebabkan peran Sektap dan TFK menjadi nihil. Setiap bulan TFK hanya meminta laporan dan tidak ada proses fasilitasi dan pendampingan yang dilakukan. Para pengurus UPK merasakan tidak adanya koordinasi apalagi integrasi program di antara dinas terkait di Desa Ngromo. Semua terkesan berjalan sendiri-sendiri. UPK dan Kepala Desa merasa dilewati. Setiap dinas melaksanakan sendiri programnya, tanpa diketahui oleh UPK atau Kepala Desa. Pihak dinas yang memiliki program di Desa Ngromo hanya datang meminta data dan setelah itu pelaksanaan program dilaksanakan secara sepihak tanpa keterlibatan perangkat desa. Misalnya, program bedah rumah, pihak Kades dan UPK tidak tahu menahu dari mana sumber dananya, siapa pemilik program, berapa besar dana serta siapa pengawas program Pemberdayaan Lingkungan (PL). Pihak PU Bina Marga datang ke Desa Ngromo, langsung mengerjakan sendiri proyeknya tanpa koordinasi dengan UPK dan Kades. Peran tim pendamping juga setali tiga uang. Ketika dana program ini dicairkan, kontrak Tim Pendamping ternyata sudah berakhir, akibatnya pengurus UPK berjalan sendiri tanpa fasilitasi dan arahan dari *stakeholder* yang kompeten.

f. Usulan Pengurus UPK dan sasaran program (Pokmas, kemitraan, Kades, perangkat desa, masyarakat terkait)

Hasil wawancara dengan sejumlah Pokmas dan anggotanya, mengusulkan agar jumlah dana pinjaman bergulir ini ditambah besarnya sehingga dengan modal yang lebih besar, *profit margin* yang diperoleh juga lumayan besar, sehingga akan

terjadi percepatan dalam akumulasi modal maupun pengembangan usaha, yang akan menyebabkan upaya pengentasan kemiskinan menjadi lebih cepat dan lebih merata.

## 2. Lokasi: Desa Gabor

Kabupaten : Banyuwangi

Kecamatan : Singojuruh

- Responden : Ahmadi (37 tahun)/ Ketua UPK

- Keterangan Pelaksana Program:

Tim Pendamping : Erika (Univ. 17 Agustus Banyuwangi)

TFK : H. Nur Syamsi

Ketua UPK : Ahmadi

Sekretaris UPK : Sri Wahyuni

Bendahara UPK : Sucipto

Pengawas 1 : mantan Kepala Desa

Pengawas 2 : Ahmad Suprijadi

Pengawas 3 : H. Ahmad Fauzan

### Proses Pelaksanaan Program Pengembangan Desa/ Kelurahan Model Binaan:

#### a. Sosialisasi program

Sosialisasi program Pengembangan Desa Model Binaan Gerdu Taskin dilaksanakan pada Bulan Februari 2007 bertempat di pendopo Desa Gabor, Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi tepatnya sebelum kepengurusan UPK terbentuk. Kepengurusan UPK baru terbentuk pada Bulan April 2007 melalui Musyawarah Desa (MusDes) di kantor kelurahan Desa Gabor dan dilanjutkan dengan sosialisasi program Pengembangan Desa/ Kelurahan Model Binaan Gerdu-Taskin. Adapun beberapa pejabat desa yang hadir adalah Sektap lama, (mantan Kepala Desa yang pada saat survey; sudah lengser). Catatan: telah terjadi pergantian Kades selama periode pelaksanaan Program ini), Tim Pendamping dari UNTAG Banyuwangi, serta TFK.

**b. Perencanaan program**

Setelah kepengurusan UPK terbentuk, perencanaan kegiatan dimulai dengan melakukan klarifikasi dan klasifikasi data Rumah Tangga Miskin (RTM) berdasar kategori rentan (R) dan berpotensi (B). Sesuai dengan pedoman umum, kegiatan selanjutnya adalah melakukan identifikasi untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (PM) dan Pemberdayaan Lingkungan (PL). Semua proses di atas dilakukan pada masa kepengurusan Kepala Desa yang lama yang kini menjadi pengawas.

Selain itu, UPK juga telah berhasil menyusun proposal kegiatan, penyusunan anggaran dan pembentukan Pokmas-Pokmas. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan proposal kegiatan adalah Kepala Desa lama, Badan Pertimbangan Desa (BPD), Tim Pendamping, Tokoh Masyarakat beserta Pengurus UPK. Setelah melalui pembahasan, selanjutnya proposal yang sudah selesai disusun diajukan pada awal Bulan Mei 2007. Pada pengajuan pertama, proposal ditolak dan baru diterima pada pengajuan yang kedua. Pada masa pelaksanaan program, terjadi pergantian pengurus desa yaitu Kepala Desa yakni pada September 2007. Secara kelembagaan, pergantian kepemimpinan desa sebenarnya tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan program, karena UPK berada di luar struktur dan garis komando kepengurusan desa.

**c. Pelaksanaan program**

Pencairan dana program Pengembangan Desa Model Binaan Gerdu-Taskin pertama kali dilaksanakan pada Bulan September 2007 sebesar Rp 170.000.000,-. Rincian penggunaan dana adalah sebagai berikut:

1. BOP sebesar 10%
2. Pemberdayaan Masyarakat (PM) sebesar Rp 15.300.000,-
3. Pemberdayaan Usaha (PU) sebesar Rp 137.700.000,-

Dana *sharing* yang berasal dari Pemerintah Kabupaten sebesar Rp 50.000.000,- digunakan untuk program Pemberdayaan lingkungan (PL) dalam bentuk pembangunan *showroom* untuk menampung produk usaha pokmas (produk bordir berupa berbagai macam pakaian muslim – pesanan Pengusaha asal Denpasar-Bali).

Semenjak awal pencairan dana, tercatat ada 19 kelompok masyarakat (Pokmas) yang telah ditetapkan. Dana yang diserap oleh 19 Pokmas ini seluruhnya adalah Rp 95.250.000. Sisanya sebesar Rp 40.000.000,- untuk 2 (dua) unit Mitra Usaha, masing-masing menerima sebanyak Rp 20.000.000,- lainnya untuk unit usaha Pemasaran Produk Bordir yang diproduksi Pokmas. Untuk semua jasa ini UPK memungut bunga pinjaman sebesar 2% untuk Mitra Usaha dan 1,5% untuk Pokmas.

d. Perkembangan program

Dari hasil evaluasi program dan pengamatan di lapangan ditemukan sejumlah fakta sebagai berikut:

**Peran UPK dan Pokmas**

1. Dari 19 Pokmas yang menerima dana bantuan bergulir dari Program Pengembangan Desa Model Binaan Gerdu-Taskin pertama kali di Desa Gabor tercatat 96 orang anggota Pokmas yang memperoleh pinjaman. Besar pinjaman untuk setiap anggota Pokmas ternyata tidak sama. Hal ini tergantung kepada niat baik Ketua Pokmas dan kedekatan dengan Ketua Pokmas, dan bukan berdasarkan skala Usaha anggota Pokmas.
2. Sampai dengan posisi akhir Bulan Oktober 2008, jumlah 19 Pokmas yang terdiri dari para pengepul tersebut tidak bertambah. Demikian juga jumlah anggota pokmas tetap tidak bertambah sampai dengan akhir Bulan Oktober 2008, yaitu 96 orang.
3. Pengembalian dana pinjaman bergulir di antara anggota-anggota Pokmas sangat sulit (macet) karena adanya anggapan yang sengaja disebarkan oleh kelompok tertentu di desa ini, bahwa dana pinjaman tersebut merupakan dana hibah dari Pemerintah Pusat, seperti halnya BLT atau bantuan IDT yang tidak perlu dikembalikan.
4. Jumlah anggota pokmas yang menunggak angsuran pengembalian dana pinjaman tercatat sebanyak 49 orang atau sekitar 52%.
5. Pengurus UPK merasa sangat kesulitan untuk menyadarkan para anggota Pokmas, bahwa dana pinjaman itu bukan hibah melainkan harus dikembalikan

untuk digulirkan kembali kepada RTM yang lain. Sampai laporan ini disusun, tidak diketahui pasti berapa jumlah dana yang beredar dan berapa jumlah dana yang ada di kas UPK. Pengurus UPK juga tidak dapat menunjukkan Laporan Keuangan Terakhir.

6. Kondisi ini ditambah lagi oleh stigma Kepala desa yang baru, bahwa Program Pengembangan Desa Model Binaan Gerdu-Taskin 2007 dianggap sebagai “warisan” program Kades yang lama yang telah lengser. Akibat stigma semacam ini, Kades yang baru enggan memberikan dukungan kepada UPK. Bahkan ada tanda-tanda kuat jika Kepala Desa yang baru (Ahmad Syahul) berjalan sendiri dalam menangani setiap program Desa. Menurut pengakuan pengurus UPK, dana-dana pengembangan dari Dinas lain tidak lagi disalurkan melalui UPK, tetapi dikelola sendiri oleh Kepala Desa yang baru. Informasi ini disampaikan secara sembunyi-sembunyi oleh Ketua UPK, saat Kades ke luar ruangan atau menerima tamu. Dalam konflik kepengurusan semacam ini, Tim peneliti kesulitan melakukan konfirmasi data, untuk menemukan kebenaran.
- e. Peran Sektap, TFK dan Pendamping
  - Untuk program Pemberdayaan Manusia (PM) peran Tim Pendamping cukup aktif, terbukti lebih dari 3 kali memberikan bimbingan pemasaran kepada Pokmas (ketua Pokmas juga bertindak sebagai Pengepul produk bordir dari anggota Pokmas).
  - Tim pendamping juga sudah memberikan Pelatihan Kewirausahaan dan pemasaran melalui media internet, serta administrasi keuangan (pembukuan) sederhana. Tetapi karena sebagian besar anggota Pokmas tidak mengenal budaya tulis, maka hasil pelatihan internet tidak ada artinya. Pada saat dilatih, hampir semua peserta mengerti tetapi setelah selesai pelatihan, tidak dipraktekkan karena dianggap merepotkan (ribet dan rumit) serta tidak sesuai dengan kebiasaan mereka yang turun temurun sebagai pengrajin border tradisional.

- Meskipun demikian, peran Tim Pendamping yang secara geografis relatif dekat jaraknya (dari Kota Banyuwangi ke Kecamatan Singojuruh sekitar 31 Km) nampak cukup intensif. Ini dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan KKN (Kuliah Kerja Nyata) yang dilakukan tim pendamping Universitas 17 Agustus Banyuwangi untuk menjadikan Desa Gabor sebagai Laboratorium Sosial seperti yang diharapkan.
- Peran TFK apalagi Sektap, diakui nihil oleh pengurus UPK dan juga Kepala Desa yang baru. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa kali pergantian SDM yang duduk di dalam struktur organisasi Program Pengembangan Desa Model Binaan Gerdu-Taskin di tingkat Kabupaten dan Kecamatan. Konsekuensi pergantian orang (Pejabat) seperti ini menyebabkan pejabat baru tidak mengerti program, sementara pejabat lama tidak menyerahkan “memori akhir jabatan” maupun rincian TUPOKSI dalam program ini, sehingga dalam ketidak pahaman ini, pejabat baru kurang memberikan perhatian kepada Program Desa Model.

f. Usulan Pengurus UPK

Kedepan yang perlu digarap lebih serius adalah persoalan SDM (PM). Artinya, pemberdayaan SDM di Desa Gabor ini dari buruh pengrajin bordir menjadi pengusaha. Selama ini, RTM (anggota Pokmas) di Desa Gabor hanya menjadi buruh pengrajin bordir, sedangkan yang menentukan bahan baku, jenis produk mulai dari A sampai Z adalah pengusaha dari Bali melalui “tangan kanannya” yakni para pengepul di desa ini. Para pengrajin hanya menyediakan bahan penolong berupa benang bordir, benang obras, dan mesin jahit yang dibeli dari hasil pinjaman kepada Pokmas, serta tenaga kerja.

Perlu ada koordinasi yang lebih baik di antara Ketua Pokmas agar distribusi “order” pekerjaan dari pengepul menjadi lebih merata. Selama ini yang terjadi adalah persaingan yang tidak sehat diantara buruh (pengrajin)

bordir. Praktik saling mematikan usaha diantara para buruh pengrajin bordir ini harus dihindari, karena akan sangat menghambat tujuan program Pengentasan Kemiskinan di desa ini. Selama ini para buruh pengrajin bordir yang dekat dengan pengepul selalu memperoleh order lebih besar dari yang lain bahkan ada yang tidak mendapat bagian sama sekali. Kondisi ini pula yang menyebabkan demikian banyak anggota Pokmas yang angsurannya macet di desa ini, karena tidak memperoleh "order" dari Ketua Pokmas yang pilih kasih.

### 3. Lokasi:Desa Gambirono

Kabupaten : Jember

Kecamatan : Bangsalsari

- Responden : Pengurus UPK
- Keterangan Pelaksana Program:

Tim Pendamping : Faisol (Univ. Islam Jember)

TFK : Bpk. Syairi

Ketua UPK : Imam Subejo, S.E

Sekretaris UPK : Habibah

Bendahara UPK : Vita Dewi

#### Proses Pelaksanaan Program Pengembangan Desa/ Kelurahan Model Binaan:

##### a. Sosialisasi Program

Sosialisasi program Pengembangan Desa Model Binaan Gerdu-Taskin dilaksanakan pada Bulan Maret 2007 bertempat di Bapemas Propinsi Jawa Timur. Intisari program pada dasarnya adalah mengurangi jumlah RTM dan meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Kemudian sekitar Bulan April-Mei 2007 dibentuk UPK berdasarkan Musyawarah Desa (MusDes). Setelah UPK terbentuk, dilakukan orientasi sebagai dasar penyusunan program. Rapat penyusunan program

dilaksanakan berkali-kali di Balai Desa Gambirono untuk menentukan Potensi Ekonomi unggulan desa yang akan diusulkan dalam Musdes.

b. Perencanaan Program

Sebelumnya memang sudah ada Garis-Garis Besar program menyangkut Pemberdayaan Manusia (PM), Pemberdayaan Usaha (PU) dan Pemberdayaan Lingkungan (PL). Perencanaan dan operasional di tingkat desa dilaksanakan oleh UPK hasil Musdes. Dasar penyusunan rencana operasional diambil dari profil desa. Berdasarkan data dari profil desa tahun 2006 selanjutnya dilakukan klarifikasi dan klasifikasi Rumah Tangga Miskin (RTM) untuk menentukan dan memisahkan antara kategori RTM rentan dan berpotensi. Rapat-rapat untuk menyusun program dilaksanakan berkali-kali yang dihadiri oleh seluruh pengurus UPK, Perangkat Desa selaku tim pengawas, tokoh masyarakat dan TFK serta Bapemas Kabupaten Jember sendiri.

Berdasarkan hasil klarifikasi tersebut diperoleh data Rumah Tangga Miskin (RTM) sebanyak 243 RTM-R atau kategori rentan, dan 341 RTM-B atau kategori berpotensi. Sementara dari hasil pemetaan dan orientasi terhadap potensi ekonomi unggulan desa, diputuskan bahwa program Pengembangan Usaha (PU) produktif di Desa Gambirono adalah:

1. Budidaya ikan air tawar terutama gurami, dan jenis usaha lainnya ;
2. Kerajinan anyaman bambu untuk kemasan tape singkong yang di butuh kan Pengrajin Tape setiap hari.



(Salah satu anggota Pokmas)



c. Pelaksanaan Program

Seperti di Kabupaten lain di Jawa Timur, dana bergulir program Pengembangan Desa Model Binaan Gerdu-Taskin 2007 di Desa Gambirono dicairkan pada Bulan September 2007, setelah semua persyaratan pencairan dana dapat dipenuhi oleh UPK. Jumlah dana yang dicairkan sebesar Rp 170.000.000,- melalui rekening UPK yang khusus diterbitkan untuk program ini. Jumlah dana sebesar itu meliputi: dana pembiayaan kegiatan UPK dan dana BOP UPK. Adapun rinciannya sebagai berikut:

- a. BOP sebesar 10%
- b. Pemberdayaan Masyarakat (PM) sebesar Rp 15.300.000,-
- c. Pemberdayaan Usaha (PU) sebesar Rp 137.700.000,-
- d. Perkembangan Program

Pada awal pelaksanaan program, yaitu setelah dana dicairkan melalui rekening UPK, jumlah Pokmas yang memperoleh pinjaman ada sebanyak 35 kelompok dengan total anggota Pokmas sebanyak 175 orang. Selama satu tahun program ini berjalan, telah terjadi peningkatan baik untuk jumlah Pokmas, anggota Pokmas maupun perkembangan jumlah dana pinjaman bergulir. Menurut laporan UPK tanggal 30 September 2008 (buku 6), perkembangan jumlah Pokmas sudah mencapai tiga kali lipat, yaitu dari 35 Pokmas pada periode awal, menjadi 93 Pokmas. Jumlah anggotapun berkembang, dari yang awalnya sebanyak 175 orang menjadi 341 orang anggota. Perputaran dana pinjaman bergulir menurut laporan keuangan UPK per 30 September 2008 (Buku 6) sangat lancar meskipun pada awal program pernah terjadi tunggakan angsuran sebesar 10%.

Secara garis besar, perkembangan modal UPK lancar, dari awal sebesar Rp 137.700.000,- sampai dengan 30 September 2008 berkembang menjadi Rp 183.228.400,-. Prestasi yang dapat ditiru dari UPK Rahayu Desa Gambirono ini adalah sisa hasil usaha (SHU) tahun berjalan tercatat sebesar Rp 16.288.400,-.

Meskipun data capaian program tersebut di atas telah menunjukkan adanya peningkatan yang luar biasa, namun untuk menyatakan bahwa telah terjadi

pengurangan RTM di desa ini nampaknya masih perlu berhati-hati. Secara implisit memang peningkatan jumlah anggota Pokmas yang sukses dapat dimaknai sebagai pengurangan RTM. Tetapi ukuran yang lebih relevan dan lebih valid harus dapat membuktikan hal ini.

Meski demikian, dampak paling konkrit dari keberhasilan pelaksanaan program Pengembangan Desa Model Binaan Gerdu Taskin di desa ini adalah: peluang para rentenir dan pelepas uang lainnya di desa ini sudah berkurang sangat drastis. Bahkan menurut laporan salah satu ketua Pokmas, di desa ini sudah tidak ada lagi rentenir yang beroperasi. Diakui atau tidak rentenir dan para pelepas uang dengan bunga sangat tinggi merupakan salah satu determinan proses pemiskinan pedesaan. Hal menarik yang terungkap dari pengurus UPK adalah, jumlah dana pinjaman yang harus digulirkan saat ini masih sangat terbatas, sehingga banyak calon anggota Pokmas yang baru terpaksa antre (*waiting list*) untuk mendapatkan pinjaman. Diperkirakan dengan tambahan dana sekitar Rp 40.000.000,- lagi masalah calon anggota Pokmas yang baru akan dapat diatasi di desa ini.

e. Peran Sektap, TFK dan Pendamping

Menurut laporan pengurus UPK, peran tim pendamping yakni dari Universitas Islam Jember tidak nampak sama sekali, dan hal ini diperkirakan karena tim pendamping bukan dari disiplin ilmu ekonomi. Pengurus UPK mengaku semuanya dikerjakan sendiri termasuk menyusun pembukuan dan neraca keuangan menurut pengetahuan yang diperoleh sendiri dari hasil belajar dengan keadaan.

Peran TFK sebagai perpanjangan tangan dari Sektap di desa ini relatif besar dan intensif. Hal ini dapat dilihat dari perhatian Kepala Desa, dan Bapak Syairi (TFK) dalam mendampingi tim evaluasi program ini, mengumpulkan informasi baik melalui wawancara maupun lewat dokumen yang dimiliki oleh TFK dan UPK, bahkan membuka file di computer UPK pun dilayani.

Koordinasi dari ketiga *stakeholder* ini nampak berperan besar dalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan program meskipun belum sepenuhnya dalam

arti mampu mengembangkan desa ini menjadi sebuah desa model untuk pengentasan kemiskinan. Namun kesungguhan untuk melaksanakan Program, sudah sangat jelas nampak dan kondisi ini perlu diberikan *reward* atau apresiasi yang pantas, misalnya dalam bentuk tambahan Dana melalui UPK

f. Usulan Pengurus UPK

Beberapa harapan dan usulan yang diajukan oleh pengurus UPK "Rahayu" ini antara lain:

1. Gaji atau upah untuk pengurus tidak sebanding dengan beban pekerjaan dan tanggung jawab yang harus dijalankan.
2. Masalah penyimpanan barang anggungan dari Pokmas seperti BPKB dan sertifikat tanah memerlukan alat penyimpan seperti brankas (*safety box*) untuk menghindari resiko yang lebih besar.
3. Tuduhan korupsi yang tidak berdasar dari sekelompok masyarakat yang "nerasa berhak menjadi pengurus UPK" bahkan terror kepada anggota keluarga UPK yang sulit diatasi dan perlu dicari jalan keluarnya.

4. **Lokasi: Desa Pronojiwo**

Kabupaten : Lumajang

Kecamatan : Pronojiwo

- Responden : Pengurus UPK

- Keterangan Pelaksana Program:

Tim Pendamping : LSM Pemberdayaan Ekonomi Umat Lumajang

Pembina UPK : DPM

Ketua UPK : Yahyoto

Sekretaris UPK : Yeni Dewi

Bendahara UPK 1 : Joko

Bendahara UPK 2 : Harianto

Proses Pelaksanaan Program Pengembangan Desa/ Kelurahan Model Binaan:

a. Sosialisasi program

Sosialisasi Program Pengembangan Desa Model Binaan Gerdu-Taskin 2007 di Desa Pronojiwo tidak diketahui oleh pengurus UPK, karena baru masa pergantian pada Bulan Juni 2008 lalu. Tetapi dari laporan hasil Musdes diketahui bahwa sosialisasi program ini dilaksanakan dua kali, yaitu pertama ditingkat Propinsi Jawa Timur, dan kedua di Pendopo Kabupaten Lumajang yang dihadiri oleh Wakil Bupati, Sekdap, TFK, Camat dan Kepala desa Pronojiwo. Pengurus sebelumnya yang disahkan melalui hasil Musdes Bulan April 2007 mengundurkan diri yakni ketua dan sekretaris, karena kesibukan pekerjaan pokoknya di Surabaya, sehingga tidak dapat mengurus UPK. Pada Bulan Juni 2008, diadakan Musdes kedua untuk memilih pengurus UPK antar waktu tersebut diatas.

**b. Perencanaan Program**

Klasifikasi dan klarifikasi data RTM berdasarkan data profil desa. Hasil klasifikasi dan klarifikasi data RTM menetapkan jumlah RTM kategori R ada sebanyak 187 tersebar di 6 buah dusun, sementara RTM kategori B tercatat sebanyak 393. Berdasarkan data tersebut selanjutnya program Pemberdayaan Manusia (PM) untuk kategori RTM-R (rentan) dan kategori B (berpotensi) dibedakan baik yang menyangkut pendanaan maupun jenis program yang diberikan. Hasil orientasi terhadap potensi ekonomi unggulan desa, akhirnya ditentukan bahwa: salak pondoh dan bunga lavender. Produksi salak pondoh dapat dipanen dua kali setiap bulannya dan ini berlangsung selama musim buah. Tidak demikian halnya dengan potensi ekonomi unggulan yang kedua (bunga lavender). Dilaporkan bahwa trend permintaan terhadap jenis bunga ini menurun dalam tiga bulan terakhir.

**c. Pelaksanaan Program**

Waktu pencairan dana Program Pengembangan Desa Model Binaan Gerdu-Taskin di Desa Pronojiwo sama dengan di daerah-daerah lain yaitu pada Bulan September 2007. Besar dana untuk program ini juga sama yaitu Rp 170.000.000,-.

Rincian penggunaan dana program Pengembangan Desa Model Binaan Gerdu Taskin juga hampir sama seperti desa di kabupaten lain di Jawa Timur, yaitu:

- a. BOP sebesar 10%
- b. Pemberdayaan Manusia sebesar Rp 15.300.000,-
- c. Usaha Simpan Pinjam sebesar Rp 99.700.000,-
- d. Kemitraan sebesar Rp 38.000.000,-
- e. Total penggunaan dana seluruhnya adalah Rp 153.000.000,-

Dari dana untuk PM sebesar Rp 15.500.000,- itu digunakan untuk Rumah Tangga Miskin (RTM) kategori rentan meliputi: pemberian makanan tambahan untuk peningkatan gizi dalam bentuk susu, telur, gula dan mie instan. Untuk pendidikan anak-anak RTM-R (PAUD) diberikan bantuan dalam bentuk ayunan dan peralatan bermain lainnya, sedangkan untuk anak-anak dewasa diberikan bantuan berupa buku-buku pelajaran dan tas sekolah (SD dan SMP).

UPK Desa Pronojiwo juga memperoleh dana *sharing* dari Dinas Koperasi sebesar Rp 20.000.000,- yang disalurkan untuk Usaha Simpan Pinjam (USP) bagi 2 kelompok usaha yang masing-masing beranggotakan 10 orang yakni: kelompok pengrajin keripik keladi dan yang kedua kelompok pengusaha bunga.

#### d. Perkembangan Program

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, ditemukan kenyataan sebagai berikut:

Pada saat pertama kali dana Pengembangan Desa Model Binaan dicairkan di Desa Pronojiwo Bulan September 2007, ada 19 Pokmas yang tercatat menerima dana USP dengan jumlah anggota Pokmas sebanyak 152 orang. Laporan UPK menunjukkan bahwa selama satu tahun program berjalan (September 2008) telah terjadi perkembangan, baik untuk jumlah Pokmas maupun perkembangan jumlah modal usaha UPK Gotong Royong ini.

Perkembangan jumlah Pokmas dari 19 dengan anggota 152 orang menjadi 53 Pokmas dengan rata-rata 8 orang anggota setiap kelompok, sehingga perkembangan

jumlah anggota Pokmas menjadi sekitar 424 orang, selama satu tahun program ini berjalan.

Perkembangan jumlah modal usaha UPK juga nampak dari laporan buku 6 dan buku 7. Dari jumlah modal usaha awal UPK September 2007 sebesar Rp 154.190.000,- sampai dengan September 2008 telah berkembang menjadi Rp 184.972.000,-. Sisa Hasil Usaha (SHU) sampai dengan September 2008 tercatat sebesar Rp 8.695.000,-. Kemampuan dan kemauan mengangsur dari setiap anggota Pokmas sudah tergolong baik, meskipun dilaporkan adanya tunggakan satu sampai dua bulan, tetapi biasanya pada saat membayar, mereka melakukan angsuran dua kali lipat (sekaligus).

Seperti halnya UPK di Desa Gambirono, Kecamatan Bangsalsari, Jember, para pengurus UPK di Desa Pronojiwo, Lumajang ini juga menghadapi kenaikan permintaan jumlah modal usaha. Banyak calon anggota Pokmas yang baru harus antre untuk mendapatkan pinjaman, sementara nasabah lama menginginkan adanya peningkatan jumlah pinjaman, yang sekarang ini dinilai terlalu kecil. Menurut beberapa anggota Pokmas di desa ini, jumlah modal yang kecil menyebabkan margin keuntungan yang diperoleh juga kecil, sehingga sulit bisa berkembang dalam waktu cepat.

e. Peran Sektap, TFK, dan Pendamping

Peran tim pendamping di desa ini juga dinilai hanya efektif beberapa bulan saja. Kemungkinan besar penyebabnya adalah jarak tempuh dan akses jalan dari Kota Lumajang ke Pronojiwo menjadi kendalanya. Menurut Kepala Desa Pronojiwo, warga masyarakat desa Pronojiwo ini lebih suka pergi ke Malang untuk berbelanja daripada ke Kota Lumajang, sebagian karena akses jalan yang berliku-liku penuh resiko dan sebagian lagi karena waktu tempuh lebih lama sebagai penyebabnya. Jika ke Malang hanya perlu waktu tempuh 1jam s/d 1.20' sedangkan jika ke kota Lumajang memerlukan waktu tempuh sekitar 3 jam perjalanan dengan bus umum. Peran kedua institusi yaitu Sektap dan TFK juga dinilai sangat terbatas. Pengurus

UPK merasa bekerja sendiri selama ini dengan segala kemampuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu, kedepan peran Sektap dan TFK ini perlu dikaji ulang, agar peran sebagai fasilitator dalam program strategis semacam ini tidak sekedar pajangan, tetapi benar-benar mampu mengubah desa binaan menjadi desa model untuk Program Pengentasan Kemiskinan yang benar-benar terpadu.

#### 5. Lokasi:Desa Taji

Kabupaten : Malang

Kecamatan : Jabung

- Responden : Perangkat Desa (Ketua UPK, Kepala Desa, BPD)

- Keterangan Pelaksana Program :

Tim Pendamping : Edi Univ. Brawijaya

Sektap : Tohiron

TFK : Susilo

Ketua UPK : Sujarwo

Sekertaris : Ngastain

Bendahara UPK : Ismawati

BPD Desa : Muasih

#### Proses Pelaksanaan Program Pengembangan Desa/ Kelurahan Model Binaan:

##### a. Usaha unggulan Desa

Sebagai daerah yang berada di puncak gunung maka masyarakat Desa Taji menggantungkan mata pencaharian sehari-harinya pada sektor pertanian. Adapun beberapa sektor pertanian unggulan desa ini adalah pertanian jagung, perkebunan bawang dan perkebunan wortel. Disamping itu, karena letaknya sangat jauh dari pasar yaitu  $\pm 15$  Km menuruni gunung maka mayoritas penduduk sangat bergantung pada pengepul yang ada di desa. Kesulitan akses ternyata juga menjadi masalah mendasar bagi terjadinya kemiskinan di desa ini.

### b. Proses pelaksanaan program

Sebagai salah satu Desa sasaran program Model Binaan Gerdu Taskin, maka proses pelaksanaan dan perkembangan desa ini bisa dibilang sangat gagal karena program



ini telah berhenti total saat survey dilaksanakan. Permasalahan kurangnya komunikasi antara Kepala Desa yang baru dengan pengurus UPK menyebabkan tidak adanya koordinasi dan sinergi terhadap pelaksanaan program. Saat ini, Ketua UPK yaitu Bapak Sujarwo sama sekali tidak mengetahui perkembangan pelaksanaan

program, beliau mengaku selama ini yang mengelola dana tersebut adalah Bendahara UPK mulai dari perguliran, simpan pinjam, hingga surat menyurat dan tidak ada komunikasi lebih lanjut dengan Ketua UPK sehingga selama ini penyelenggaraan program dipegang kendali hanya oleh satu orang. Permasalahannya, bendahara UPK terkait yaitu Ismawati, diketahui tidak berada di Desa cukup lama karena sedang kuliah di Kota Malang. Tidak ada pelimpahan tanggung jawab yang dilakukan terhadap pengelolaan, pihak-pihak perangkat Desa juga tidak antisipatif dan mencari bendahara tersebut. Sehingga proses pelaksanaan menjadi *mandeg* sama sekali. Disamping itu, para anggota yang hendak membayar angsuran menjadi tidak terfasilitasi karena Ketua UPK juga tidak tahu menahu bagaimana prosesnya. Tunggakan tersebut akhirnya menjadi kemandegan program dan alokasi dana tersebut menjadi sia-sia. Pihak pendamping juga tidak aktif memecahkan persoalan ini, pihak Sektap dan TFK juga sama sekali tidak terlibat sebagai fasilitator yang aktif membantu perangkat Desa yang *struck*. Hal itu mungkin karena akses jalan menuju Desa yang memang sangat sulit disamping sangat rawan terutama pada siang saat sepi dan malam hari.

Merujuk pada Pedoman Umum pelaksanaan program, pengurus UPK haruslah yang berusia diatas 20 tahun hingga 50 tahun, Ismawati sebagai bendahara UPK Desa Taji ternyata baru berusia belasan tahun (18th) dan diberi beban tanggung jawab



begitu besar. Mungkin hal tersebut juga menjadi faktor kesemerawutan pelaksanaan program Desa Model Binaan. Hendaknya hal tersebut mampu menjadi koreksi bagi pendamping dan pihak-pihak terkait sebelum memutuskan pemilihan Pengurus UPK, sehingga program Gerdu Taskin dapat bermanfaat secara berkelanjutan.

#### 6. Lokasi:Desa Jambu

Kabupaten : Kediri

Kecamatan : Kayen Kidul

- Responden : Setiyo Widodo (46 tahun)/ Bendahara UPK beserta
- Pengurus UPK
- Keterangan Pelaksana Program :

Tim Pendamping : Supanji UNIKA

Sektap : Bpk Budi

TFK : Bpk. Samuji

Ketua UPK : Samuji

Sekretaris UPK : Maria Yuana

Bendahara UPK : Setiyo Widodo

#### Proses Pelaksanaan Program Pengembangan Desa/ Kelurahan Model Binaan:

##### a. Sosialisasi Program

Proses sosialisasi program Pengembangan Desa/ Kelurahan Model Binaan berjalan sesuai dengan ketentuan dalam pedoman umum. Sosialisasi berjalan lancar di Balai desa dengan dihadiri oleh pihak-pihak terkait seperti Sektap, TFK, Pengurus UPK, Kepala Desa dan Tokoh masyarakat.

##### b. Perencanaan Program

Proses perencanaan program juga berjalan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pedoman umum, dimana dana yang diberikan akan dibagi menjadi tiga bentuk program yaitu Pemberdayaan Manusia (PM), Pemberdayaan Lingkungan (PL) dan Pengembangan Usaha (PU). Sebelumnya, karena masing-masing pengurus

sibuk dengan pekerjaannya masing-masing yaitu sebagai petani maka UPK hanya memiliki jadwal kerja yaitu Hari Senin dan Kamis dimulai jam 16.00.

Adapun usaha-usaha ekonomi unggulan yang terdapat di Desa Jambu ini adalah dalam bidang pertanian sekaligus pemasarannya. Beberapa mata pencaharian yang banyak digeluti oleh RTM yang menjadi anggota USP maupun Kemitraan adalah pertanian, pedagang sayur mayur, industri rumah tangga, pembuat makanan ringan (emping), peternak lele, pedagang beras, bengkel atau jasa penggilingan padi pengupasan (selep).

#### c. Pelaksanaan Program

Dana program Pengembangan Desa Model Binaan di Desa Jambu, Kabupaten Kediri awalnya akan dicairkan pada Bulan Oktober namun ternyata mundur hingga tanggal 10 Bulan Desember tahun 2007 lalu. Besarnya jumlah dana yang turun di Desa Jambu ini sama dengan Desa/ Kelurahan yang lain yaitu sebesar Rp 170.000.000,- yang dibagi-bagi ke dalam:

- a. Dana BOP sebesar 10%
- b. Dana Pemberdayaan Masyarakat (PM) sebesar Rp 15.300.000,-
- c. Dana Pemberdayaan Usaha Rp 137.700.000,-

Adapun jumlah dana Pemberdayaan Usaha sebesar Rp 137.700.000,- dibagi lagi menjadi modal Usaha Simpan Pinjam (USP) sebesar Rp 96.390.000,- dan dana Usaha Kemitraan Rp 41.310.000. Untuk dana Usaha Simpan Pinjam (USP), digulirkan kepada RTM-B dengan mata pencaharian antara lain pedagang sayuran keliling, industri kecil makanan ringan (emping), peternak lele, dan sebagainya. Sedangkan untuk dana Usaha Kemitraan digulirkan kepada RTM-R dengan mata pencaharian antara lain pedagang beras, penggilingan.

#### d. Perkembangan Program

Pada awal pelaksanaan program, dana USP digulirkan kepada 9 kelompok masyarakat (pokmas) dengan total anggota sekitar 60 (enam puluh) anggota

sedangkan untuk dana Usaha Kemitraan digulirkan kepada 2 (dua) mitra. Kini, pelaksanaan program sudah berjalan semakin terintegrasi dengan peningkatan jumlah anggota yaitu dari yang awalnya hanya 9 kelompok menjadi 22 kelompok. Dari yang total anggota Pokmas awal kurang lebih 60 orang kini menjadi 126 orang anggota. Menurut Bapak Setiyo Widodo, yang merupakan Bendahara UPK Artha Sejahtera ini, proses pembayaran angsuran dan beban bunga yang dikenakan terhadap kedua program yaitu USP dan kemitraan menggunakan metode yang berbeda. USP memiliki besaran bunga 2% dengan intensitas pembayaran 10 kali angsur yang berarti sepuluh bulan, sedangkan kemitraan memiliki besaran bunga 2,5% yang diangsur selama setahun dengan pembayaran bunga saja pada 6 bulan pertama dan pembayaran bunga disertai pinjaman pada 6 bulan berikutnya. Hal ini karena UPK memahami persoalan masyarakat yang kadang belum dapat melunasi pinjaman ketika bulan-bulan pertama karena pinjaman masih dijadikan modal awal usaha. Dengan metode seperti ini, tidak ada pihak Pokmas maupun kemitraan yang merasa keberatan dengan beban bunga dan sistem pembayaran.

Selain itu, di Desa Jambu ini juga terdapat dana "*sebrakan*" yaitu dana simpanan UPK yang digunakan untuk simpan pinjam terhadap kebutuhan masyarakat desa yang bersifat darurat, misalnya akan mengadakan hajatan, kematian, atau kebutuhan mendesak lain. Namun, pinjaman ini memiliki waktu pengangsuran yang singkat yaitu antara dua hingga tiga bulan. Sifat pengurus UPK yang sangat kooperatif dan akomodatif terhadap kebutuhan masyarakatnya membuat proses pelaksanaan menjadi lancar dan terarah. Bahkan saat ini, program USP telah mencapai periode kedua.

Meskipun terlihat berhasil, namun belum ada data secara kuantitatif yang menunjukkan penurunan tingkat RTM, UPK beranggapan hal ini karena program masih berjalan kurang dari dua tahun jadi proses penurunan jumlah RTM masih sedang berjalan. Selain dari Bapemas Propinsi, Desa Jambu juga banyak mendapat dukungan dari dinas-dinas lain seperti misalnya: dinas perikanan yang mengadakan pembinaan peternak lele dan modal 20 juta untuk usaha simpan pinjam, dinas

koperasi yang memberikan pembinaan administrasi dan pembukuan serta bantuan modal 30 juta sebagai simpan pinjam yang dikelola UPK untuk 3 kelompok, dinas sosial yang memberikan 100 ekor kambing yang dibagikan langsung kepada Pokmas. Hingga proses evaluasi ini dilakukan, untuk Usaha Simpan Pinjam jumlah modal sudah berkembang menjadi Rp 135.214.500,- dan total modal Pengembangan Usaha menjadi Rp 175.214.500,- dari yang sebelumnya Rp 137.700.000,-

e. Peran Sektap, TFK dan Tim Pendamping

Berbeda dengan Sektap atau TFK Desa lain yang kurang banyak berperan terhadap proses pelaksanaan program. Sektap dan TFK Desa Jambu ini, yaitu Bapak Budi dan Samuji cukup intensif terlibat dengan program Desa Model Binaan ini. Setidaknya, dalam 3 bulan sekali mereka melakukan pengecekan serta pembimbingan terhadap pengurus UPK dan Pokmas baik berupa pengetahuan pemasaran atau pembukuan.

f. Usulan Pengurus UPK

Karena proses pelaksanaan program sudah cukup lancar, maka permintaan dari pengurus UPK adalah penambahan modal dikarenakan permintaan Pokmas yang belum terrealisasikan masih banyak. Disamping itu, program ini dinilai UPK telah membantu masyarakat, karena pinjaman modal yang ditawarkan berbunga rendah, angsurannya ringan serta proses meminjamannya juga mudah dan yang terpenting adalah bahwa program ini mampu memberantas para “pelepas-uang” liar yang ada di desa dengan bunga yang luar biasa besar (*bank titil*).

7. **Lokasi: Desa Kemasantani**

Kabupaten : Mojokerto

Kecamatan : Gondang

- Responden : Ulfa (27 tahun)/ bendahara UPK

- Keterangan Pelaksana Program:

Tim Pendamping : M. Sunu, Univ. 17 Agustus Mojokerto

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Pendamping dr Desa | : Ahmad Zainuddin         |
| Sektap             | : Bapak Herman            |
| TFK                | : Bpk Purnomo (?)         |
| Ketua UPK          | : Muta'allifin            |
| Sekretaris UPK     | : Mukhibuddin             |
| Bandahara UPK      | : Ulfa                    |
| Pengawas           | : Bpk Irsad (Kepala Desa) |

### Proses Pelaksanaan Program Pengembangan Desa/ Kelurahan Model Binaan:

#### a. Sosialisasi Program

Proses sosialisasi program Desa Model Gerdu Taskin berjalan lancar dengan dihadiri oleh keseluruhan pengurus UPK, Sektap, TFK, pihak pengawas serta tim pendamping dan masyarakat. Indikasi jumlah RTM awal Desa ini adalah  $\pm$  250 orang dan belakangan dengan berbagai program pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan ada indikasi penurunan sehingga menjadi  $\pm$  200 orang.

#### b. Perencanaan Program

Proses perencanaan program dilaksanakan mengacu kepada pedoman umum yang telah dibuat. Program diarahkan untuk mengetaskan 250 RTM dari kemsikinan. Mata pencaharian penduduk yang nantinya menjadi sasaran program (RTM) antara lain adalah: pembuat samiler (sejenis makanan keripik), petani singkong, pedagang dan sebagainya. Adapun usaha yang menjadi unggulan di Desa ini adalah pembuat samiler yang mencapai 50% lebih.

#### c. Pelaksanaan program

Proses pelaksanaan program diawali dengan pencairan dana yang diterima melalui dua tahap, yaitu tahap pertama pada 2 Oktober dan tahap kedua pada 5 Oktober 2007. Total dana yang diterima adalah Rp 170.000.000,- dengan pembagian yang sedikit tidak sesuai dengan pedoman umum. Untuk Pengembangan Usaha (PU), dana yang dianggarkan adalah Rp 137.700.000; dana BOP sebesar Rp 10.200.000,-;

dana Pemberdayaan Manusia (PM) sebesar Rp 15.300.000,- yang diberikan kepada masyarakat berkategori RTM-R berupa bahan makanan sebanyak 50 RTM-R dan perlengkapan pendidikan seperti tas dan buku sekolah sebanyak 50 siswa kelompok RTM-R. Untuk dana Pemberdayaan Lingkungan (PL), dana yang dilimpahkan sebesar Rp 66.600.000,- untuk plengsengan yang dilakukan oleh dinas Pekerjaan Umum. Selain pemasukan tersebut, terdapat beberapa dinas yang juga mendukung usaha antara lain Dinas Koperasi yang memberikan modal untuk simpan pinjam sebanyak Rp 20.000.000,- dan Dinas Sosial yang mendirikan usaha swakelola berbentuk usaha air minum isi ulang dengan alokasi dana Rp 30.000.000,- namun jumlah tersebut telah dipotong pihak Sektap (secara sepihak dan tanpa keterangan) sebesar Rp 2.500.000,-.

#### d. Perkembangan program

Dalam pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam, awalnya dana digulirkan kepada 10 Pokmas dengan keanggotaan dimulai dari 10 hingga 12 orang sedangkan kemitraan digulirkan kepada 7 orang. Namun seiring dengan perkembangan jumlah dana maka jumlah Pokmas pun bertambah menjadi 17 Pokmas dengan total anggota mencapai 195 orang. Namun, masyarakat merasa peminjaman dengan sistem Pokmas lebih mudah daripada kemitraan sehingga jumlah mitra menyusut dari 7 orang menjadi 5 orang dimana 2 orang pindah menjadi peminjam Pokmas. Untuk beban bunga yang dikenakan disetiap Pengembangan Usaha berbeda-beda. Beban bunga untuk program USP adalah 2% perbulan yang wajib dibayar 12 kali atau satu tahun. Sedangkan beban bunga untuk kemitraan adalah 2,5% perbulan. Namun intensitas pembayaran dibayar setiap 4 bulan sekali dengan bunga dibayar sekaligus selama 4 bulan. Selama ini, UPK menganggap bahwa program ini sangat



berkontribusi terhadap masyarakat RTM di daerahnya karena melalui USP ini, usaha kecil masyarakat dapat terbantu baik dalam modal maupun pengembangan usaha. Jenis usaha yang paling berkembang di Desa Kemasantani Kabupaten Sidoarjo ini adalah usaha kecil pembuatan kerupuk samiler, mayoritas anggota Pokmas pun banyak yang bekerja sebagai pengrajin kerupuk samiler ini selain menjadi petani. Untuk itu, produk unggulan di Desa Kemasantani adalah kerupuk samiler yang terbuat dari singkong.

e. Peran, Sektap, TFK dan Tim Pendamping

Peran Sektap dan TFK tidak begitu aktif dalam pelaksanaan program, beberapa kali kedatangan Sektap hanya melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan dan pelatihan sedangkan TFK lebih aktif dalam memfasilitasi dan mendampingi proses pelaksanaan program.

f. Usulan Pengurus UPK

Beberapa masukan yang diutarakan pengurus UPK (bendahara UPK) terkait dengan pelaksanaan program adalah keinginan agar mendapat perhatian lebih intensif dari para fasilitator maupun pendamping juga dari pihak kecamatan dan kabupaten. Selama ini yang banyak terlibat secara aktif hanyalah pendamping dan pengawas dari pihak desa. Selain itu, karena masyarakat Desa Kemasantani banyak bertumpu pada sektor ekonomi yang masih tradisional maka kebutuhan akan pelatihan serta pengembangan usaha sangat diharapkan. Lebih jauh, karena masih banyaknya permintaan namun terbatasnya dana operasional maka, masyarakat mengharapkan agar ada pengguliran dana lagi yang mereka sebut "Penguatan"

8. **Lokasi: Desa Penambangan**

Kabupaten : Sidoarjo

Kecamatan : Balong Bendo

- Responden : Yuli Artiningsih (44 tahun)/Ketua UPK Maju Lestari

- **Keterangan Pelaksana Program:**

|                  |  |
|------------------|--|
| Tim Pendamping 1 | : Lutfi Agus Salim– Univ. Airlangga Surabaya |
| Tim Pendamping 2 | : Yupita – Univ. Airlangga Surabaya          |
| Tim Pendamping 3 | : Dewi – Masyarakat Desa                     |
| Sektap           | : Munjiya                                    |
| TFK              | : Abidin                                     |
| Ketua UPK        | : Yuli Artiningsih                           |
| Sekretaris UPK   | : Asri                                       |
| Bendahara UPK    | : Wiwik                                      |

**Proses Pelaksanaan Program Pengembangan Desa/ Kelurahan Model Binaan:**

a. **Sosialisasi Program**

Desa Penambangan, Kecamatan Balong Bendo, Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu Desa sasaran program Desa Model Binaan Gerdu Taskin Tahun 2007. Seperti juga desa-desa/ kelurahan lainnya, proses sosialisasi dijalankan sebelum program dijalankan. Sosialisasi di Desa Penambangan ini berlangsung pada Bulan April 2007, dihadiri oleh bapak Lutfi Agus Salim, beserta anggota Tim. Hasil sosialisasi adalah penjelasan terhadap program Desa Model Binaan Gerdu Taskin serta penjelasan mengenai tujuan Pemerintah yaitu peningkatan taraf hidup masyarakat terutama Rumah Tangga Miskin Rentan dan Berpotensi (RTM-R/RTM-B). Dalam sosialisasi tersebut, juga hadir beberapa calon pengurus UPK yang akan dibentuk berdasarkan poling, dimana sebelumnya ada 7 orang kandidat lalu dipilih 3 orang. Pemilihan tersebut dipimpin langsung oleh Tim Pendamping dan warga yang menghadiri acara sosialisasi.

b. **Perencanaan Program**

Proses perencanaan dilakukan sesuai dengan pedoman umum pelaksanaan program dan dibimbing secara intensif oleh Yupita,SKM (Tim pendamping 2). Klasifikasi dan klarifikasi RTM juga dilakukan, namun indikasi di lapangan sesuai



dengan pengakuan Ketua UPK bahwa banyak masyarakat mengaku menjadi RTM karena ingin mendapat dana simpan pinjam dan atau program Pemberdayaan Masyarakat (PM). Kesulitan yang dialami UPK di lapangan adalah banyaknya masyarakat yang marah dan protes ketika tidak mendapat dana/ bantuan tersebut, padahal menurut UPK kondisi masyarakat tersebut dapat digolongkan sebagai masyarakat mampu/ mapan. Karena letaknya yang cukup dekat dengan pasar, maka mayoritas penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai pedagang kaki lima di pasar, selain itu industri kecil bordir, pembuatan gorden, pedagang sayur, peternak lele, warung, dll juga ada di Desa penambangan ini. Perihal penyusunan proposal UPK, pihak-pihak yang ikut aktif terhadap pembuatan proposal adalah Tim pendamping (Yupita, SKM), pihak RT, RW serta pengurus UPK dengan fasilitas dari perangkat desa.

c. Pelaksanaan program

Proses awal pelaksanaan program adalah proses pencairan dana yang dilaksanakan pada Bulan Oktober 2007. Syarat-syarat pencairan dana yang harus dipenuhi salah satunya adalah disetujuinya proposal UPK. Jumlah dana yang diterima adalah sebesar Rp 170.000.000,- dengan pos-pos antara lain:

1. BOP sebesar 10%
2. Pemberdayaan Masyarakat (PM) sebesar Rp 15.300.000,-
3. Pengembangan Usaha (PU) sebesar Rp 137.700.000,-

Namun dalam pelaksanaannya dilapangan ternyata terdapat beberapa hal yang berubah. Dalam program Pemberdayaan Masyarakat, jumlah dana yang dikeluarkan lebih besar daripada seharusnya, hal ini karena banyaknya dukungan dana dari beberapa pihak lain baik dari desa maupun dai dinas-dinas terkait. Untuk PM, telah terindikasi 231 RTM-R (Rumah Tangga Miskin Rentan), alokasi bantuan untuk 231 RTM-R adalah masing-masing mendapat Rp 17.500 dalam tiga bulan yang diberikan dalam bentuk bantuan bahan makanan yaitu minyak goreng, susu, dan gula dengan total Rp 13.896.500. Selanjutnya, juga diberikan bantuan pendidikan berupa seragam

sekolah kepada 99 anak dengan nilai Rp 32.000,- dengan total Rp 3.168.000,-. Untuk Pemberdayaan Lingkungan, perencanaan program sudah dibuat, yaitu perbaikan pasar dan pembuatan tempat berjualan, namun hal tersebut belum terealisasi karena dana belum dicairkan. Dalam usaha Pengembangan Usaha (PU), alokasi dana Rp 137.700.000,- terbagi menjadi dua yaitu USP Rp 92.620.000,- dan Rp 45.080.000 untuk dana kemitraan.

#### d. Perkembangan Program

Pelaksanaan program Pengembangan Desa Model Binaan Gerdu Taskin terbilang cukup lancar dan progresif di Desa Penambangan. Dari alokasi dana awal untuk USP sebanyak Rp 92.620.000 ada penambahan Rp 10.000.000,- dari UNAIR yang digabungkan ke dalam USP Pokmas sehingga dengan modal Rp 102.700.000, kini Pokmas sudah mengantongi modal sebanyak ± Rp 121.662.000,-. Selain itu, berdasarkan kuantitas, jumlah Pokmas juga bertambah secara signifikan, dimana pengguliran awal diberikan kepada 11 Pokmas dengan jumlah anggota 60 orang telah berkembang menjadi 42 Pokmas dengan jumlah anggota telah mencapai 215 orang. Diperkirakan dengan seluruh piutang yang masih ada di masyarakat, perkembangan dana telah mencapai angka Rp 245.000.000,-. Pada sektor kemitraan, dimana awalnya hanya memiliki 1 mitra dengan besar pinjaman Rp 5.000.000,- dengan bentuk usaha pembuatan gorden, kini telah meningkat menjadi 13 mitra dengan jenis usaha yang variatif antara lain penjual kue kering, pedagang klontong dan sebagainya. Perkembangan kuantitas baik jumlah anggota maupun dana tersebut ternyata tidak dapat terlepas dari usaha kreatif yang telah digagas oleh Pengurus UPK, selain memiliki tingkat bunga yang rendah, proses meminjam yang mudah, serta lunaknya proses penagihan, terdapat insentif bagi anggota yang rajin mengangsur dan tidak menunggak yaitu pemberian minyak goreng, sehingga anggota menjadi bersemangat. Untuk beban bunga, program USP membebaskan 1% perbulan dengan 10 kali angsuran yang berarti sepuluh bulan lunas, sedangkan untuk program usaha kemitraan, dibebankan 1,5% perbulan dengan 10 kali masa angsuran (10 bulan).

e. Peran Sektap, TFK dan Tim Pendamping

Diakui secara langsung oleh Pengurus UPK, bahwa peran sektap dan TFK nihil. Sektap terutama sama sekali tidak menjalankan perannya sebagai pembimbing atau fasilitator program. Kedatangan sektap menurut pengurus UPK hanya ketika ada monitoring pertama kali dari Propinsi dan tidak pernah sama sekali melakukan pelatihan sehingga selama ini pengurus hanya melaksanakan program sebisanya. TFK juga tidak jauh berbeda, peran TFK hanya dilakukan ketika ada kabar akan ada monitoring. Selebihnya, tidak ada peran apapun dalam perkembangan Program.

f. Usulan Pengurus UPK

Harapan Pengurus UPK sendiri adalah adanya kajian terhadap potensi desa yang sebenarnya, sehingga hal tersebut dapat dikembangkan lebih maksimal lagi. Selama ini masyarakat RTM terlalu tergantung pada satu mata pencaharian pokok sehingga kalau mengalami krisis atau kendala maka kebutuhan dasarnya terancam tidak dapat terpenuhi. Selain itu, pengurus UPK berharap ada bantuan dari tenaga ahli untuk membimbing program, selama ini proses pelaksanaan memang berjalan tapi pengurus megaku sedikit kebingungan terhadap pembuatan laporan keuangan, perihal pelaksanaan, pengembangan program dan sebagainya.

9. **Lokasi:Desa Kebonagung**

Kabupaten : Madiun

Kecamatan : Balerejo

- Responden : Sujati (45 tahun)/ Bendahara UPK

- Keterangan Pelaksana Program :

Tim Pendamping : Waris S.M.&Endang – Univ. Merdeka Madiun

Ketua Sektap : Agung Hardjoko

Staff Sektap : Drs. Saiful dan Gianto

TFK : Mulyono

Ketua UPK : Kenthil Subagtiyono  
Bendahara UPK : Sujati  
Kepala Desa : Suhadi

Proses Pelaksanaan Program Pengembangan Desa/ Kelurahan Model Binaan:

a. Sosialisasi program

Desa Kebonagung, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun dengan jumlah penduduk 2.949 jiwa ternyata memiliki RTM (Rumah Tangga Miskin) sebanyak 262 keluarga dengan komposisi pembagian kerja 20,34% sebagai petani, 10,17% sebagai buruh tani, 2,2% sebagai peternak dan 67,29% bekerja sebagai karyawan dan pegawai (meliputi: pegawai negeri dan swasta), pengusaha kecil keripik tempe, pemilik warung, pengrajin, dan sebagainya). Proses sosialisasi program Pengembangan Desa Model Binaan Gerdu Taskin diselenggarakan pada 3 April 2007 bertempat di Surabaya dan dilanjutkan sosialisasi tingkat Kabupaten pada tanggal 5 April 2007 bertempat di Balai Desa Kebonagung Kecamatan Balerejo, Madiun. Adapun narasumber pelaksanaan sosialisasi adalah Sektap Kabupaten, Tim Fasilitasi Kecamatan (TFK) dan Koordinator serta Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dari LPM Univ. Merdeka Madiun.

Kegiatan yang diberikan dalam proses sosialisasi tersebut antara lain adalah penjelasan mengenai pedoman umum dan petunjuk teknis operasional program, dengan harapan masyarakat akan mengerti dan memahami sasaran dan manfaat program. Selain itu, dilakukan pula pemilihan dan pembentukan Unit Pengelola Keuangan (UPK) Agung Lestari.

b. Perencanaan program

Penyusunan perencanaan program diawali dengan kegiatan sosialisasi perencanaan di tingkat kabupaten yang disampaikan oleh Sektap Kabupaten Madiun, TFK dan Koordinator Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) kepada Kepala Desa, Ketua Baperdes dan ketua LPKMD serta pengurus UPK "Agung Lestari". Setelah itu,

diadakan klasifikasi dan klarifikasi RTM dan ditindak lanjuti dengan menyusun Proposal Paket I dan II melalui musyawarah bersama (Musdes).

c. Pelaksanaan program

Proses pelaksanaan program terbagi kedalam tiga fase, yaitu:

1. Lokakarya pra pelaksanaan

Lokakarya diselenggarakan di Kab. Madiun tepatnya di Pendopo Badan PMD Kab. Madiun yang dimaksudkan untuk memberikan penjelasan persiapan pelaksanaan program dan koordinasi serta konsultasi dengan berbagai dinas/ instansi untuk dukungan fasilitasi dan bantuan teknis.



2. Musdes pra pelaksanaan

Musdes meliputi pembahasan hal-hal berikut:

- Informasi usulan kegiatan desa yang disetujui, alokasi dana dan jadwal pelaksanaannya.
- Pembentukan tim pelaksana kegiatan (timlak), yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara serta seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan desa

3. Pencairan dan penyaluran dana program

Proses pencairan dana berlangsung pada 14 September 2007 dengan jumlah sebesar Rp 170.000.000,- untuk dana program pengembangan Desa Model Binaan. Kemudian juga terdapat penyaluran dana *sharing* (penyertaan) dari APBD Kab. Madiun sebesar Rp 72.860.000,- disalurkan kepada UPK pada tanggal 2 November 2007.

Keseluruhan dana dimanfaatkan sesuai dengan petunjuk pedoman umum program Pengembangan Desa Model Binaan antara lain Biaya Operasional program (BOP), dan dana kegiatan sesuai dengan pedoman umum dan petunjuk pelaksanaan

program. Dari jumlah dana Rp 137.700.000,- sebagai dana kegiatan, dibagi kedalam dua modal yaitu sebagai modal Usaha Simpan Pinjam sebesar Rp 68.850.000,- dan dana kemitraan sebesar Rp 68.850.000,-. Selain itu juga terdapat dana Pemberdayaan Manusia sebesar Rp 15.300.000,-. Kebutuhan yang diperlukan untuk Pemberdayaan Manusia antara lain adalah pemberian makanan tambahan bagi 50 RTM-R selama 3 bulan dengan alokasi Rp 1.000.000,- setiap bulannya; pembelian bangku dan kursi TK sebanyak 14 unit (2 TK) sebesar Rp 7.000.000,-; pemberian bantuan peralatan sekolah siswa RTM-R sebanyak 31 siswa dengan total dana sebesar Rp 5.300.000,-. Dana pemberdayaan Lingkungan yang dianggarkan adalah sebesar Rp 65.574.000,- dengan bentuk kegiatan antara lain pengaspalan jalan (2,5 x 500m) dan pembangunan 2 unit jembatan plat beton (0,8x6x1m).

d. Perkembangan program

Pelaksanaan program di Desa Kebonagung ini berjalan sinergis dan terarah. Hal ini dikarenakan besarnya dukungan dan intensifnya keterlibatan semua pihak yang terkait. Pengguliran dana awal program Usaha Simpan Pinjam dilakukan kepada 7 Pokmas dengan jumlah anggota 68 orang, sedangkan kemitraan digulirkan kepada 2 mitra yaitu usaha penggemukan sapi dengan pinjaman sebesar Rp 33.300.000,- dan pemeliharaan induk sapi betina dengan pinjaman sebesar Rp 35.550.000,-.

Adapun peningkatan jumlah modal perkembangan dana kegiatan kemitraan ketika evaluasi ini dilakukan adalah sebesar Rp 179.157.550 dan dana Pokmas dengan rincian: tabungan sebesar Rp 5.329.000, piutang pokmas Rp 103.370.505, SHU Rp 18.112.250, Simpanan Pokok Rp 1.060.000 dan Simpanan Wajib Rp 1.992.000. Anggota Pokmas pun juga sudah jauh berkembang, dimana sekarang sudah menjadi 14 Pokmas dengan total anggota sebanyak 107 anggota dan anggota kemitraan kini menjadi 10 orang.

e. Peran Sektap, TFK dan Tim Pendamping

Peran seluruh komponen pendamping dan fasilitator terbukti secara efektif dan sinergis membantu Pengurus UPK dalam melaksanakan kegiatan Pengembangan Desa Model Binaan. Beberapa staff Sektap bahkan intensif memantau perkembangan program. Beberapa bimbingan yang pernah diberikan antara lain adalah pemasaran dan pencarian modal pinjaman lain yang bekerjasama dengan dinas-dinas lain (dinas pertanian, koperasi, dinas sosial, dll).

f. Usulan Pengurus UPK

Beberapa usulan baik dari pihak Pengurus UPK maupun Sektap dan TFK adalah sebagai berikut:

- Harapan akan tambahan pemberian bantuan dana dari Dinas-Dinas lain untuk mengadakan usaha simpan pinjam lagi, karena banyaknya permintaan warga.
- Diharapkan adanya pelatihan untuk pengurus untuk peningkatan kapasitas pengurus, anggota serta Pokmas
- Difungsikan *reward* bagi pengurus teladan agar menambah motivasi dalam bekerja dan penguatan kelembagaan
- Ada kelanjutan program dan tidak berhenti sampai disini.

10. **Lokasi :Desa Josenan**

Kota : Madiun

Kecamatan : Taman

- Responden : Pengurus UPK

- Keterangan Pelaksana Program :

Tim Pendamping : Eni Setiyaherni (LSM LKP2U), Muji Rahardjo  
(Univ. Merdeka Madiun)

Sektap : Singgih Budiono

TFK : Juwono

Ketua UPK : Sunarno  
Sekertaris UPK : Zaini  
Bendahara UPK : Miyati

#### Proses Pelaksanaan Program Pengembangan Kelurahan Model Binaan:

##### a. Sosialisasi program

Proses sosialisasi program berjalan sesuai dengan yang ditentukan dalam pedoman umum. Sosialisasi awal program yang berlangsung di Kelurahan Josenan dilaksanakan pada Bulan April 2007 yang dihadiri oleh semua warga yang diwakili oleh RT, RW, tokoh masyarakat, Dinas terkait, BPM dan lembaga pendamping serta Sektap, TFK dan Pendamping dari Universitas Merdeka Madiun.

##### b. Perencanaan program

Proses perencanaan program diawali dengan pembentukan UPK dan proses penyusunan proposal UPK melalui musyawarah dengan semua elemen perangkat dan tim pendamping dan fasilitator terkait di Kelurahan. Sebelumnya Kelurahan Josenan telah memiliki lembaga keuangan sendiri yaitu LKK (Lembaga Keuangan Kelurahan), untuk itu pembentukan UPK hanya diikuti dengan pengangkatan satu bendahara saja yang akan mengelola keuangan sedangkan untuk ketua dan sekretaris merujuk pada Ketua dan Sekertaris LKK.

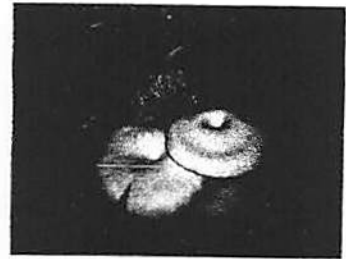
##### c. Pelaksanaan program

Dana Pengembangan Kelurahan Model Binaan masuk kepada rekening UPK pada tanggal 27 September 2007. UPK kemudian mengadakan rapat koordinasi pada tanggal 5 dan 8 Oktober terkait hal ini. Acara ini dihadiri oleh seluruh pengurus UPK, Pembina, Pengawas, Sektap, TFK dan Pendamping. Keputusan yang dibuat dalam rapat tersebut antara lain: pelaksanaan kegiatan usaha setelah libur Hari Raya Idul Fitri 1428 H, prioritas kegiatan Pemberdayaan Manusia berupa paket peningkatan gizi bagi RTM-R, Hasil klarifikasi dan klasifikasi RTM-R sejumlah 153 KK. Namun, setelah dilakukan verifikasi dan penyesuaian dengan kegiatan maka RTM-R yang



menjadi sasaran adalah 146 KK. Bantuan bahan makanan yang diberikan dalam program PM adalah berupa gula pasir, minyak goreng, kacang hijau dan susu coklat yang digulirkan dalam dua tahap. Realisasi usaha simpan pinjam kemudian digulirkan kepada 25 Pokmas dengan jumlah anggota 51 orang pada Desember 2007 dengan total nominal Rp 35.850.000,-. Untuk efektivitas penggunaan dana, maka kemitraan dicairkan secara bertahap sesuai kebutuhan usaha.

Meskipun berdasarkan kesepakatan peminjaman kemitraan adalah Rp 20.000.000 untuk usaha pengolahan limbah plastic dan Rp 34.000.000 untuk usaha jamur tiram. Namun, dana ini tidak langsung dicairkan melainkan diberikan dalam beberapa tahap. Untuk usaha pengolahan limbah plastik, tahap I dicairkan sebesar Rp 7.500.000,- dan untuk usaha jamur tiram dicairkan sebesar Rp 14.000.000,-. Sedangkan tahap berikutnya dilaksanakan sewaktu-waktu dan besarnya disesuaikan dengan kebutuhan. Pemberdayaan lingkungan berlangsung melalui dua fase, yang pertama merupakan hasil alokasi dana dari Dinas-Dinas propinsi menghasilkan pembangunan jalan aspal (Dinas Kimpraswil dan Bina Marga), rehabilitasi 2 unit rumah miskin (Dinas Kimpraswil), pembangunan saluran irigasi (dinas Pengairan), pembentukan kelompok usaha dengan pinjaman Rp 40.000.000 untuk 4 Pokmas (Dinas Koperasi).



Dana *sharing* dari Pemerintah Kota Madiun berupa kegiatan lingkungan PMDMK. Kelurahan Josenan mendapat alokasi dana sebesar Rp 190.000.000 dengan kegiatan antara lain pembangunan paving (pavingisasi) di beberapa jalan, pembuatan saluran irigasi, dan pembuatan MCK.

#### d. Perkembangan program

Perkembangan usaha yang terjadi di program Pembangunan Usaha Simpan Pinjam. Indikasi yang terlihat jelas adalah perkembangan jumlah anggota yang sebelumnya 51 orang kini menjadi 80 orang. Namun, jumlah anggota kemitraan masih tetap berjumlah sama yaitu 2 orang. Penguliran dana untuk usaha kemitraan

tampaknya sedikit mengalami masalah dikarenakan ada indikasi kurang majunya usaha pengolahan limbah plastik. Beban bunga yang dibebankan baik untuk USP maupun kemitraan bernilai sama yaitu 1% namun yang diangsur selama satu tahun. Adapun potensi unggulan Kelurahan Josenan ini adalah budi daya jamur tiram, peracangan, penjual makanan siap saji, penjual bunga, peternakan dan bengkel. Diantara itu, usaha yang paling berkembang adalah usaha jamur tiram.

e. Peran Sektap, TFK dan Tim Pendamping

Peran Sektap dinilai pengurus sudah cukup bagus karena komunikasi selalu terjalin. Selain itu Sektap juga kerap memberikan pengarahan dalam pengembangan usaha untuk UPK. Ketika awal pelaksanaan program, selalu diadakan pertemuan rutin setiap satu bulan sekali untuk membahas perkembangan pelaksanaan program. Namun, setelah Januari 2008 sudah tidak ada lagi rapat, namun komunikasi masih terjalin. Tim Pendamping di Desa yaitu dari LSM LKP2U (Lembaga Kajian dan Pengembangan Potensi Umat), Ibu Eni juga cukup berperan membantu pelaksanaan program.

f. Usulan Pengurus UPK

Pengurus UPK Kelurahan Josenan sendiri berharap karena banyak usaha yang berkembang di masyarakat maka pemberian informasi akan pemasaran serta pelatihan pemasaran akan sangat membantu masyarakat. Selain itu, beberapa pengurus dan perangkat Kelurahan juga mengharapkan adanya pelatihan peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia) bagi pengurus maupun anggota Pokmas dan kemitraan. Kebutuhan akan tambahan modal juga diharapkan, mengingat usaha simpan pinjam cukup berkembang namun keseluruhan dana belum sempat dicairkan sepenuhnya.

## BAB 4

### ANALISIS HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN DESA/ KELURAHAN MODEL BINAAN GERDU TASKIN TAHUN 2008

#### 4.1. MODEL GERDU TASKIN

Selain menerapkan kebijakan otonomi daerah sebagai basis pergerakan pembangunan tingkat daerah, untuk mewujudkan pemerataan pembangunan nasional dan menciptakan kesejahteraan masyarakat, Pusat juga memberikan kewenangan lebih besar kepada Daerah dalam mengenali permasalahan daerahnya. Pemerintah Pusat telah membuat tiga prioritas utama pembangunan nasional, yaitu: peningkatan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, peningkatan penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Propinsi Jawa Timur sendiri, salah satu upaya yang dilakukan dalam pengentasan kemiskinan yang mengandalkan kemampuan Daerah dalam proses pelaksanaan hingga pengendaliannya adalah Program Pengembangan Desa/ Kelurahan Model Binaan Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu Taskin) Kerjasama Dengan PT/ LSM atau yang lebih dikenal dengan Program Gerdu-Taskin.

Karakteristik kondisi masyarakat miskin yang selalu dikelilingi oleh keterbatasan, baik keterbatasan dalam upaya memperjuangkan aspirasi, termarginalkan dalam banyak institusi (sekolah, rumah sakit, institusi-institusi sosial lain), keterbatasan pengetahuan tentang pembangunan yang menyeluruh serta keterbatasan jumlah penghasilan dan keterbatasan kepemilikan atas kebutuhan-kebutuhan dasar hidup -- telah menjadi perhatian serius Pemerintah beserta semua pihak yang peduli. Untuk itu, pola pengentasan kemiskinan yang hanya berorientasi pada bantuan fisik berupa materi atau barang habis pakai dan tidak berkelanjutan kini mulai ditinggalkan. Kebutuhan akan pengentasan kemiskinan melalui program kemandirian dan pemberdayaan masyarakat terbukti mampu mengentas masyarakat

dari kemiskinan struktural. Hal ini karena pembangunan manusia yang berorientasi pada peningkatan kemandirian dan pemberdayaan mampu membuat masyarakat lebih produktif untuk menciptakan atau mengembangkan usaha ekonomi baik mikro maupun makro secara kolektif sehingga masyarakat akan lebih mandiri.

#### **4.1.1. Proporsi Pembagian Dana Pelaksanaan Program Desa/ Kelurahan Model Binaan Gerdu Taskin**

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, salah satu program pengentasan kemiskinan yang menjadi andalan Pemerintah Propinsi Jawa Timur dalam mengentaskan masyarakatnya dari jarring-jaring kemiskinan adalah Program Pengembangan Desa/ Kelurahan Model Binaan Gerdu Taskin yang bekerjasama dengan pihak Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai pendamping pelaksanaan program. Sebagai program yang sudah berjalan hampir enam tahun ini, tentunya telah cukup berkontribusi bagi pengentasan kemiskinan masyarakat Desa/ Kelurahan sasaran khususnya dan masyarakat Jawa Timur umumnya. Berangkat dari hal tersebut maka evaluasi pelaksanaan program perlu dilakukan secara intensif untuk memantau perkembangan pelaksanaan program Desa/ Kelurahan Model Binaan serta mengidentifikasi keberhasilan serta permasalahan dalam proses pelaksanaan program. Perlu diketahui bahwa pelaksanaan program tidak dilakukan secara serentak pada tahun yang sama. Pelaksanaan Program Gerdu-Taskin dilakukan dengan waktu yang berbeda di setiap Kabupaten/ Kota.

Selain itu, karena sasaran program ini merupakan masyarakat miskin di Jawa Timur maka keterlibatan Perguruan Tinggi dan atau Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai pendamping sekaligus fasilitator sangat penting untuk membantu kelancaran pelaksanaan program pembinaan Desa/ Kelurahan Model. Sesuai dengan pedoman monitoring dan evaluasi yang diberikan maka pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan di 10 (sepuluh) Kabupaten/ kota di Jawa Timur. Secara umum, 10 (sepuluh) Desa/ Kelurahan Model Binaan Gerdu Taskin memperoleh modal yang

sama untuk pelaksanaan program. Berikut tabel alokasi dana program di 10 (sepuluh) Desa/ Kelurahan Model Binaan terpilih:

**Tabel 4.1. Alokasi Dana Program Pengembangan Desa/ Kelurahan Model Binaan Gerdu-Taskin Kerjasama dengan PT/ LSM Tahun 2007**

| No  | Kabupaten/<br>Kota | Kecamatan     | Desa/<br>Kelurahan | Jumlah Dana Program  |                           |
|-----|--------------------|---------------|--------------------|----------------------|---------------------------|
|     |                    |               |                    | BOP                  | BLM                       |
| 1.  | Kota Madiun        | Taman         | Kel. Josenan       | Rp 17.000.000        | Rp 153.000.000            |
| 2.  | Kab. Pacitan       | Nawangan      | Ngromo             | Rp 17.000.000        | Rp 153.000.000            |
| 3.  | Kab. Malang        | Jabung        | Taji               | Rp 17.000.000        | Rp 153.000.000            |
| 4.  | Kab. Mojokerto     | Gondang       | Kemasentani        | Rp 17.000.000        | Rp 153.000.000            |
| 5.  | Kab. Banyuwangi    | Singojuruh    | Gambor             | Rp 17.000.000        | Rp 153.000.000            |
| 6.  | Kab. Lumajang      | Pronojiwo     | Pronijiwo          | Rp 17.000.000        | Rp 153.000.000            |
| 7.  | Kab. Kediri        | Kayenkidul    | Jambu              | Rp 17.000.000        | Rp 153.000.000            |
| 8.  | Kab. Sidoarjo      | Balombangendo | Penambangan        | Rp 17.000.000        | Rp 153.000.000            |
| 9.  | Kab. Madiun        | Balerejo      | Kebonagung         | Rp 17.000.000        | Rp 153.000.000            |
| 10. | Kab. Jember        | Bangsalsari   | Gambirono          | Rp 17.000.000        | Rp 153.000.000            |
|     |                    | <b>Jumlah</b> |                    | <b>Rp 36.000.000</b> | <b>Rp 1.224.000.000</b>   |
|     |                    |               |                    |                      | <b>Rp 1.360.000.000,-</b> |

Sesuai dengan petunjuk pedoman umum pelaksanaan Program Pengembangan Desa/ Kelurahan Model Binaan Gerdu Taskin, maka dana tersebut akan terbagi kedalam beberapa pos anggaran sebagai berikut:

- a. Dana Kegiatan sebesar 90%

Proporsi penggunaan dana kegiatan dengan rincian:

1. Dana Pemberdayaan Usaha sebesar 90% dipergunakan untuk Usaha Simpan Pinjam (USP) minimal 50% dan Dana Kemitraan Usaha (DKU) untuk pengembangan potensi ekonomi unggulan Desa/ Kelurahan maksimal 50%

2. Dana Pemberdayaan Manusia (PM) sebesar 10%

- b. Biaya Operasional Program (BOP) sebesar 10%, dengan proporsi sebagai berikut:

1. 60% untuk Operasional Pengelolaan Kegiatan

2. 40% untuk Operasional Pengelola Kegiatan Desa/ Kelurahan yang dikelola UPK, untuk membiayai: operasional pengelolaan kegiatan (80%) dan insentif pengurus UPK dalam 4 bulan pertama (20%).

Melihat alokasi anggaran tersebut, maka berdasar pada pedoman umum pelaksanaan program, pihak pengurus UPK mendapat insentif dari alokasi BOP sebesar 20% atau Rp 1.360.000 dalam 4 bulan atau sebesar Rp 340.000 selama sebulan. Dengan intensitas kerja yang terbilang paling berat yaitu sebagai pelaksana program dilapangan, maka banyak UPK-UPK yang mengeluh akan keterbatasan insentif yang didapatkan. Bisa dimaklumi, mengingat dari Rp 340.000 tersebut akan dibagi lagi menjadi tiga bagian yaitu untuk Ketua UPK, Sekertaris UPK dan Bendahara UPK. Di beberapa Desa/ Kelurahan bahkan ada yang tidak mengambil insentif dikarenakan ketidak tahuannya terhadap pedoman umum Program ini.

#### **4.1.2. Proses Sosialisasi dan Pelaksanaan Program**

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan di 10 (sepuluh) Desa/ Kelurahan Model Binaan maka terdapat variasi jawaban terkait dengan proses pencairan dana program. Beberapa desa atau kelurahan yang lebih cepat, memperoleh dana pada September 2007 dan bagi desa dan kelurahan yang terlambat, baru memperoleh dana pencairan pada Bulan Desember 2007. Proses pencairan dana terkait dengan kapan pelaksanaan program dimulai, keterlambatan proses pencairan dana menyebabkan pelaksanaan program menjadi mundur dari jadwal awal yang telah ditetapkan. Beberapa indikasi terjadinya keterlambatan pencairan antara lain adalah proses pembuatan proposal yang lama, penolakan proposal, koreksi dari pihak Kabupaten sampai pada teknis pemberian dana melalui beberapa tahapan. Berikut tabel waktu pencairan dana di 10 (sepuluh) Desa/ Kelurahan Model Binaan.

**Tabel 4.2. Pencairan Dana Program Pengembangan Desa Model Binaan Gerdu Taskin Evaluasi Tahun 2008**

| No. | Kabupaten/<br>Kota | Kecamatan,<br>Kelurahan/ Desa       | Waktu<br>Pencairan   |
|-----|--------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 1.  | Kota Madiun        | Kec. Taman<br>Kel. Josenan          | 27 September<br>2007 |
| 2.  | Kab. Pacitan       | Kec. Nawangan<br>Ds. Ngromo         | Oktober 2007         |
| 3.  | Kab. Malang        | Kec. Jabung<br>Ds. Taji             | -                    |
| 4.  | Kab. Mojokerto     | Kec. Gondang<br>Ds. Kemasentani     | Oktober 2007         |
| 5.  | Kab. Banyuwangi    | Kec. Singojuruh<br>Ds. Gambor       | September 2007       |
| 6.  | Kab. Lumajang      | Kec. Pronojiwo<br>Ds. Pronojiwo     | September 2007       |
| 7.  | Kab. Kediri        | Kec. Kayenkidul<br>Ds. Jambu        | Desember 2007        |
| 8.  | Kab. Sidoarjo      | Kec. Balongbendo<br>Ds. Penambangan | Oktober 2007         |
| 9.  | Kab. Madiun        | Kec. Balerejo<br>Ds. Kebonagung     | 14 September<br>2007 |
| 10. | Kab. Jember        | Kec. Bangsalsari<br>Ds. Gambirono   | September 2007       |

Berdasarkan tabel tersebut, maka terdapat beberapa desa yang sangat terlambat dalam proses pencairan dananya yaitu Desa Jambu, Kabupaten Kediri pada Desember 2007. Pencairan dana tersebut langsung diberikan melalui rekening Pengurus Unit Pengelola Keuangan (UPK) Desa/ Kelurahan terkait. Khusus untuk Desa Taji, Kabupaten Malang, tidak terdapat laporan dikarenakan kondisi yang telah dibahas di bab sebelumnya dimana, pengurus UPK (Ketua, sekretaris) beserta Kades dan BPD tidak mengetahui persoalan pendataan program Desa Model Binaan dan factor lain karena pihak yang mengetahui (bendahara) tidak berada di tempat dalam waktu yang cukup lama sehingga kondisi keuangan dan pelaksanaan program menjadi terbengkalai. Ketua UPK juga sama sekali tidak mengetahui proses pelaksanaan Program ini.

Dari tampilan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan Program Gerdu Taskin di sepuluh Kabupaten/ Kota di Jawa Timur tersebut dimulai pada tahun

yang sama yaitu Tahun 2007. Meski terjadi keterlambatan di beberapa Desa, tetapi berangkat dari kenyataan tersebut, maka kondisi perkembangan program dapat diperbandingan antara Kabupaten satu dengan Kabupaten lainnya.

#### **4.1.3. Proses Sosialisasi Program Desa/ Kelurahan Model Binaan**

Proses sosialisasi program adalah proses pemberian penjelasan terhadap konsepsi dasar, tujuan, sasaran, prinsip-prinsip, ketentuan dan mekanisme pelaksanaan program. Untuk itu, keterlibatan semua pihak yang terkait dalam proses sosialisasi menjadi landasan penting bagi proses pelaksanaan awal program. Selain pemberian penjelasan terhadap proses pelaksanaan program, dalam kegiatan sosialisasi juga dilakukan pembentukan Pengurus UPK yang standarnya terdiri dari Ketua, Sekertaris dan Bendahara serta 3 orang pengawas yang akan lebih intensif berada dilapangan sebagai pengelola keuangan. Ada desa yang sebelumnya sudah memiliki UPK namun dengan nama lain. Misalnya saja di Kelurahan Josenan, Kota Madiun dimana kelurahan ini sebelumnya telah memiliki LKK (Lembaga Keuangan Kelurahan) yang diperuntukkan untuk menampung dana-dana bantuan yang didapat dari seluruh dinas-dinas terkait baik dari Kota maupun Propinsi sehingga dengan adanya program Pengembangan Desa Model, pembentukan UPK hanya diwujudkan dengan pengangkatan satu orang bendahara yang akan secara khusus mengelola dana Gerdu Taskin. Mengenai penamaan UPK, masing-masing Kabupaten/ Kota memiliki nama UPK yang berbeda-beda sesuai dengan hasil musyawarah yang telah dilakukan.

#### **4.1.4. Proses Pelaksanaan program Pengembangan Desa/ Kelurahan Model Binaan**

Penjelasan mengenai pelaksanaan program Pengembangan Desa/ Kelurahan Model Binaan Gerdu Taskin meliputi tiga kegiatan utama yang merujuk pada konsep TRIDAYA yaitu: (1) Pemberdayaan Masyarakat (PM); (2) Pemberdayaan Lingkungan (PL); dan (3) Pengembangan Usaha (PU), yang kesemuanya telah diterangkan ke dalam Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan di bagian awal.



Khusus untuk program Pengembangan Usaha, dana kegiatan dialokasikan kepada dua bentuk kegiatan utama yaitu kegiatan Usaha Simpan Pinjam (USP) dan Usaha Kemitraan. Proporsi pembagian dana untuk kedua program ini disesuaikan dengan kebutuhan Desa/ Kelurahan masing-masing. Pedoman umum hanya menyarankan pembagian maksimal 50% untuk dana kemitraan dan minimal 50% untuk Usaha Simpan Pinjam. Berikut tabel yang menunjukkan pembagian proporsi alokasi dana kegiatan PU UPK di Desa/ Kelurahan Model Binaan.

**Tabel 4.3. Proporsi Alokasi dana Kegiatan Pengembangan Usaha (PU) UPK Desa/ Kelurahan Model Binaan Gerdu-Taskin Evaluasi Tahun 2008**

| No | Desa/ Kelurahan,<br>Kecamatan,<br>Kabupaten,         | Dana Kegiatan<br>USP   | Dana<br>Kegiatan<br>Kemitraan | Total Dana<br>Kegiatan (USP +<br>Kemitraan) |
|----|--|------------------------|-------------------------------|---|
| 1. | Kota Madiun<br>Kec. Taman<br>Kel. Josenan            | Rp103.700.000          | Rp 34.000.000                 | Rp 137.700.000                              |
| 2. | Kab. Pacitan<br>Kec. Nawangan<br>Ds. Ngromo          | Rp 68.850.000          | Rp 68.850.000                 | Rp 137.700.000                              |
| 3. | Kab. Malang<br>Kec. Jabung<br>Ds. Taji               | -                      | -                             | -   |
| 4. | Kab. Mojokerto<br>Kec. Gondang<br>Ds.Kemasentani     | Rp 77.200.000          | Rp 60.500.000                 | Rp 137.700.000                              |
| 5. | Kab. Banyuwangi<br>Kec. Singojuruh<br>Ds. Gabor      | Rp 95.250.000          | Rp 40.000.000                 | Rp 135.250.000                              |
| 6. | Kab. Lumajang<br>Kec. Pronojiwo<br>Ds. Pronojiwo     | Rp 99.700.000          | Rp 38.000.000                 | Rp 137.700.000                              |
| 7. | Kab. Kediri<br>Kec. Kayenkidul<br>Ds. Jambu          | Rp 96.390.000<br>(70%) | Rp 41.310.000<br>(30%)        | Rp 137.700.000                              |
| 8. | Kab. Sidoarjo<br>Kec. Balongbendo<br>Ds. Penambangan | Rp 92.620.000          | Rp 45.080.000                 | Rp 137.700.000                              |
| 9. | Kab. Madiun<br>Kec. Balerejo<br>Ds. Kebonagung       | Rp 68.850.000,-        | Rp<br>68.850.000,-            | Rp. 137.700.000,-                           |
| 10 | Kab. Jember<br>Kec. Bangsalsari<br>Ds. Gambirono     | Rp<br>137.700.000,-    | -                             | Rp 137.700.000,-                            |

Dari data tersebut, terlihat bahwa proporsi pembagian yang dilakukan tiap-tiap Desa/ Kelurahan berbeda satu sama lain disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Di Kota Madiun, tepatnya Kelurahan Josenan, program simpan pinjam dan kemitraan berlangsung sedikit berbeda dimana pemberian dana dilakukan secara bertahap. Hal ini diakui oleh pengurus UPK cukup merepotkan tapi secara umum proses simpan pinjam cukup berjalan lancar. Sedangkan di Desa Taji, Kab. Malang tidak terdapat data alokasi dana dikarenakan ketidakjelasan pelaksanaan program di Desa tersebut.

Untuk program PM (Pemberdayaan Manusia), nominal yang dianggarkan Desa/ Kelurahan telah sesuai dengan acuan pada pedoman umum yaitu sebesar Rp 15.300.000,-. Bentuk pelaksanaan kegiatan dilakukan berbeda sesuai dengan kebutuhan Desa/ Kelurahan masing-masing dan kebutuhan RTM-R khususnya yang merupakan sasaran program PM ini. Berikut merupakan tabel alokasi dana PM untuk pemenuhan kebutuhan RTM-R (Rumah Tangga Miskin kategori Rentan).

**Tabel 4.4. Alokasi Dana Untuk Pemberdayaan Manusia (PM)  
Program Pengembangan Desa/ Kelurahan Model Binaan Gerdu Taskin  
Evaluasi Tahun 2008**

| No. | Lokasi  | Jumlah Dana     | Bentuk Kegiatan   |
|-----|---|-----------------|---|
| 1.  | Kota Madiun<br>Kec. Taman<br>Kel. Josenan         | Rp 15.300.000   | Pemberian bantuan melalui 3 tahap berupa sembako  |
| 2.  | Kab. Pacitan<br>Kec. Nawangan<br>Ds. Ngromo       | Rp 15.000.000   | Bantuan untuk 48 Fakir miskin dan 14 RTM-R berupa: susu, telur, gula pasir, minyak goreng, baju, tas dan buku pelajaran   |
| 3.  | Kab. Malang<br>Kec. Jabung<br>Ds. Taji            | -               | Tidak teridentifikasi dengan jelas  |
| 4.  | Kab. Mojokerto<br>Kec. Gondang<br>Ds. Kemasentani | Rp 15.300.000   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan: pakaian seragam, tas, sepatu, buku untu 50 anak RTM-R</li> <li>• Bantuan sembako melalui empat tahap berupa: minyak goreng, gula pasir, mie, sabun mandi, sabun cuci piring, kantong plastic untuk %) RTM-R</li> </ul> |
| 5.  | Kab. Banyuwangi<br>Kec. Singojuruh<br>Ds. Gambor  | Rp 15.300.000,- | Tidak teridentifikasi dengan jelas  |

|     |   |                 |   |
|-----|---|-----------------|---|
| 6.  | Kab. Lumajang<br>Kec. Pronojiwo<br>Ds. Pronojiwo        | Rp 15.300.000   | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Pemberian makanan tambahan: susu, telur, gula dan mie instan.</li> <li>•Pendidikan Anak Usia Dini: bantuan peralatan bermain dan ayunan</li> <li>•Pendidikan anak: buku pelajaran, tas sekolah</li> </ul>                 |
| 7.  | Kab. Kediri<br>Kec. Kayenkidul<br>Ds. Jambu             | -               | Pemberian seminar tentang pemasaran usaha pada masyarakat dan pemberian bantuan kepada RTM  |
| 8.  | Kab. Sidoarjo<br>Kec.<br>Balongbendo<br>Ds. Penambangan | Rp 15.300.000   | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Bantuan tambahan makanan untuk 231 RTM-R Rp 12.132.000</li> <li>•Bantaun seragam sekolah untuk 99 siswa RTM-R Rp 3.168.000</li> </ul>   |
| 9.  | Kab. Madiun<br>Kec. Balerejo<br>Ds. Kebonagung          | Rp 15.300.000,- | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Pemberian makanan tambahan 50 RTM-R selama 3 bulan = Rp 3.000.000,-</li> <li>•Pembelian bangku dan kursi TK, 14 unit = Rp 7.000.000,-</li> <li>•Bantuan peralatan sekolah bagi 31 siswa RTM-R = Rp 5.300.000,-</li> </ul> |
| 10. | Kab. Jember<br>Kec. Bangsalsari<br>Ds. Gambirono        | Rp 15.300.000   | Tidak teridentifikasi dengan jelas  |

Sumber : Data Primer

Dalam tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa alokasi anggaran digunakan dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Umumnya program Pemberdayaan Manusia dialokasikan ke dalam bantuan bahan makanan bagi keluarga miskin dan bantuan pendidikan bagi anak keluarga RTM-R (Rumah Tangga Miskin golongan Rentan). Beberapa desa juga menerapkan sistem yang berbeda untuk anggarannya. Ada yang diberikan langsung melalui satu tahap dan ada yang diberikan melalui beberapa tahap. Seperti misalnya yang dilakukan di Desa Kebongagung, Kecamatan Balerejo, Kab. Madiun, pemberian bantuan bahan makanan diberikan melalui tiga tahap hingga tiga bulan. Setiap bulannya, diberikan bahan makanan kepada 50 RTM-R, selain itu program PM juga dialokasikan kepada bantuan pendidikan yang disalurkan langsung kepada sekolah berupa pembelian bangku dan bantuan peralatan sekolah kepada 31 siswa dari keluarga RTM-R.

Dalam Landasan konsep Tridaya ketiga yaitu bidang PL (Pemberdayaan Lingkungan), proses yang terjadi berbeda dengan kedua program sebelumnya baik dari segi pendanaan hingga pelaksanaan dan sasaran di lapangan. Jumlah dana yang

dialokasikan untuk program Pemberdayaan Lingkungan memiliki nominal yang berbeda-beda di setiap Kabupaten/ Kota. Hal ini dikarenakan banyak faktor yang melatar belakangnya, selain jumlah pembagian dana *sharing* yang berbeda di setiap Kabupaten/ Kota, bantuan dari dinas-dinas terkait juga tidak merata di setiap daerah tergantung kepada Kabupaten/ Kota masing-masing, juga kebutuhan perbaikan lingkungan yang berbeda, sehingga proses pelaksanaan PL menjadi berbeda-beda.

Selain hal tersebut, perbedaan PL dengan dua program Pemberdayaan sebelumnya yaitu PM dan PU adalah pelaksana dan sasaran. Karena sifat program adalah memperbaiki dan membangun sarana prasarana lingkungan yang lebih baik maka pelaksananya adalah para ahli yang mampu terlibat seperti tukang bangunan dan pekerja dari dinas-dinas terkait. Peran UPK hanya memonitoring pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan tersebut. Tidak hanya RTM, dikarenakan pembangunan sarana dan prasarana wujud PL tersebut merupakan fasilitas publik maka sasarannya adalah seluruh masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut. Terdapat beberapa Desa juga yang memiliki program PL namun alokasi anggaran tidak teridentifikasi dengan jelas, hal ini disebabkan buruknya administrasi Desa beserta kurang sistematisnya pencatatan alokasi dana PL dan permasalahan-permasalahan lain yang muncul seperti pergantian kepala desa dan sebagainya. Berikut merupakan tabel pelaksanaan program Pemberdayaan Lingkungan Desa/ Kelurahan Model Binaan Gerdu Taskin.

**Tabel 4.5. Alokasi Dana Pemberdayaan Lingkungan (PL)  
Desa/ Kelurahan Model Binaan Gerdu Taskin Evaluasi Tahun 2008**

| No. | Lokasi   | Jumlah Dana                     | Bentuk Kegiatan   |
|-----|--|---------------------------------|---|
| 1.  | Kota Madiun<br>Kec. Taman<br>Kel. Josenan            | Rp 190.000.000                  | Pembangunan jalan aspal, rehabilitas rumah sakit, pembangunan saluran irigasi, kelompok usaha, pavingisasi, pembuatan MCK   |
| 2.  | Kab. Pacitan<br>Kec. Nawangan<br>Ds. Ngromo          | -                               | Pengerasan jalan sepanjang 8 Km   |
| 3.  | Kab. Malang<br>Kec. Jabung<br>Ds. Taji               | -                               | -   |
| 4.  | Kab. Mojokerto<br>Kec. Gondang<br>Ds. Kemasentani    | Rp 66.600.000                   | Makadam jalan sepanjang 2,5 x 200 m dan plengsengan tepi makadam  |
| 5.  | Kab. Banyuwangi<br>Kec. Singojuruh<br>Ds. Gabor      | Rp 50.000.000<br>(dari PemKab.) | Pembangunan <i>showroom</i> sebagai wadah penampung hasil produk usaha pokmas yang berupa beragam kerajinan bordir  |
| 6.  | Kab. Lumajang<br>Kec. Pronojiwo<br>Ds. Pronojiwo     | -                               | -   |
| 7.  | Kab. Kediri<br>Kec. Kayenkidul<br>Ds. Jambu          | -                               | Pengerasan jalan  |
| 8.  | Kab. Sidoarjo<br>Kec. Balongbendo<br>Ds. Penambangan | -                               | Perbaikan pasar desa tetapi dana yang dianggarkan melum dicairkan   |
| 9.  | Kab. Madiun<br>Kec. Balerejo<br>Ds. Kebonagung       | Rp 65.574.000                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaspalan jalan 2,5 x 500 m = Rp 50.574.000,-</li> <li>• Pembangunan jembatan plat (2 unit) = Rp 15.000.000,-</li> </ul> |
| 10  | Kab. Jember<br>Kec. Bangsalsari<br>Ds. Gambirono     | -                               | -   |

Sumber : Data Primer.

Untuk beberapa Desa/ Kelurahan, program Pemberdayaan Lingkungan berjalan sangat efektif dan terarah, bahkan alokasi anggaran juga teridentifikasi dengan jelas. Misalnya saja Desa Kebonagung, Kab. Madiun yang PL nya tergarap dengan jelas termasuk dalam laporannya. Untuk Desa Jambu, Kecamatan Kayen Kidul, Kab. Kediri, program Pemberdayaan Lingkungan berjalan melalui kegiatan Pengerasan Jalan namun tidak teridentifikasi berapa jumlah anggaran yang dialokasikan. Begitu pula halnya dengan Desa Ngromo-Nawangan. Khusus untuk

Kab. Sidoarjo, Kecamatan Balong Bendo, Desa Penambangan, perencanaan terhadap program Pemberdayaan lingkungan sudah berjalan yaitu kegiatan perbaikan pasar dan pendirian beberapa kios namun hal tersebut belum dilaksanakan karena meskipun dana program sudah diajukan namun belum turun sehingga pelaksanaan PL belum terealisasi pada saat survey ini dilaksanakan.

#### **4.1.5. Perkembangan Pelaksanaan program Pengembangan Desa/ Kelurahan Model Binaan Gerdu Taskin**

Setelah berlangsung kurang lebih selama satu tahun, perkembangan Usaha Simpan Pinjam nampak mengalami pasang surut dan berbagai perubahan baik kearah positif atau negatif terkait dengan tujuannya membantu pendapatan usaha masyarakat miskin RTM-B (Rumah Tangga Miskin Berpotensi) dan mengentaskan kemiskinan. Berdasarkan pedoman umum, kegiatan USP (Usaha Simpan Pinjam) merupakan usaha peminjaman dana bergulir kepada masyarakat yang tergolong RTM-B dalam bentuk kelompok. Dengan dana bergulir tersebut kemudian diharapkan akan dapat membantu aspek permodalan warga masyarakat RTM-B dalam mengembangkan usaha mikronya. Karena kondisi sosial dan perekonomian Desa berbeda-beda, tentunya hasil perkembangan dana kegiatan Usaha Simpan Pinjam ini juga berbeda-beda. Hasil Evaluasi yang dilakukan di 10 lokasi desa/kelurahan di Propinsi Jawa Timur ini menunjukkan bukti sebagaimana nampak dalam Tabel di bawah ini. Berikut tabel perkembangan Dana Usaha Simpan Pinjam UPK Program Pengembangan Desa Model Binaan di sepuluh Desa/ Kelurahan.

**Tabel 4.6. Perkembangan Modal Usaha Simpan Pinjam (USP).  
Pengembangan Usaha (PU) Program Pengembangan Desa/ Kelurahan  
Model Binaan Gerdu Taskin Evaluasi Tahun 2008**

| No. | Lokasi   | Modal Awal USP | Perkembangan Modal USP s/d Evaluasi berlangsung | Prosentase Peningkatan Modal |
|-----|--|----------------|---|------------------------------|
| 1.  | Kota Madiun<br>Kec. Taman<br>Kel. Josenan            | Rp 38.850.000  | Rp 65.869.000                                   | 69,55%                       |
| 2.  | Kab. Pacitan<br>Kec. Nawangan<br>Ds. Ngromo          | Rp 68.850.000  | -   | -                            |
| 3.  | Kab. Malang<br>Kec. Jabung<br>Ds. Taji               | -              | -   | -                            |
| 4.  | Kab. Mojokerto<br>Kec. Gondang<br>Ds. Kemasentani    | Rp 77.200.000  | Rp 113.028.000                                  | 46,41%                       |
| 5.  | Kab. Banyuwangi<br>Kec. Singojuruh<br>Ds. Gambor     | Rp 95.250.000  | Kurang dari<br>95.250.000                       | 0%                           |
| 6.  | Kab. Lumajang<br>Kec. Pronojiwo<br>Ds. Pronojiwo     | Rp 99.700.000  | -   | -                            |
| 7.  | Kab. Kediri<br>Kec. Kayenkidul<br>Ds. Jambu          | Rp 96.390.000  | Rp 135.214.500                                  | 40,28%                       |
| 8.  | Kab. Sidoarjo<br>Kec. Balongbendo<br>Ds. Penambangan | Rp 92.620.000  | Rp 121.662.000                                  | 31,36%                       |
| 9.  | Kab. Madiun<br>Kec. Balerejo<br>Ds. Kebonagung       | Rp 68.850.000  | Rp 111.751.000                                  | 62,31%                       |
| 10. | Kab. Jember<br>Kec. Bangsalsari<br>Ds. Gambirono     | Rp 137.700.000 | Rp 183.228.400                                  | 33,06%                       |

Sumber : Data Primer

Berdasarkan data yang tertulis pada tabel di atas maka dapat diambil beberapa kesimpulan:

- Perbedaan tingkat perkembangan modal awal untuk Usaha Simpan Pinjam dikarenakan berbagai kondisi, antara lain: perbedaan kondisi ekonomi, sosial, dan keberhasilan usaha kecil para Pokmas masing-masing.
- Perbedaan besaran bunga yang dibebankan kepada Pokmas

- Kelancaran angsuran yang diberikan Pokmas kepada UPK, serta
- Peran serta aktif Pengurus UPK dan tim fasilitator (Sektap dan TFK) dalam memotivasi Pokmas agar lebih aktif dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan uang pinjaman dan memajukan usahanya.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka beberapa Desa/ Kelurahan yang tidak memiliki permasalahan yang rumit maka dapat mengembangkan Usaha Simpan Pinjamnya. Seperti misalnya Desa Kemasentani, Kecamatan Gondang, Kab. Mojokerto yang berhasil berkembang hingga 62,31%. Dari dana awal sebesar Rp 77.200.000,- menjadi Rp 111.751.000,-, hal ini karena beban bunga yang dikenakan di Desa ini adalah 2% perbulan dengan 10 kali angsuran dan proses pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam juga berlangsung lancar tanpa beban tunggakan yang berarti. Permasalahannya, Di Desa Kemasentani ini terdapat beberapa warga RTM-B yang malahan tidak ingin memanfaatkan dukungan dana pinjaman ini. Hal ini karena ketakutan warga jika tidak sanggup membayar cicilan, padahal sebenarnya Usaha Simpan Pinjam ini dimaksudkan untuk membantu permodalan usaha ekonomi kecil mereka (RTM-B). Memang, jika dibandingkan dengan Desa/ Kelurahan lain, pembebanan bunga Desa Kemasentani terbilang cukup tinggi yaitu 2% dibanding Desa/ Kelurahan dalam studi evaluasi yang lain yang rata-rata hanya 1%.

Untuk itu, diharapkan pengkajian lebih lanjut terhadap *ability to pay* masyarakat terhadap pembebanan besar bunga. Meskipun demikian, masih banyak masyarakat RTM-B Desa Kemasentani ini yang mengharapkan mendapat bantuan dana pinjaman. Menurut pengakuan pengurus UPK, kebutuhan dana untuk tambahan modal merupakan permasalahan pengembangan ekonomi Desa, jadi program ini dirasakan cukup banyak membantu warga.

Kasus di Desa Kemasentani, Kabupaten Mojokerto ini berbeda dengan Desa Gabor, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi. Di desa ini, perkembangan dana Usaha Simpan Pinjam tidak berjalan sama sekali dan ada indikasi akan terus habis dan tidak bergulir. Padahal jika dilihat dari tingkat bunga yang dibebankan



hanya 1,5% untuk 10 kali angsuran dalam sepuluh bulan. Hal ini rupanya terkait karena permasalahan kondisi sosial Desa yang menganggap dana ini sebagai dana hibah dari Pemerintah Pusat atau semacam BLT yang tidak wajib untuk dikembalikan. Padahal proses sosialisasi program pada waktu sebelum pencairan sudah dilakukan, dan jelas menyatakan bukan hibah.

Selain itu, ketidakpercayaan Kepala Desa terhadap Pengurus UPK membuat proses pelaksanaan program menjadi kian rumit karena masyarakat semakin sulit diberi pengertian. Melihat kondisi seperti ini seharusnya tim fasilitator seperti Sektap dan TFK ikut membantu, tetapi pelaksanaan di lapangan menunjukkan sebaliknya. Sehingga, keberlangsungan program makin menjadi suatu masalah yang menemui jalan buntu dan perkembangan program nihil, malahan dana kini terserap habis kepada masyarakat dan hanya beberapa saja yang mau mengangsur.

Kasus lain yang menarik untuk dikaji adalah Pelaksanaan program Pengembangan Usaha Simpan Pinjam di Desa Gambirono, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember. Di Desa ini, pelaksanaan program hanya diupayakan sebagai bentuk kegiatan Usaha Simpan Pinjam sedangkan usaha kemitraan ditiadakan. Dengan demikian jumlah modal awal Rp 137.700.000,- digunakan seluruhnya untuk perkembangan Pokmas dan kini sudah mengalami peningkatan sebesar 33,06% menjadi Rp 183.228.400,-.

Selain permasalahan diatas, para Pokmas juga memiliki alternatif tempat pinjaman lain seperti misalnya bank kredit atau bank-bank swasta. Untuk bank kredit (bank titil), para anggota Pokmas masih ada yang terlibat namun mayoritas telah berhenti karena telah bergabung dengan Program Gerdu Taskin. Hal tersebut dikarenakan beban bunga yang dikenakan terlalu mahal sehingga cukup memberatkan warga Pokmas sendiri. Para UPK sepakat bahwa Program Gerdu Taskin ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan para Pokmas kepada para rentenir atau bank titil karena dirasakan sangat merugikan dan memberatkan masyarakat. Mengenai pinjaman dari bank-bank swasta yang lebih berkompeten, juga menjadi salah satu tempat meminjam bagi para pokmas selain di UPK. Biasanya peminjaman

di bank swasta ini dilakukan oleh Pokmas yang usahanya cukup besar. Beberapa Pokmas malahan mengakui bahwa bunga yang dibebankan oleh bank swasta cukup ringan dibanding dengan di UPK sehingga mereka lebih memilih meminjam di bank swasta dengan jumlah yang lebih banyak dibanding dengan meminjam di UPK dengan bunga ringan tetapi jumlah pinjaman sangat kecil. Tetapi ada juga fakta yang menunjukkan bahwa bunga di UPK lebih besar daripada di Bank swasta. Seorang ketua salah satu Pokmas di Kabupaten Sidoarjo, Desa Kemasentasni mengatakan bahwa pinjaman yang dilakukan di bank swasta dikenai beban bunga 17% sedangkan di UPK dikenai beban bunga 20%.

Untuk mengetahui besaran bunga yang dibebankan kepada masyarakat RTM-B terkait dengan Usaha Simpan Pinjam, berikut ditampilkan tabel penetapan bunga Usaha Simpan Pinjam di sepuluh Desa/ kelurahan sasaran studi evaluasi Program Pengembangan Desa/ Kelurahan Model Binaan Gerdu Taskin.

**Tabel 4.7. Penetapan Bunga Program Usaha Simpan Pinjam Pengembangan Usaha (USP PU) Desa/ Kelurahan Model Binaan Gerdu Taskin Evaluasi Tahun 2008**

| No. | Kabupaten       | Kecamatan,<br>Desa/ Kelurahan          | Besaran bunga dan Intensitas Pembayaran |   |
|-----|-----------------|--|---|---|
|     |                 |  | Pokmas                                  | Kemitraan   |
| 1.  | Kota Madiun     | Kec. Taman<br>Kel. Josenan             | 1%/bulan dalam 12 kali angsuran         | 1% / bulan dalam 12 kali angsuran                                   |
| 2.  | Kab. Pacitan    | Kec. Nawangan<br>Ds. Ngromo            | 2%/ bulan dalam 10 kali angsuran        | 2%/ bulan dalam 10 kali angsuran                                    |
| 3.  | Kab. Malang     | Kec. Jabung<br>Ds. Taji                | -                                       | -   |
| 4.  | Kab. Mojokerto  | Kec. Gondang<br>Ds.Kemasentani         | 2%/ bulan dalam 12 kali angsuran        | 2,5%/ bulan dalam   |
| 5.  | Kab. Banyuwangi | Kec. Singojuruh<br>Ds. Gambor          | 1,5%/ bulan dalam 10 kali angsuran      | 2%/ bulan dalam 10 kali angsuran                                    |
| 6.  | Kab. Lumajang   | Kec. Pronojiwo<br>Ds. Pronojiwo        | -                                       | -   |
| 7.  | Kab. Kediri     | Kec. Kayenkidul<br>Ds. Jambu           | 2%/ bulan dalam 10 kali angsuran        | 2,5%/ bulan dalam 12 kali angsuran                                  |
| 8.  | Kab. Sidoarjo   | Kec.<br>Balongbendo<br>Ds. Penambangan | 1%/ bulan dalam 10 kali angsuran        | 1,5%/ bulan dalam 10 kali angsuran                                  |
| 9.  | Kab. Madiun     | Kec. Balerejo<br>Ds. Kebonagung        | 1,5%/ bulan selama 10 bulan             | 40 (UPK):60 (mitra) dengan intensitas 6 bulan bagi penggemukan sapi |



|     |   |    |      |  |
|-----|---|----|------|--|
| 5.  | Ds. Kemasantani<br>Kab. Banyuwangi<br>Kec. Singojuruh<br>Ds. Gambor | 19 | 96   | Pengrajin bordir   |
| 6.  | Kab. Lumajang<br>Kec. Pronojiwo<br>Ds. Pronojiwo                    | 19 | 152  | Petani, petani salak pondoh, petani bunga lavender   |
| 7.  | Kab. Kediri<br>Kec. Kayenkidul<br>Ds. Jambu                         | 9  | ± 60 | Pedagang sayur mayur, pembuat emping (makanan ringan), peternak lele                       |
| 8.  | Kab. Sidoarjo<br>Kec. Balongbendo<br>Ds. Penambangan                | 11 | 60   | Pedagang kaki lima di Pasar, penjual sayur, jamu, pembuat gorden, pembuat makanan ringan   |
| 9.  | Kab. Madiun<br>Kec. Balerejo<br>Ds. Kebonagung                      | 7  | 68   | Pertanian, peternakan, <i>home industry</i> , bengkel, las, anyaman, pengrajin dompet, dll |
| 10. | Kab. Jember<br>Kec. Bangsalsari<br>Ds. Gambirono                    | 35 | 175  | Budidaya ikan air tawar terutama gurame dan kerajinan anyaman bambu                        |

Sumber : Data Primer.

Berdasarkan data tersebut, telah terlihat perbedaan jumlah penerima dana Usaha Simpan Pinjam UPK di setiap Desa/ Kelurahan sasaran program. Selain itu, karena kondisi sosial, ekonomi, topografi desa/ kelurahan berbeda-beda, usaha kecil yang dikembangkan juga berbeda-beda. Seperti halnya yang telah digambarkan di bagian awal. Misalnya saja yang terdapat di Desa Ngromo, Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan, masyarakat desa ini sesuai dengan kondisi iklim yang cocok untuk pertanian maka banyak anggota Pokmas yang awalnya berprofesi sebagai petani jahe, bahkan jahe khas Pacitan sudah terkenal dengan sebutan jahe gajah. Namun dikarenakan kondisi sosial dan ekonomi yang berubah, dimana petani umumnya dipermainkan oleh para pengepul (tengkulak) dalam segi penjualan (harga jahe) sehingga petani merasa rugi. Untuk itu, para petani banyak beralih ke usaha ekonomi baru yaitu sebagai peternak dan penggemukan kambing. Sehingga mayoritas penduduk dan Pokmas Desa Ngromo ini ( $\geq 50\%$ ) berprofesi sebagai peternak dan penggemukan kambing.

Setelah melihat jumlah keanggotaan kelompok masyarakat pelaku Usaha Simpan Pinjam, berdasarkan studi evaluasi yang telah dilakukan, berikut laporan

perkembangan kelompok masyarakat beserta jumlah anggota pelaku Usaha Simpan Pinjam di Desa/ Kelurahan sasaran program Pengembangan Model Binaan.

**Tabel 4.9. Perkembangan Jumlah dan Anggota Pokmas Pengembangan Usaha Simpan Pinjam Desa Kelurahan Model Binaan Gerdu taskin Evaluasi tahun 2008**

| No  | Lokasi   | Jumlah Awal                        | Jumlah sampai dengan evaluasi       | Prosentase Peningkatan Anggota |
|-----|--|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1.  | Kota Madiun<br>Kec. Taman<br>Kel. Josenan            | 25 pokmas<br>dengan 51<br>anggota  | 80 anggota                          | 61,06%                         |
| 2.  | Kab. Pacitan<br>Kec. Nawangan<br>Ds. Ngromo          | 14 Pokmas<br>dengan 92<br>anggota  | 63 Pokmas<br>dengan 315<br>anggota  | 77,39%                         |
| 3.  | Kab. Malang<br>Kec. Jabung<br>Ds. Taji               | Tidak ada data-                    | Tidak ada data-                     | Tidak ada data                 |
| 4.  | Kab. Mojokerto<br>Kec. Gondang<br>Ds. Kemasantani    | 10 Pokmas<br>dengan 105<br>anggota | 17 Pokmas<br>dengan 195<br>anggota  | 65,00%                         |
| 5.  | Kab. Banyuwangi<br>Kec. Singojuruh<br>Ds. Gabor      | 19 Pokmas<br>dengan 96<br>anggota  | tetap                               | 0,00%                          |
| 6.  | Kab. Lumajang<br>Kec. Pronojiwo<br>Ds. Pronojiwo     | 19 Pokmas<br>dengan 152<br>anggota | 53 Pokmas<br>dengan 424<br>anggota  | 73,60%                         |
| 7.  | Kab. Kediri<br>Kec. Kayenkidul<br>Ds. Jambu          | 9 Pokmas dengan<br>± 60 anggota    | 22 Pokmas<br>dengan ±126<br>anggota | 67,37%                         |
| 8.  | Kab. Sidoarjo<br>Kec. Balongbendo<br>Ds. Penambangan | 11 Pokmas<br>dengan 60<br>anggota  | 42 Pokmas<br>dengan 215<br>anggota  | 78,18%                         |
| 9.  | Kab. Madiun<br>Kec. Balerejo<br>Ds. Kebonagung       | 7 Pokmas dengan<br>68 anggota      | 14 Pokmas<br>dengan 107<br>anggota  | 61,14%                         |
| 10. | Kab. Jember<br>Kec. Bangsalsari<br>Ds. Gambirono     | 35 pokmas<br>dengan 175<br>anggota | 93 Pokmas<br>dengan 341<br>anggota  | 66,08%                         |

Sumber : data primer.

Berdasarkan data tersebut, ternyata perkembangan jumlah keanggotaan Pokmas sangat bervariasi. Dimulai dengan kemacetan usaha yang berujung menurunnya jumlah Pokmas maupun anggotanya hingga pertumbuhan jumlah

Pokmas dan anggota yang mencapai lebih dari 75% atau hampir dua kali lipat. Beberapa angka peningkatan jumlah anggota yang dinilai paling berhasil adalah di Desa Penambangan, Kab. Sidoarjo(78,18%); Desa Ngromo, Kab. Pacitan yang mencapai angka pertumbuhan jumlah anggota hingga 77,39%. Beberapa desa lain yang juga meningkat secara signifikan hingga di atas 55% antara lain adalah Desa Jambu, Kab. Kediri (67,37%) dan Desa Pronojiwo, Kab. Lumajang (73,60%). Namun, peningkatan jumlah anggota Pokmas nampaknya tidak terjadi di Desa Gabor, Singojuruh- Kab. Banyuwangi dimana keanggotaan Pokmas tetap seperti awal program dan tidak ada penambahan anggota yaitu dengan 96 anggota RTM-B dalam 19 Pokmas. Hal tersebut tampaknya merupakan kebijakan bersama para pengurus UPK, sehingga yang ada adalah penambahan jumlah (modal) pinjaman untuk setiap Pokmas bukannya penambahan keanggotaan Program Usaha Simpan Pinjam. Kebijakan para UPK tersebut ternyata didasari kebutuhan para Pokmas yaitu bahwa jumlah pinjaman awal yang diberikan terlalu kecil sehingga para Pokmas mengeluh untuk meminjam nominal yang lebih besar untuk modal usaha.

Meskipun memiliki sektor ekonomi yang cukup beragam di setiap Desa/ Kelurahan sasaran program, namun umumnya setiap Desa/ Kelurahan memiliki usaha unggulan yang merupakan sektor paling potensial di Desa/ Kelurahan tersebut. Indikasi apakah usaha tersebut tergolong potensial atau tidak dapat dilihat dari bagaimana kondisi topografi lokasi, tingkat pemasaran, jumlah masyarakat yang bergelut di bidang tersebut, pemasukan yang dihasilkan serta prospeknya di masa depan. Berikut merupakan tabel potensi unggulan Desa/ Kelurahan sasaran program Model Binaan sesuai dengan hasil studi evaluasi yang telah dilakukan.

**Tabel 4.10. Potensi Ekonomi Unggulan Pokmas Desa/ Kelurahan Model Binaan Gerdu Taskin Evaluasi Tahun 2008**

| No. | Lokasi   | Jenis Usaha yang Berkembang  | Usaha Unggulan                             |
|-----|--|--|--|
| 1.  | Kota Madiun<br>Kec. Taman<br>Kel. Josenan            | Perancangan, penjual makanan siap saji, penjual bunga, bengkel, jamur tiram, pengolah limbah plastik | Jamur tiram                                |
| 2.  | Kab. Pacitan<br>Kec. Nawangan<br>Ds. Ngromo          | Peternak kambing dan penggemukan kambing, petani padi, petani jahe, pedagang, pembuat makanan ringan | Peternak kambing dan penggemukan kambing   |
| 3.  | Kab. Malang<br>Kec. Jabung<br>Ds. Taji               | Petani jagung, pembuat bahan bangunan  | Petani jagung                              |
| 4.  | Kab. Mojokerto<br>Kec. Gondang<br>Ds. Kemasentani    | Penjual dan pembuat samiler, pedagang, petani  | Penjual samiler                            |
| 5.  | Kab. Banyuwangi<br>Kec. Singojuruh<br>Ds. Gabor      | Pengrajin bordir, penjahit pakaian dan anyaman   | Pengrajin bordir                           |
| 6.  | Kab. Lumajang<br>Kec. Pronojiwo<br>Ds. Pronojiwo     | Petani, petani salak pondoh, petani bunga levender   | Petani salak pondoh, petani bunga levender |
| 7.  | Kab. Kediri<br>Kec. Kayenkidul<br>Ds. Jambu          | Pedagang sayur mayur keliling, pembuat makanan ringan emping melinjo, peternak lele                  | Pedagang keliling (sayur mayur)            |
| 8.  | Kab. Sidoarjo<br>Kec. Balongbendo<br>Ds. Penambangan | Pedagang kaki lima di pasar, fotokopi dan rental, penjual jamu, bordir                               | Pedagang kaki lima di pasar                |
| 9.  | Kab. Madiun<br>Kec. Balerejo<br>Ds. Kebonagung       | Pertanian, peternakan, <i>home industry</i> , bengkel, las, anyaman, pengrajin dompet, dll           | Pertanian dan pengepul gabah               |
| 10. | Kab. Jember<br>Kec. Bangsalsari<br>Ds. Gambirono     | Budidaya ikan air tawar terutama gurame dan kerajinan anyaman bambu                                  | Budidaya ikan dan anyaman bambu            |

Sumber : data primer.

Berdasarkan pemaparan tabel tersebut, dapat dilihat sektor-sektor unggulan yang menjadi primadona pengembangan sektor ekonomi di setiap Desa/ Kelurahan. Beberapa Desa/ Kelurahan yang sangat menonjol sektor unggulannya adalah Desa Gabor, Kabupaten Banyuwangi dengan pengrajin bordirnya; Desa Ngromo, Kabupaten Pacitan dengan peternak dan penggemukan kambingnya; Desa Kemasentani, Kabupaten Mojokerto dengan pembuat samilernya dan Desa Kebonagung, Kabupaten Madiun dengan budidaya jamur tiramnya.

Selain usaha simpan pinjam (USP), kegiatan yang juga digalakkan pada program Pengembangan Desa/ Kelurahan Model Binaan Gerdu Taskin adalah Usaha Kemitraan yaitu dengan mengajak masyarakat yang tergolong ke dalam RTM-B namun memiliki usaha yang sangat berpotensi untuk dikembangkan dengan meminjam dana kepada UPK namun dengan system bagi hasil atau beban bunga tertentu atau bermitra. Usaha kemitraan ini juga dilakukan dengan beban bunga yang murah sehingga tidak mempersulit proses perkembangan usaha. Berikut merupakan gambaran bentuk usaha kemitraan yang dilakukan oleh kesepuluh Desa/ Kelurahan Model Binaan.

**Tabel 4.11. Alokasi Dana Kemitraan Pengembangan Usaha (PU)  
Desa/ Kelurahan Model Binaan Gerdu Taskin Evaluasi Tahun 2008**

| No | Lokasi   | Jumlah Pinjaman Dana Kemitraan dan Jenis Usaha Kemitraan  |
|----|--|---|
| 1. | Kota Madiun<br>Kec. Taman<br>Kel. Josenan            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rp 20.000.000,- untuk usaha Pengolahan Limbah Plastik dengan pencairan tahap I Rp 7.500.000,-</li> <li>• Rp 34.000.000,- untuk usaha Jamur Tiram dengan pencairan tahap I Rp 14.000.000,-</li> </ul> |
| 2. | Kab. Pacitan<br>Kec. Nawangan<br>Ds. Ngromo          | Dana kemitraan sebesar Rp 68.850.000,- dengan identifikasi usaha penggemukan kambing  |
| 3. | Kab. Malang<br>Kec. Jabung<br>Ds. Taji               | Tidak teridentifikasi dengan jelas  |
| 4. | Kab. Mojokerto<br>Kec. Gondang<br>Ds. Kemasentani    | Dana kemitraan Rp 63.500.000,- dengan identifikasi usaha pengepul serta pembuat keripik singkong (samiler), pembibitan sayur dan penjual daging ayam. Usaha swakelola air isi ulang dengan pinjaman Rp 3.000.000,-                            |
| 5. | Kab. Banyuwangi<br>Kec. Singojuruh<br>Ds. Gabor      | Masing-masing sebesar Rp 20.000.000 untuk usaha samak kulit ular dan usaha pemasaran produk bordir (Pengepul). Total dana Rp 40.000.000,-   |
| 6. | Kab. Lumajang<br>Kec. Pronojiwo<br>Ds. Pronojiwo     | Jumlah dana Rp 38.000.000,- dengan identifikasi usaha pertanian salak pondoh dan budidaya bunga lavender  |
| 7. | Kab. Kediri<br>Kec. Kayenkidul<br>Ds. Jambu          | Dana kemitraan Rp 41.310.000,- dengan jenis-jenis usaha antara lain: pedagang beras, bengkel atau jasa penggilingan (selep)   |
| 8. | Kab. Sidoarjo<br>Kec. Balongbendo<br>Ds. Penambangan | Total dana kemitraan Rp 45.080.000,- antara lain: pedagang pupuk, pedagang grosir, fotokopi dan rental, penjual jamu, pembuat gorden  |
| 9. | Kab. Madiun  | Dana kemitraan Rp 68.850.000,- dengan bentuk usaha  |



|     |  |  |
|-----|--|--|
|     | Kec. Balerejo<br>Ds. Kebonagung                  | sebagai berikut: penggemukan sapi Rp 33.300.000; dan<br>pemeliharaan induk sapi betina Rp 35.550.000,- |
| 10. | Kab. Jember<br>Kec. Bangsalsari<br>Ds. Gambirono | Jumlah dana tidak teridentifikasi dengan jelas   |

Sumber : Data Primer.

Mengingat bentuk usaha kemitraan merupakan usaha pengembangan ekonomi kecil dengan dana yang terbatas dan jumlah pinjaman yang relatif lebih besar dibanding dengan Pokmas, maka jumlah anggota kemitraan tidak bisa sebanyak anggota kemitraan di setiap Desa/ Kelurahan lokasi Desa/ Kelurahan Model Binaan Gerdu Taskin. Berikut merupakan jumlah pelaku model pinjaman kemitraan di Desa/ kelurahan terkait dan perkembangan jumlah anggota.

**Tabel 4.12. Perkembangan Jumlah Anggota Kemitraan  
Program Pengembangan Desa/ Kelurahan Model Binaan Gerdu Taskin  
Evaluasi Tahun 2008**

|    |   |         |          |
|----|---|---------|----------|
| 1. | Kota Madiun<br>Kec. Taman<br>Kel. Josenan         | 2 orang | 2 orang  |
| 2. | Kab. Pacitan<br>Kec. Nawangan<br>Ds. Ngromo       | -       | -        |
| 3. | Kab. Malang<br>Kec. Jabung<br>Ds. Taji            | -       | -        |
| 4. | Kab. Mojokerto<br>Kec. Gondang<br>Ds. Kemasentani | 7 orang | 5 orang  |
| 5. | Kab. Banyuwangi<br>Kec. Singojuruh<br>Ds. Gambor  | 2 orang | 2 orang  |
| 6. | Kab. Lumajang<br>Kec. Pronojiwo<br>Ds. Pronojiwo  | -       | -        |
| 7. | Kab. Kediri<br>Kec. Kayenkidul<br>Ds. Jambu       | 2 orang | 2 orang  |
| 8. | Kab. Sidoarjo<br>Kec. Balongbendo                 | 1 orang | 13 orang |

|     |                  |         |          |
|-----|------------------|---------|----------|
|     | Ds. Penambangan  |         |          |
| 9.  | Kab. Madiun      | 7 orang | 10 orang |
|     | Kec. Balerejo    |         |          |
|     | Ds. Kebonagung   |         |          |
| 10. | Kab. Jember      | -       | -        |
|     | Kec. Bangsalsari |         |          |
|     | Ds. Gambirono    |         |          |

Sumber : Data Primer.

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat dilihat kondisi perkembangan anggota usaha kemitraan tidak berkembang pesat seperti yang terjadi pada usaha simpan pinjam pokmas. Adapun, hingga sekarang usaha kemitraan yang paling berkembang adalah Desa Penambangan, Kabupaten sidoarjo dengan total 13 orang, padahal awalnya hanya satu orang.

Faktor lain yang dapat menjadi indikasi keberhasilan program ini adalah peningkatan yang terjadi pada modal awal usaha. Bila terjadi peningkatan secara signifikan berarti penerapan Desa Model untuk pengentasan kemiskinan sudah berjalan di Desa/ Kelurahan tersebut namun tentunya dengan dibarengi kondisi-kondisi kondusif lainnya. Untuk itu, sekiranya perlu untuk ditampilkan tingkat perkembangan dana Pengembangan Usaha (PU) di Desa/ Kelurahan sasaran Model Binaan berikut:

Dalam table di bawah ini akan dapat dilihat bahwa jumlah modal awal usaha tersebut memiliki porsi yang berbeda-beda. Beberapa desa memang memiliki jumlah modal awal usaha yang berbeda dengan pedoman yang seharusnya dilakukan. Untuk jumlah modal awal yang lebih kecil dari yang seharusnya yaitu Rp 137.700.000 seperti yang terjadi di Kelurahan Josenan, Kota Madiun, hal ini dikarenakan pemberian modal awal yang dilakukan di Kelurahan tersebut dilakukan secara bertahap. Dan untuk Desa/ Kelurahan lain yang memiliki modal lebih besar dari Rp 137.700.000,- dikarenakan telah mendapat bantuan dana dari berbagai pihak lain seperti dinas-dinas kabupaten, koperasi dan sebagainya sehingga jumlah dana usaha menjadi lebih banyak. Misalnya saja yang terjadi di beberapa Desa/ Kelurahan di beberapa Kabupaten/ Kota dimana dinas koperasi memberikan bantuan dana simpan

pinjam sebesar Rp 20.000.000 yang diserahkan kepada UPK untuk menunjang Usaha Simpan Pinjam yang telah dilakukan.

**Tabel 4.13. Jumlah Perkembangan Dana Pengembangan Usaha (PU) Desa/ Kelurahan Model Binaan Gerdu Taskin Evaluasi Tahun 2008**

| No. | Lokasi   | Jumlah awal    | Jumlah saat evaluasi       | Prosentase peningkatan |
|-----|--|----------------|----------------------------|------------------------|
| 1.  | Kota Madiun<br>Kec. Taman<br>Kel. Josenan            | Rp 83.700.000  | Rp 110.719.000             | 32,28%                 |
| 2.  | Kab. Pacitan<br>Kec. Nawangan<br>Ds. Ngromo          | Rp 152.700.000 | Rp 196.699.000             | 28,81%                 |
| 3.  | Kab. Malang<br>Kec. Jabung<br>Ds. Taji               | -              | -                          | -                      |
| 4.  | Kab. Mojokerto<br>Kec. Gondang<br>Ds. Kemasentani    | Rp 137.700.000 | Rp 219.348.000             | 59,29%                 |
| 5.  | Kab. Banyuwangi<br>Kec. Singojuruh<br>Ds. Gambor     | Rp 137.700.000 | Kurang dari<br>137.700.000 | 0%                     |
| 6.  | Kab. Lumajang<br>Kec. Pronojiwo<br>Ds. Pronojiwo     | Rp 154.190.000 | Rp 184.972.000             | 19,96%                 |
| 7.  | Kab. Kediri<br>Kec. Kayenkidul<br>Ds. Jambu          | Rp 137.700.000 | Rp 175.214.500             | 27,24%                 |
| 8.  | Kab. Sidoarjo<br>Kec. Balongbendo<br>Ds. Penambangan | Rp 137.700.000 | Rp 173.162.000             | 25,75%                 |
| 9.  | Kab. Madiun<br>Kec. Balerejo<br>Ds. Kebonagung       | Rp 137.700.000 | Rp 179.157.000             | 30,11%                 |
| 10. | Kab. Jember<br>Kec. Bangsalsari<br>Ds. Gambirono     | Rp 137.700.000 | Rp 183.228.400             | 33,06%                 |

Sumber : Data Primer

Berdasarkan keterangan dalam tabel diatas, beberapa Desa/ Kelurahan memang terindikasi berhasil meningkatkan dana Pengembangan Usahanya secara signifikan, namun terdapat beberapa Desa yang tampaknya malah tidak berhasil melakukan peningkatan sehingga Pengembangan Usaha pun menjadi terancam.

Berdasarkan pada hal tersebut, Desa Kemasentani tergolong paling berhasil meningkatkan modal usahanya yaitu sebesar 59,29% dibanding dengan Desa/ Kelurahan yang lain. Hal ini bisa jadi dikarenakan selain anggota Pokmas dan kemitraannya cukup berkembang, Desa Kemasentani menerapkan beban bunga yang lebih tinggi dari Desa/ kelurahan lain yaitu 2% untuk Pokmas dan 2,5% untuk kemitraan. Permasalahan terhadap peningkatkan dana tampaknya berada di dua Desa yang cukup jauh dan sulit diakses oleh transportasi. Kedua Desa tersebut adalah Desa Gabor di Kabupaten Banyuwangi dan Desa Taji di Kabupaten Malang. Selain posisi letaknya yang sangat tidak strategis, kedua desa ini memiliki masalah dalam pelaksanaan program Desa Model Binaan. Selain koordinasi pengurus yang tidak terarah, peran tim fasilitator juga tidak berlangsung dengan baik dalam menyelesaikan permasalahan, sehingga pelaksanaan program menjadi terbengkalai dan menciptakan kemandegan. Berdasarkan data tersebut, rata-rata peningkatan modal usaha Program Pengembangan Desa/ Kelurahan Model Binaan Gerdu Taskin diperkirakan kurang lebih 28,61%.

Dalam pelaksanaan program ini, sasaran program yang merupakan RTM memang memerlukan tenaga pembimbing yang dapat secara intensif dan aktif memberikan asistensi dan penjelasan kepada baik RTM hingga Pengurus UPK dan seluruh komponen-komponen terkait lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk, selain memberikan sosialisasi yang terarah terkait dengan program, pelaksanaan program dapat diminimalisir kesalahannya.

Berdasarkan pada pedoman umum, tim pendamping (lembaga independen yang terdiri dari tim dari Universitas maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)) berfungsi sebagai tim asistensi program yang bertugas antara lain:

1. Mendampingi Sektap dalam pengelolaan Program Pengembangan Desa/ Kelurahan Model Binaan
2. Membantu perumusan kebijakan terutama dalam bentuk pedoman umum dan petunjuk teknis operasional

3. Bersama sektap Propinsi, melaksanakan pemetaan awal potensi ekonomi unggulan Desa/ Kelurahan Model Binaan
4. Memfasilitasi orientasi pengelolaan program
5. Membantu monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program.

Mengacu pada pentingnya peran tim pendamping terhadap proses pelaksanaan program, berikut merupakan data Tim Pendamping Program Desa/ Kelurahan Model Binaan berdasarkan hasil studi evaluasi yang telah dilakukan.

**Tabel 4.14. Perguran Tinggi/ Lembaga Swadaya Masyarakat Pendamping dalam Desa/ Kelurahan Model Binaan Gerdu Taskin Evaluasi Tahun 2008**

| No. | Lokasi   | Pendamping   |
|-----|--|--|
| 1.  | Kota Madiun<br>Kec. Taman<br>Kel. Josenan            | - Eni S.<br>Lembaga Kajian dan Pengembangan<br>Potensi Umat<br>- Muji Rahardjo<br>Universitas Merdeka Madiun |
| 2.  | Kab. Pacitan<br>Kec. Nawangan<br>Ds. Ngromo          | Nur Rachma<br>Universitas Muhammadiyah Ponorogo  |
| 3.  | Kab. Malang<br>Kec. Jabung<br>Ds. Taji               | Edi<br>Universitas Brawijaya Malang  |
| 4.  | Kab. Mojokerto<br>Kec. Gondang<br>Ds. Kemasentani    | Sunu<br>Universitas 17 Agustus<br>Ahmad Zainudin (tokoh masyarakat)  |
| 5.  | Kab. Banyuwangi<br>Kec. Singojuruh<br>Ds. Gambor     | Erika<br>Universitas 17 Agustus Banyuwangi   |
| 6.  | Kab. Lumajang<br>Kec. Pronojiwo<br>Ds. Pronojiwo     | DPM<br>Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Umat   |
| 7.  | Kab. Kediri<br>Kec. Kayekidul<br>Ds. Jambu           | Supanji<br>UNIKA   |
| 8.  | Kab. Sidoarjo<br>Kec. Balongbendo<br>Ds. Penambangan | Lutfi dan asisten Yupita dan Dewi<br>Universitas Airlangga Surabaya  |
| 9.  | Kab. Madiun<br>Kec. Balerejo<br>Ds. Kebonagung       | Waris S. M. dan Endang<br>Universitas Merdeka Madiun   |
| 10. | Kab. Jember<br>Kec. Bangsalsari<br>Ds. Gambirone     | Faisol<br>Universitas Islam Jember   |

Kontribusi dan peran tim pendamping dalam setiap desa/ kelurahan ditemukan ternyata berbeda-beda dalam tingkat keaktifannya. Berikut merupakan data kontribusi dan peran tim pendamping, Sektap dan TFK yang dikumpulkan berdasarkan studi evaluasi melalui wawancara mendalam dengan pengurus UPK, perangkat desa/ kelurahan beserta beberapa masyarakat Desa/ kelurahan sasaran program secara langsung.

**Tabel 4.15. Perbandingan Peran Pendamping (PT/ LSM) dan Tim Fasilitasi (Sektap, TFK) dalam Desa/ Kelurahan Model Binaan Gerdu taskin Evaluasi tahun 2008**

| No. | Lokasi  | PT/ LSM Pendamping                      | Nama Pendamping                                     | Peran Pendamping, Sektap, TFK dan Pendukung terkait dalam pelaksanaan program   |
|-----|---|---|---|---|
| 1.  | Kota Madiun<br>Kec. Taman<br>Kel. Josenan         | LSM LKP2U<br>Madiun/<br>UNMER<br>Madiun | Ibu Eni S/<br>Bapak Muji<br>Rahardjo                | Aktif disamping itu, pendamping dari LSM juga sangat aktif dan partisipatif   |
| 2.  | Kab. Pacitan<br>Kec. Nawangan<br>Ds. Ngromo       | UNMUH<br>Ponorogo                       | Ibu Nur Rachma                                      | Baik Tim Pendamping, Sektap maupun TFK tidak memiliki peran (nihil) dalam perkembangan program. Hal ini dikarenakan tidak mudahnya akses menuju Kantor Desa |
| 3.  | Kab. Malang<br>Kec. Jabung<br>Ds. Taji            | UNIBRAW                                 | Bapak Edi   | Tidak berjalan  |
| 4.  | Kab. Mojokerto<br>Kec. Gondang<br>Ds. Kemasentani | UNTAG                                   | Bapak Sunu,<br>Ahmad<br>Zainudin (dr<br>Tokoh Desa) | Peran Sektap sama sekali tidak aktif namun TFK cukup peduli terhadap perkembangan program (dilakukan beberapa kali pengecekan)                              |
| 5.  | Kab. Banyuwangi<br>Kec. Singojuruh<br>Ds. Gabor   | UNTAG<br>banyuwangi                     | Ibu Erika   | Tim Pendamping cukup aktif dengan banyaknya bimbingan yang diberikan, namun Sektap dan TFK tidak aktif sama sekali  |
| 6.  | Kab. Lumajang<br>Kec. Pronojiwo<br>Ds. Pronojiwo  | LSM<br>Pemberdayaan<br>Ekonomi<br>Umat  | DPM   | Kurang begitu aktif dan terlibat dalam perkembangan program, dikarenakan akses Desa yang cukup jauh dari jangkauan  |
| 7.  | Kab. Kediri<br>Kec. Kayen Kidul<br>Ds. Jambu      | UNIKA                                   | Bapak Supanji                                       | Peran Sektap dan TFK tidak terlalu aktif, hanya datang untuk melakukan pengecekan laporan   |
| 8.  | Kab. Sidoarjo<br>Kec.<br>Balongbendo              | UNAIR                                   | Bapak Lutfi,<br>Yupita, Dewi                        | Tidak Aktif, hanya berjalan ketika akan ada monitoring dari Propinsi  |

|     |  |                       |                                   |  |
|-----|--|-----------------------|-----------------------------------|--|
|     | Ds. Penambangan                                  |                       |                                   |  |
| 9.  | Kab. Madiun<br>Kec. Balerejo<br>Ds. Kebonagung   | UNMER<br>Madiun       | Bapak Waris<br>SM & Ibu<br>Endang | Aktif, partisipatif dan akomodatif<br>terhadap pelaksanaan program   |
| 10. | Kab. Jember<br>Kec. Bangsalsari<br>Ds. Gambirono | Univ. Islam<br>Jember | Bapak Faisol                      | Tim Pendamping tidak aktif, tetapi<br>Sektap dan TFK serta Pengawas<br>cukup aktif dan mengerti kebutuhan<br>Desa juga peduli dengan<br>perkembangan pelaksanaan program |

Sumber : Data Primer.

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa latar belakang pelaksanaan yang kurang berhasil salah satu penyebabnya adalah kurang berperannya tim fasilitator dan Tim Pendamping. Mayoritas Pengurus UPK di lokasi monitoring Program Gerdu Taskin Desa/ Kelurahan Model Binaan mengaku kalau selama ini peran Sektap dan TFK yang seharusnya aktif dan membimbing Pengurus tidak berjalan, sehingga pengurus mengupayakan penyelesaian permasalahan dengan cara-cara sendiri yang terbatas. Tak jarang akhirnya permasalahan tidak dapat diselesaikan dan program menjadi macet karena kurangnya koordinasi aktif dengan pihak-pihak yang lebih berkompeten.

Hasil yang telah dipaparkan diatas, merupakan hasil analisis dari situasi evaluasi terhadap pelaksanaan Program Pengembangan Desa Model Binaan Gerdu Taskin Tahun 2008. Berangkat dari berbagai fenomena positif dan negatif diatas, selanjutnya akan diambil beberapa kesimpulan yang nantinya akan diarahkan pada pembuatan beberapa rekomendasi penyelesaian permasalahan.

## 4.2. MODEL PKH.

### 4.2 .1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Secara teoritik maupun praktek, Model pemberdayaan kelompok miskin melalui Program Keluarga Harapan atau yang disingkat PKH, jauh lebih efektif dalam memutus rantai ketergantungan kelompok miskin kepada bentuk-bentuk bantuan Pemerintah -- jika dibandingkan dengan Model Gerdu Taskin (Model Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan) sebagai mana dipaparkan panjang lebar di atas.

Dalam Model PKH, semua peserta program yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi, antara lain; Rumah Tangga Miskin yang memiliki Ibu hamil, atau rumah tangga miskin yang memiliki Ibu baru melahirkan, atau Ibu yang memiliki Balita, dan memiliki anak usia sekolah tetapi DO atau belum sekolah; berhak di daftar menjadi peserta PKH di lokasi Program ini.

Setelah semua persyaratan tersebut terpenuhi, maka disetiap lokasi Program disediakan pusat Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Pendidikan. Filosofi dari Program PKH ini adalah; mengajak peserta untuk hidup sehat, sekaligus mengajak anak-anak RTM (rumah tangga miskin) menjadi pintar (bersekolah). Dalam jangka menengah dan panjang diharapkan keberhasilan program ini mampu memutus rantai kemiskinan dan kebodohan pada generasi ke dua dan seterusnya dalam RTM, sekaligus menghilangkan ketergantungan warga miskin kepada segala bentuk bantuan Pemerintah.

Seperangkat persyaratan yang mampu memberdayakan kelompok miskin dan memutus rantai ketergantungan pada Pemerintah adalah keharusan bagi peserta PHK untuk komit pada ketentuan Program. Dalam salah satu item persyaratan PKH diwajibkan bahwa; (1) anak-anak usia sekolah dari RTM yang sudah mendapat Pelayanan Pendidikan di Sekolah terdekat, wajib memenuhi 80% kehadiran di kelas. Jika anak-anak mereka melanggar komitmen ini maka jumlah bantuan tunai (berupa uang) akan dipotong, sesuai dengan absensi kehadiran. Demikian seterusnya jika



selama satu semester tidak hadir di kelas, maka semua bantuan akan diputus sama sekali. (2) Komitmen yang harus dipenuhi oleh Ibu Hamil, atau Ibu pasca nifas dan Ibu menyusui, antara lain, minum tablet FE, memeriksakan keadaan janin, dan sejumlah ketentuan sehat lainnya. (3) Bagi RTM yang memiliki anak balita wajib melaksanakan penimbangan bayi, imunisasi dan memeriksakan tumbuh kembang anak (balita) di pusat Pelayanan Kesehatan yang ditentukan, dlsnya. (4) Seluruh peserta PKH tidak boleh menggunakan uang bantuan tersebut untuk membeli barang-barang di luar kebutuhan Sekolah anak dan kesehatan. Jika peserta melanggar komitmen ini maka jumlah bantuan tunai akan dikurangi sesuai pelanggaran, hingga akhirnya seluruh bantuan dihentikan sama sekali.

Bagi RTM, jumlah bantuan tunai tersebut sangat besar nilai dan artinya, meskipun setiap RTM memperoleh bantuan berbeda-beda. Ada RTM yang memperoleh bantuan tunai sebesar Rp. 2.800.000 hingga Rp.3.600.000/th, dan ini bergantung pada jumlah anggota keluarga yang memenuhi persyaratan PKH. Dengan persyaratan tersebut para peserta PKH tidak ada yang berani melanggar komitmen yang mereka sepakati. Hasil laporan Pendamping Program PKH juga menunjukkan bahwa hampir tidak ada pelanggaran berarti yang dilakukan oleh peserta PKH (Baca: Laporan Monev PKH, Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur, 2007)

Jadi dalam program PKH ini peserta tidak semata-mata tergantung kepada bantuan, tetapi secara implisit ada semacam tanggung jawab moral yang dibangun di kalangan warga miskin agar mereka bertanggung jawab dan "berjuang" dalam mendapatkan bantuan Pemerintah. Disinilah letak kelebihan Model Pemberdayaan kelompok miskin melalui PKH dibandingkan dengan Model Binaan Gerdu Taskin. Sama seperti Model Gerdu Taskin, program PKH ini juga melibatkan berbagai Instansi Pemerintah hingga LSM di tingkat Pelaksana, dengan Dinas Sosial sebagai *leading sector*-nya. Sementara Bapemas Propinsi Jawa Timur menjadi *leading sector* Model Binaan Gerdu Taskin

## BAB 5

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### 5.1. Kesimpulan

Kuantitas dan kualitas keberhasilan pelaksanaan Program Pengembangan Desa/ Kelurahan Model Binaan Gerdu Taskin di sepuluh Desa/ Kelurahan sasaran di Propinsi Jawa Timur ditentukan oleh banyak faktor baik itu kondisi sosial dalam masyarakat, perkembangan ekonomi dan kelompok usaha, peran pengurus UPK, peran tim fasilitator (Sektap dan TFK masing-masing), para Tim Pendamping baik dari Perguruan Tinggi maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (PT/ LSM), Badan Pengawas Desa dan komitmen semua pihak yang terkait langsung dengan Program ini dilokasi sasaran. Adanya adat bekerjasama yang kuat dalam masyarakat serta didukung komitmen bersama akan mampu membawa perubahan yang lebih baik bagi Desa/ Kelurahan Model Binaan. Tingkat kemandirian masyarakat ini sangat tergantung pada kondisi setempat sebagai latar belakang permasalahannya. Menyadari keterbatasan kemampuan berbagai Instansi/ sektor yang terlibat dalam program Pengembangan Desa/ Kelurahan Model Binaan maka pendekatan pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan sendiri merupakan pilihan yang menarik.

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, ada beberapa kesimpulan dapat tarik antara lain sebagai berikut :

1. Dilihat dari kinerja , kontribusi serta kemampuan masing-masing Lembaga Pendamping (Perguruan Tinggi/LSM) dalam melakukan fasilitasi pengembangan Desa/Kelurahan untuk menjadikan Desa/Kelurahan sebagai Model Pengentasan Kemiskinan Terpadu serta mewujudkan Laboratorium Pengembangan Desa yang sifatnya terpadu, mayoritas PT/LSM belum memenuhi tujuan Program sesuai yang diharapkan. Harus diakui, bahwa memang ada dua-tiga Perguruan

Tinggi/LSM yang memiliki komitmen cukup besar terhadap keberhasilan Program ini, sebagaimana ditunjukkan oleh data hasil studi Evaluasi ini. Beberapa alasan yang menyebabkan rendahnya peran sebagian besar PT/LSM Pendamping di lokasi Program, adalah karena jarak tempuh ke lokasi Binaan yang tidak “pas” Misalnya, Tim PTS dari Ponorogo harus melakukan Pendampingan ke Ngromo-Nawangan – Pacitan. Dari sisi jarak dan waktu tempuh saja -- sudah sangat tidak efisien, sehingga menyebabkan keengganan anggota Tim untuk datang ke lokasi apa lagi harus berkali-kali. Disamping itu, kendala waktu juga menjadi sebab penting lainnya mengapa program Pendampingan tidak berjalan. Artinya, ketika program ini digulirkan, kontrak dengan PT/LSM yang bersangkutan sudah berakhir lebih dulu. Sehingga secara yuridis dan psikologik tidak ada alasan bagi PT/LSM untuk melanjutkan pekerjaannya.

2. Secara umum kinerja, kontribusi dan kemampuan Sektap Kabupaten /Kota serta TFK Pendamping di dalam melaksanakan fasilitasi Pengembangan Desa/Kelurahan -- menjadi Model Pengentasan Kemiskinan melalui Gerakan Terpadu antar elemen Dinas dan masyarakat -- nampaknya masih jauh dari harapan. Bahkan secara ekstrim sebenarnya peran Sektap dan TFK Pendamping di sebagian besar lokasi Program (kecuali di Kab./Kota Madiun) TIDAK jalan alias PASIF. Banyak sebab dan kendala yang ditemukan sebagai alasan tidak berfungsinya Sektap dan TFK Pendamping di lokasi Program. Ada tiga faktor penyebabnya yakni, akibat pergantian Pejabat lama dengan Pejabat baru; koordinasi yang buruk serta rendahnya komitmen di antara Pejabat tersebut terhadap Program ini. Pejabat lama nampak seperti enggan memberikan tanggung jawab kepada Pejabat baru tentang apa dan bagaimana Program Pengembangan Desa Model ini harus dikerjakan di wilayahnya.

Kenyataan ini ternyata tidak hanya terjadi di tingkat Sektap/TFK saja, bahkan sampai ke tingkat UPK (seperti yang terjadi di Desa Gabor-Singojuruh- Banyuwangi) Gagalnya Program seringkali terjadi karena ; saat sosialisasi Program, Pejabat A yang hadir -- tetapi ketika saat implementasi Program berjalan, Pejabat B yang ditugasi yang nota bene tidak tahu menahu soal Program tersebut.

3. Hasil studi ini menemukan bahwa, hampir seluruh responden yang menerima Program ini (Pengembangan Desa/Kelurahan Model Binaan Gerdu Taskin) mengaku bahwa semenjak ikut Program ini , pendapatan rata-rata mereka mengalami peningkatan, meski sangat bervariasi. Artinya, dengan pinjaman modal bergulir yang lebih kecil, maka peningkatan pendapatan mereka juga kecil. Demikian pula sebaliknya. Tetapi yang menjadi masalah sebenarnya adalah, munculnya anggapan dari sebagian kelompok masyarakat yang menganggap bantuan bergulir ini sebagai Hibah yang tidak perlu dikembalikan. Terhadap kondisi semacam ini, pihak BAPEMAS seharusnya mulai mencari ketentuan baru yang memiliki “daya memaksa” agar para peserta Program mematuhi persyaratan yang ditentukan.
4. Secara umum, kemampuan UPK di dalam mengelola keuangan dan pengembangan usaha produktif anggota Pokmas di 10 lokasi Program dapat disimpulkan, bahwa 9 dari 10 UPK tergolong mampu. Meskipun demikian, jika dibuat ranking maka kemampuan UPK dalam mengelola keuangan nampak bervariasi (lihat: Tabel 4.13), mulai dari sangat tinggi hingga kemampuan rendah (atau tidak mampu mengelola usaha; contoh Desa Gabor-Singojuruh-Banyuwangi) Beberapa pengurus UPK mengaku banyak mendapat bantuan pengajaran dari pendamping baik dalam pelaksanaan maupun pembuatan laporan. Bahkan UPK di Kabupaten Sidoarjo mengaku

bahwa laporan awal merupakan hasil kerja dari pendamping. Ada UPK yang kurang begitu terlibat dalam hal tersebut sehingga sedikit mengalami kesulitan dalam hal membuat laporan ketika tidak ada pendamping.

5. Bahwa kemampuan unit-unit usaha Pokmas dalam menyerap tenaga kerja lokal sejak terbentuk di awal Program hingga setahun berjalan cukup besar. Kenyataan ini nampak dari data dalam Tabel 4.9. di muka Kecuali Pokmas di Desa Gabor kec. Singojuruh – kabupaten Banyuwangi, maka hampir semua unit-unit usaha Pokmas di lokasi Program telah mampu menyerap tenaga kerja lokal. Meskipun tidak dapat dinyatakan secara eksplisit bahwa besaran penyerapan tenaga kerja lokal dalam Program ini sebagai ukuran penurunan jumlah RTM, akan tetapi kecenderungan ini pada gilirannya akan mampu mencapai tujuan penurunan RTM dalam jangka menengah dan jangka panjang.
6. Hampir semua responden di lokasi Program mengaku bahwa Program pemberdayaan Pokmas melalui Pengembangan Desa Model Binaan Gerdu Taskin ini sangat bermanfaat, terutama jika dilihat dari kemampuan program ini dalam “menangkal” jeratan hutang yang dilakukan oleh para Rentenir atau Pelepas uang di pedesaan. Dengan adanya dana bantuan bergulir dari Program ini, mayoritas anggota Pokmas merasa sangat “terbantu” dan menjadi lebih “berdaya” dibandingkan dengan dana pinjaman dari Rentenir (*bank titil*) yang menjerat mereka ke dalam lingkaran hutang (bunga berbunga) yang menyebabkan mereka jatuh miskin tidak berdaya.

Kedepan yang perlu dipikirkan menjadi sasaran program adalah bagaimana upaya meningkatkan kapasitas kelembagaan UPK, bagaimana meningkatkan kapasitas SDM dan langkah apa saja yang akan dilakukan dan diupayakan, bagaimana proses mengembangkan usaha UPK. Disamping itu agenda lain yang perlu dipikirkan juga adalah bagaimana mengembangkan usaha RTM, bagaimana bentuk pengembangan

sarana dan prasarana UPK serta pengembangan sistem keterjaminan sosial melalui UPK dan sebagainya. Dalam proses penguatan tersebut, masing-masing Desa/ Kelurahan dituntut untuk secara lebih mandiri mengupayakan tercapainya target-target tersebut, melalui mekanisme yang sederhana dan mudah diikuti semua Pokmas.

Berdasarkan tujuan pencapaian peningkatan kapasitas kelembagaan UPK, Pelembagaan UPK ini dimaksudkan akan mengarah pada target selanjutnya, yaitu proses pengembangan usaha UPK melalui kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan kemitraan dengan beban bunga rendah agar usaha menjadi terus berkembang dan produktif. Tentu saja, hal tersebut digulirkan dengan bunga yang sesuai dengan *ability to pay* masyarakat RTM-B. Peningkatan SDM dapat dilakukan dengan pemberian pelatihan baik dalam pengembangan usaha, proses produksi, pelatihan kewirausahaan hingga proses pemasaran yang diberikan kepada anggota oleh Pengurus UPK atau dengan sistem Bapak Angkat.

Hasil studi evaluasi menunjukkan beberapa UPK telah berhasil mengembangkan usahanya; yang dapat dilihat dari adanya peningkatan jumlah keanggotaan Pokmas dan kemitraan, peningkatan modal usaha, penemuan sektor ekonomi baru, pemberdayaan masyarakat melalui usaha swakelola dan pembangunan sarana dan prasarana melalui dana *sharing*. Namun, terdapat juga Desa/ kelurahan yang tidak berhasil pada tahap penguatan ini, yaitu Desa Taji, Kabupaten Malang dan Desa Gabor, Kabupaten Banyuwangi dimana pelaksanaan program mengalami kemacetan karena antara anggota Pokmas, pengurus UPK serta perangkat desa tidak terjalin komunikasi sehat dan koordinasi yang baik dalam proses pelaksanaan program. Akibatnya dana Gerdu Taskin yang telah digulirkan menjadi sia-sia dan tidak berkelanjutan. Salah satu kesalahan mendasar yang melatar belakangi hal ini adalah kurangnya kesadaran pihak-pihak yang terlibat akan pentingnya bantuan yang sifatnya berkelanjutan bukan bantuan langsung yang bersifat *charity* seperti pada konsep PM (Pemberdayaan Manusia) untuk RTM-r (Rumah Tangga Miskin Rentan). Pemahaman tersebut tentunya dapat dibangun jika terdapat komunikasi dan

koordinasi yang baik dan sehat antara Pengurus UPK dan Perangkat Desa terkait sehingga dalam pelaksanaannya bisa saling mendukung.

Beberapa kesimpulan di atas merupakan kondisi yang terbaca dalam lokasi monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan. Permasalahan kompleks yang muncul dilapangan seperti; tidak berkembangnya perguliran dana dan lemahnya ethos kerja antara para pengurus dan pengawas program Gerdu Taskin merupakan beberapa persoalan yang perlu dikaji lebih mendalam dan dicari jalan keluarnya. Untuk itu, berikut ini beberapa kelemahan dari Model Pemberdayaan kelompok miskin melalui Program Gerdu Taskin dapat ditunjukkan antara lain ;

1. Model ini tidak dirancang berdasarkan hasil kajian yang spesifik dan mendalam, tentang apa dan bagaimana seharusnya kelompok miskin tersebut diberdayakan.
2. Model pemberdayaan Gerdu Taskin sangat *“economic oriented”* dan dirancang secara *“top down planning”*, sehingga kurang memperhatikan potensi dan aspirasi kelompok yang akan diberdayakan.
3. Sosialisasi dari model Gedu Taskin sangat kurang dan bahkan tidak ada, sehingga tidak begitu dikenal oleh kelompok sasaran.
4. Dukungan biaya di tingkat operasional (pelaksana) Program ini; tidak jelas dan ada kecenderungan menganggap sebagai bagian dari Tupoksi Dinas. Banyak aktivitas pendukung program yang tidak berjalan karena minimnya dana operasional program ini.
5. Tidak adanya *“reinforcement”* bagi para peserta program, sehingga tidak ada sanksi yang dapat diberlakukan kepada peserta program yang gagal atau tidak patuh (tidak taat) dalam mencapai tujuan program.
6. Sasaran program Gerdu Taskin, hanya terbatas pada kelompok masyarakat yang sudah memiliki usaha (ekonomi produktif) sehingga kelompok masyarakat yang tidak memiliki usaha (dagang) tidak tersentuh oleh Model program ini.

## 5.2. Usulan Model Pemberdayaan

Dengan membandingkan dua Model Pemberdayaan, antara Model Gerdu Taskin dan Model Program Keluarga Harapan (PKH) berikut segala kelemahan dan kelebihan masing-masing, maka Model efektif yang diusulkan dari hasil studi ini adalah sebagai berikut :

Model pemberdayaan kelompok miskin pedesaan, sebaiknya dirancang melalui hasil kajian yang spesifik dan mendalam (berorientasi *bottom up*), terutama untuk mengetahui aspirasi dan potensi yang dimiliki oleh kelompok calon sasaran. Aspek pemberdayaan sebaiknya tidak hanya berorientasi pada peningkatan ekonomi saja, akan tetapi meliputi juga perbaikan pendidikan dan kesehatan kelompok sasaran.

Ketiga aspek tersebut harus menjadi sasaran Pemberdayaan kelompok miskin pedesaan, yang memiliki orientasi jangka pendek (aspek ekonomi), jangka menengah (aspek kesehatan) dan jangka panjang (aspek pendidikan) guna memutus rantai kemiskinan antar generasi kelompok miskin dan menuju pemberdayaan.

Model pemberdayaan yang diusulkan ini dapat mengadopsi bagian-bagian yang penting dan terbukti bermanfaat bagi upaya pemberdayaan kelompok miskin pedesaan, antara lain; adanya sanksi bagi peserta program yang tidak komitmen terhadap pencapaian tujuan program, kewajiban-kewajiban peserta program yang harus ditaati, serta masuknya unsur pendidikan, agar tertanam dalam diri peserta, bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang baik haruslah melalui usaha dan kerja keras.

## 5.3. Rekomendasi Untuk Gerdu Taskin

Berangkat dari kesimpulan dan pemaparan hasil evaluasi tersebut, maka beberapa saran dan langkah yang dapat direkomendasikan adalah:

- ❖ Hendaknya segala bentuk pengambilan keputusan terhadap keseluruhan kegiatan dalam Pengembangan Desa/ Kelurahan Model Binaan dilakukan dengan keterlibatan aktif seluruh masyarakat melalui rembug warga yang



diselesaikan secara musyawarah mufakat. Hal ini dapat dipergunakan sebagai modal yang potensial dalam pemberdayaan masyarakat. Perihal permasalahan pergantian kepemimpinan Desa/ kelurahan hendaknya dapat diantisipasi dengan pemberian informasi ulang mengenai program kepada Kepala Desa baru yang terpilih oleh UPK dan difasilitasi oleh Sektap dan TFK. Sehingga tidak terjadi kompleksitas permasalahan lain yang berujung pada berhentinya upaya pencapaian Desa Model Binaan seperti yang terjadi di Desa Taji, Kabupaten Malang dan Desa Gabor, Kabupaten Banyuwangi.

- ❖ Upaya untuk menghindari terjadinya kemacetan dalam pengguliran dana pemberdayaan masyarakat adalah dengan mempertimbangkan menggunakan model pemberdayaan yang dapat dikembangkan secara mandiri. Misalnya dengan melakukan usaha-usaha kecil swakelola seperti yang dilakukan di Desa Kemasentani dengan membuat usaha Air Isi Ulang sehingga, program dapat berkembang dan bahkan menyerap tenaga kerja dan kejadian merugikan seperti di Desa Ngromo kabupaten Pacitan tidak perlu terjadi yaitu dipermainkan oleh tengkulak (petani jahe), namun Desa Ngromo ini juga bisa dibilang cukup kreatif terbukti dari perpindahan usaha warga menjadi peternak dan budi daya ternak kambing. Budi daya tanaman jahe sebenarnya merupakan sektor potensial di Nawangan, karena itu perlu ada strategi lain untuk tetap dapat mempertahankan produksi jahe ini sebagai usaha potensial masyarakat. Misalnya, dengan menjalin kerjasama kelembagaan (MoA) dengan Pabrik Pengolah permen Jahe atau Pabrik Jamu ataukah dengan pihak Eksportir . Sudah tentu syarat kualitas, kontinuitas dan ketersediaan Jahe dalam jumlah besar tetap harus dipenuhi. Inilah tantangan dan sekaligus peluangnya.
- ❖ Selain bentuk pembuatan usaha bersama seperti pengisian air minum yang dilakukan oleh UPK Desa Kemasentani, Kabupaten Mojokerto. Bentuk usaha lain yang bisa diadopsi adalah pembentukan koperasi desa misalnya, yang menjual beberapa keperluan anggota RTM seperti gabah, bahan-bahan

produksi atau alat-alat produksi sehingga anggota tidak perlu merasa harus bergantung pada tengkulak dan secara mandiri mampu mengembangkan usahanya dengan bergantung pada koperasi bersama. Modal awal usaha dapat dilakukan dengan mengajukan hal tersebut pada Kabupaten, dinas-dinas kabupaten, alokasi hasil bunga program Gerdu Taskin dan sebagainya. Penciptaan koperasi dan adanya usaha simpan pinjam yang telah berjalan nantinya diharapkan akan mampu membawa Desa/ Kelurahan menjadi lebih mandiri dan menciptakan suatu lembaga yang lebih terintegrasi seperti Bank Umum Desa (BUMDes). Selain itu, secara sistematis akan ada penyerapan tenaga kerja baru, akibat perkembangan usaha bersama itu.

- ❖ Disamping hal tersebut, persoalan mendasar yang biasanya dialami oleh para anggota RTM adalah sulitnya melakukan pemasaran sehingga tidak jarang usaha yang telah dilakukan sulit berkembang karena minimnya wawasan para anggota akan strategi pemasaran yang jitu. Hal tersebut seharusnya bisa diatasi dengan bantuan dinas-dinas Kabupaten terkait seperti dinas perindustrian, perdagangan bahkan pariwisata. Selain itu, untuk melepas ketergantungan terhadap tengkulak, pihak UPK juga sebaiknya memberikan alternatif seperti pembentukan jaringan pasar bersama yaitu pihak yang bertugas sebagai fasilitator antara pengrajin dan pasar dan berkoordinasi dibawah UPK, sehingga bisa saling menguntungkan.
- ❖ Pemberian kemudahan ekonomi dan peluang-peluang sosial bagi masyarakat miskin khususnya baik RTM-R maupun RTM-B (Rumah Tangga Miskin Rentan dan Berpotensi). Pemberian kemudahan-kemudahan ekonomi dapat dilakukan dengan bantuan modal pinjaman yang lebih besar dengan memanfaatkan bantuan dan dukungan dari dinas-dinas/ instansi-instansi Daerah terkait. Pemberian dukungan terhadap perkembangan sektor ekonomi masyarakat miskin misalnya dalam bentuk pelatihan kewirausahaan, pemasaran, bimbingan motivasi dan sebagainya dengan bekerjasama dengan dinas/ instansi Daerah, dengan perangkat Daerah dan dengan pihak-pihak

yang berpengalaman dibidangnya. Pemberian peluang-peluang sosial dapat dilakukan dengan pemberian perlakuan dan kebutuhan sosial yang memihak kepada masyarakat miskin baik dalam hal akses peningkatan ekonomi, pendidikan, kesehatan atau usaha peminjaman, pemberian keahlian dalam mengelola usaha secara mandiri dan usaha menggali potensi usaha baru dan sebagainya.

- ❖ Meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap kesinambungan program. Kedepan, perlu dipikirkan pula untuk menemukan mekanisme yang dapat mengikat komitmen peserta Program (anggota-anggota Pokmas) setelah mereka menerima bantuan dana pinjaman bergulir Program ini. Seperti yang diterapkan pada Program Keluarga Harapan (PKH) BAPPENAS, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Dinas Sosial Propinsi; bahwa setiap peserta program harus komit terhadap kewajibannya sebagai peserta yang telah menerima bantuan. Jika mereka mangkir dari kewajibannya, maka ada sanksi pengurangan jumlah bantuan dan bahkan sampai pemutusan bantuan, jika peserta Program tidak memenuhi kewajibannya. Mekanisme semacam ini ternyata sangat efektif untuk “memaksa” peserta Program untuk “taat” dan patuh terhadap semua ketentuan Program PKH. Oleh karena itu, agar tidak terbentuk citra bahwa Bantuan pinjaman dana bergulir melalui Desa Binaan Gerdu Taskin sebagai dana Hibah, maka BAPEMAS perlu memikirkan mekanisme “memaksa” peserta Program agar komit terhadap kewajibannya. Dengan demikian, *sustainability* Program ini akan dapat tetap dijaga, sehingga tujuan akhir Pengentasan Kemiskinan bukan lagi sebatas harapan semata.
- ❖ Untuk mengatasi keterbatasan pengetahuan para pengurus UPK dan buruknya koordinasi serta peran Sektap dan TFK, maka adanya kegiatan pendampingan lanjutan tampaknya mampu menjadi solusi terhadap permasalahan tersebut. Artinya, diturunkannya pendamping ke Desa/ kelurahan terkait untuk membantu memecahkan permasalahan yang ada. Selain itu, karena ini

menyangkut usaha pemandirian desa maka pihak pemerintah Kabupaten dan DPRD seharusnya memiliki inisiatif lebih besar untuk mengadakan pembinaan rutin ke bawah. Sehingga selain permasalahan yang ada dapat dipecahkan bersama, penyebaran bentuk usaha serupa bisa dilakukan di Desa/Kelurahan lain dalam lingkup Kabupaten yang bersangkutan .

- ❖ Sesuai dengan pedoman umum, maka suku bunga yang dibebankan pada usaha simpan pinjam yang dilakukan kepada UPK harusnya tidak memberatkan nasabahnya. Untuk itu, sebaiknya dilakukan penetapan suku bunga yang wajib digunakan/ diterapkan terhadap usaha tersebut. Besaran bunga tidak menutup kemungkinan untuk berbeda, tentunya hal itu disesuaikan dengan *ability to pay* masyarakat anggota program itu sendiri di Kabupaten masing-masing.
- ❖ Mengenai beberapa Desa yang mengalami kemacetan seperti misalnya Desa Taji di Kabupaten Malang tampaknya perlu pendampingan lebih serius lagi. Tidak adanya pengawasan membuat program sama sekali tidak berjalan bahkan kini dana bergulir juga tidak terdeteksi jumlahnya. Secara umum, melihat kondisi Desa Taji yang sangat sulit diakses, kemungkinan membuat para Sektap maupun TFK malas untuk meninjau lokasi. Sehingga tidak ada koordinasi dengan desa tersebut. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan, tidak ada kesiapan pengurus UPK (salah satu indikasinya adalah tidak adanya kemampuan Ketua UPK untuk mengelola program, dimana Ketua UPK sama sekali tidak tahu menahu perihal pelaksanaan program Gerdu Taskin) untuk mengelola program Gerdu Taskin, sehingga pencabutan atau pengalihan dana tersebut kepada Desa yang lebih mampu tampaknya akan membuat dana menjadi lebih bermanfaat dan tidak terbuang sia-sia.

## **BAB 6**

### **PENUTUP**

Demikian Laporan Hasil Studi Evaluasi ini disusun dengan segala kekurangannya tetapi dengan tujuan mampu menjadi masukan dan berkontribusi terhadap upaya pencapaian sasaran Program. Dengan demikian Tujuan terutama dalam memutus rantai kemiskinan dan ketergantungan kepada segala bentuk bantuan Pemerintah dapat tercapai. Dari kesimpulan penelitian ini diketahui bahwa dibandingkan dengan Model Binaan Gerdu Taskin, maka Model Pemberdayaan kelompok miskin melalui PKH jauh lebih efektif hasilnya. Pengembangan Desa/Kelurahan Model Binaan Gerdu Taskin yaitu pengentasan kemiskinan dengan orientasi pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kemandirian masyarakat miskin nampak kurang berhasil karena tidak adanya kekuatan yang memaksa kelompok miskin untuk berusaha dan berjuang dengan motivasi dan kekuatan sendiri, dalam mengatasi kemiskinannya. Segala kekurangan tentunya akan menjadi koreksi yang positif bagi hasil studi evaluasi yang telah dilakukan ini. Untuk itu, masukan yang membangun sangat diharapkan guna menyempurnakan hasil studi ini.

\* \* \*

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, Melly G. Tan dan Selo Sumardjan, 1980. *Kemiskinan Struktural; Suatu Bunga Rampai*, Jakarta ; Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial dan HIPIIS
- Ala, Andre Bayo, 1981. *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*, Yogyakarta; Penerbit Liberty.
- Chambers, Robert, 1987. *Pembangunan Desa Dimulai dari Belakang* , Jakarta ; Penerbit LP3ES
- Dewanta, Awan Setya, dkk., 1995. *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia* , Yogyakarta ; Penerbit Aditya Media.
- George, Vic dan Paul Welding , 1992 . *Ideologi dan Kesejahteraan Rakyat*, Jakarta ; Penerbit Grafiti Press.
- Korten, David, C dan Sjahrir, 1988. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, Jakarta ; Penerbit Yayasan Obor Indonesia.
- Mas'ud Mochtar, 1994 . *Politik, Birokrasi dan Pembangunan* , Yogyakarta ; Penerbit Pustaka Pelajar.
- Rachbini, Didik J, dkk., 1995 . *Negara dan Kemiskinan di Daerah* ; Jakarta ; Penerbit PT. Sinar Harapan.
- Sayogyo, 1977 . *Usaha Perbaikan Gizi Keluarga* , Bogor ; Penerbit Lembaga Penelitian Sosiologi Pedesaan, Institut Pertanian Bogor.
- Singarimbun, Masri., dan David H Penny, 1976 . *Penduduk dan Kemiskinan ; Kasus Sriharjo di Pedesaan Jawa* , Jakarta ; Penerbit Bhratara Karya Aksara.
- Siahaan Hotman , 1990 . *Masyarakat Desa ; Suatu Uraian Tentang Struktur Sosial Petani yang Sedang Berubah* , Surabaya ; FISIP – Universitas Airlangga.
- Suparlan , Parsudi, (ed), 1984 . *Kemiskinan di Perkotaan* , Jakarta ; Yayasan Obor Indonesia dan PT.Sinar Harapan.

Suyanto, Bagong , 1999. Evaluasi Pelaksanaan Inpres Bangdes , Surabaya ;  
Kerjasama Direktorat Bangdes Propinsi Jawa Timur dan  
LPPM – Unair.

Wignjosoebroto, Soetandyo , dkk., 1992 . Pemantapan Definisi Masyarakat Rentan di  
Kota Madya Surabaya , Kerjasama FISIP – Unair dan  
Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) Jakarta

<http://www.worldbank.org/htm> - *social policy and Governance – Activities in  
Indonesia*, diakses tanggal 14 September 2001

\* \* \*

## LAMPIRAN



**CURRICULUM VITAE****I. Data Pribadi**

1. Nama : Prof. Dr. Ida Bagus Wirawan
2. Tempat/Tgl lahir : Jembrana- Bali, 31 Agustus 1949
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Hindu Dharma
5. Pekerjaan Pokok : Dosen FISIP - Univ. Airlangga BHMN
6. NIP. : 130 701 136
7. Pangkat/Gol : Pembina Utama Madya Gol. IV/d
8. Jabatan : Guru Besar
9. Alamat Kantor : Jl. Dharmawangsa Dalam - Surabaya
10. No Tlp Kantor : 031 -5034015 , Fax. 031 5012442.
11. Tempat Tinggal : Jl. Semolowaru Tengah 16/5 Surabaya (031 - 5948605)

**II. Riwayat Pendidikan**

1. SR (6 th) tamat th. 1963 di Jembrana-Bali
2. SMP Negeri - tamat th. 1966 di Jembrana-Bali
3. SMA Negeri 2, tamat th 1969 di Denpasar - Bali
4. Fakultas Sosial & Politik Universitas Gadjah Mada 1970/71. lulus 23 Maret 1976
5. Pendidikan tambahan selama winter semester 1974-1975 di Johan Wolfgang Goethe Universiteit- 6 Frankfurt/main- Deutschland
6. Program Magister Kependudukan 1984 lulus th.1987 di Universitas Gadjah Mada - Yogyakarta
7. Program Doktorat (S 3) Ilmu Sosial th. 2000/2001 di Universitas Airlangga, lulus tgl 03 Agustus 2006

**III. Riwayat Pekerjaan dan Jabatan**

1. Tanggal 1 April s/d 29 Oktober 1977; PNS Gol II/d pada Bagian Personalia Pemerintah kabupaten Sleman - Daerah Istimewa Yogyakarta
2. TMT 20 Nopember 1977- Januari 1978, sebagai tenaga pembantu Panitia Presidium Pembentukan Fakultas Ilmu Sosial (FIS) - Universitas Airlangga
3. TMT 1 Januari 1979 diangkat menjadi CPNS dgn tugas Dosen Tetap pada FIS-Unair
4. TMT 1 Mei 1980 diangkat menjadi PNS dengan jabatan Asisten Ahli Madya Gol. III/a pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga - Surabaya
5. TMT 1 April 1983 diangkat menjadi Asisten Ahli Gol. III/b pada FISIP- Unair
6. TMT 1 Oktober 1985 diangkat menjadi Lektor Muda Gol. III/c pada FISIP - Unair
7. TMT 1 April 1990 diangkat menjadi Lektor Madya Gol. III/d pada FISIP- Unair
8. TMT 1 Oktober 1994 diangkat menjadi Lektor Gol IV/a pada FISIP- Unair
9. TMT 1 Januari 2001 diangkat menjadi Lektor Kepala Gol.IV/b FISIP- Unair
10. TMT 1 Oktober 2005 diangkat menjadi Pembina Utama Muda Gol IV/c pada FISIP Unair
11. Diangkat sebagai Pejabat Eselon II dengan tugas Pembantu Dekan III pada FISIP-Unair  
Masa bhakti 1992 - 1995

12. TMT 2008 Diangkat menjadi Ketua Departemen Sosiologi-FISIP Unair periode 2008- 2011

#### IV. Kegiatan Pendidikan dan Pengabdian

1. Tahun 1980 s/d 1981 atas nama LP3ES Jakarta, diangkat menjadi *Area Manager* Proyek Monitoring dan Evaluasi *Kampoeng Improvement Programm* (KIP) versi WR Soepratman di Surabaya (Kerjasama LP3ES Jakarta dan World Bank)
2. Tahun 1982 - 2002, menjadi Dosen luar biasa pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia - Surabaya, untuk mataajaran Metode Penelitian Survey.
3. Tahun 1984 - 1994 menjadi Dosen luar biasa pada Fakultas Ekonomi Universitas Surabaya untuk mataajaran Sosiologi Politik
4. Tahun 1985 - 1991 menjadi Dosen luar biasa pada FISIP- Universitas Wijaya Kusuma untuk mataajaran Masalah dan Kebijakan Kependudukan ; Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
5. Tahun 1986 - 2000 menjadi Dosen luar biasa pada FISIP- Universitas WR Supratman untuk mataajaran Demografi Sosial, Pengantar Sosiologi dan Metode Penelitian Sosial
6. Tahun 1987 - 1991 menjadi Dosen luar biasa pada FIA Universitas 17 Agustus 1945 untuk mataajaran Demografi Sosial dan Pengantar Sosiologi.
7. Tahun 2001 - sekarang, menjadi Dosen pada Program Pasca Sarjana - Universitas Airlangga
8. Tahun 2003 - 2005, menjadi Anggota Tim Ahli pada SubDin Bantuan dan Perlindungan Sosial - Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur
9. Pelatihan Sertifikasi dan Ujian Nasional Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah-Keppres No. 80/2003 ; Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat - Universitas Airlangga Surabaya, 3 s/d 5 Juli 2007 (sebagai peserta)

#### V. Pengalaman Penelitian

1. Pengaruh Status Wanita Terhadap Penerimaan Norma Keluarga Kecil di Kota Surabaya, tahun 1993 Lemlit - Unair (Peneliti Utama)
2. Mekanisme *Survival* dan Pola *Remittance* Migran Sirkuler di Kota Surabaya, 1993 Lemlit - Unair (Peneliti Utama)
3. Kondisi dan Situasi yang Mempengaruhi Terminasi Pelayanan Panti di Lingkungan Panti Sosial Propinsi Jawa Timur tahun 1995 Kerjasama Departemen Sosial RI - LPKM-Unair (Peneliti Utama)
4. Studi Evaluasi Mobilitas Penduduk di wilayah Jawa Timur, tahun 1997.Kerjasama Bappeda Propinsi Jawa Timur dan Lemlit -Unair (Peneliti Utama)
5. Studi tentang Dukungan Keluarga dan Komunitas terhadap Lansia di Jawa Timur, tahun 1999. Kerjasama Departemen Sosial RI dan PPKP-Lemlit Unair ,(Peneliti Utama)
6. Pola Pengembangan Jaringan Usaha dan Pemasaran Bagi Usaha Kecil di Jawa Timur,tahun 1999 Kerjasama Bappeda Propinsi Jawa Timur dan FISIP- Unair (Anggota Peneliti)

7. Penyusunan Program Penerapan Iptek untuk Pengembangan UKM Minyak Atsiri Kenanga di Kabupaten Blitar, tahun 1999, kerjasama Bappeda Kab. Blitar dan LPKM-Unair (Anggota Peneliti)
8. Kaji Tindak Pengembangan Kesejahteraan Anak dan Remaja Melalui Kegiatan Produktif di Panti Sosial di Jawa Timur, tahun 2000, kerjasama Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur dan LPKM-Unair (Peneliti Utama)
9. Kaji Tindak Pengembangan Jaringan Usaha dan Pemasaran Produk Unggulan Kerupuk Udang di Kabupaten Gresik, tahun 2000, kerjasama Bappeda Propinsi Jawa Timur dan LPKM-Unair (Peneliti Utama)
10. Aspek Sosial-Ekonomi dan Budaya, Hubungannya dengan Tingkat Kematian Ibu Hamil (Bumil) di Kab. Bojonegoro, tahun 2000, SubProyek kerjasama WHO, *Safe Motherhood*, RS.Dr. Soetomo, BKKBN Prop. Jawa Timur dan Lemlit-Unair (Peneliti Utama)
11. Respon Masyarakat Ujung Pangkah - Kabupaten Gresik terhadap Rencana *Exploration and Pipeline* Pengeboran Minyak Blok Pangkah I, tahun 2000, kerjasama Primer Oil USA, PPLH- Lemlit - Unair (Peneliti Utama)
12. Studi Kelayakan Penerapan dan Pengembangan Teknologi di Kabupaten Pamekasan, tahun 2000, kerjasama Balitbangda Kab. Pamekasan dan Lemlit-Unair (Peneliti Utama)
13. Inventarisasi Masalah Kemiskinan Dalam Rangka Gerakan Nasional Pengentasan Kemiskinan di Kab. Tulungagung, tahun 2001, kerjasama Bappeda Kab. Tulungagung dan FISIP- Unair (Peneliti Utama)
14. Peran dan Fungsi Karang Wredha Bagi Lansia di Jawa Timur, tahun 2001, kerjasama Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur dan LPKM-Unair (Anggota Peneliti)
15. Penyusunan Index Pembangunan Manusia di Kab. Sampang, tahun 2002, kerjasama Bappeda Kab. Sampang dan Lemlit- Unair (Peneliti Utama)
16. Studi Sosial-Ekonomi Daya Beli Masyarakat di Kabupaten Pamekasan, tahun 2002, kerjasama Balitbangda Kab. Pamekasan dan Lemlit - Unair (Anggota Peneliti)
17. Penyusunan Dokumen Kontribusi Sektor Perikanan dan Kelautan Kab. Sidoarjo, tahun 2002, kerjasama Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Sidoarjo dan Lemlit - Unair (Anggota Peneliti)
18. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kota Batu 2003-2007, kerjasama Bappeko Kota Batu dan FISIP- Unair (Peneliti Utama)
19. Penyusunan Rencana Pengembangan Potensi Obyek Wisata (RPPOW) Daerah Kab. Mojokerto, tahun 2002, kerjasama Bappeda Kab. Mojokerto - Lemlit Unair (Peneliti Utama)
20. Kajian tentang Penanganan Keluarga Miskin (GAKIN) oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Era Otonomi Daerah, tahun 2003, kerjasama Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur - LPKM-Unair (Peneliti Utama)
21. Penyusunan Informasi Kelayakan Investasi Daerah Kabupaten Sampang, tahun 2003, kerjasama Bappeda Kab. Sampang - Lemlit Unair (Anggota Peneliti)
22. Kajian tentang Pengelompokan Jenis Ketrampilan Panti, pada 4 Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) di wilayah Kerja Dinas Sosial Prop. Jawa Timur 2004 kerjasama Dinas Sosial Prop. Jawa Timur - LPKM- Uniar (Peneliti Utama)
23. Studi Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Pengungsi di Pulau Madura, tahun 2004, kerjasama Dinas Sosial Prop. Jawa Timur - FISIP- Unair (Peneliti Utama)

24. Peran dan Fungsi Pelayanan Pekerja Sosial pada Panti Sosial Tresna Wredha di Jawa Timur, tahun 2004, kerjasama Dinas Sosial Prop. Jawa Timur - LPKM - Unair (Peneliti Utama)
25. Migrasi Internasional Tenaga Kerja Indonesia Asal Jawa Timur; Studi tentang Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan dan Kegagalan TKI di Luar Negeri, tahun 2004, kerjasama Dirjen PPTKLN Depnakertrans RI dan Lemlit-Unair (Peneliti Utama)
26. Penyusunan Rencana Pengembangan Sarana dan Prasarana Obyek Wisata di Kepulauan Karimun Jawa 2004 - 2007, Kerjasama Balitbang Propinsi Jawa Tengah dan Lemlit - Unair (Ketua Peneliti)
27. Pengembangan UKM Melalui Diversifikasi Design Untuk Meningkatkan Produk dan Peluang Investasi di Kab. Pamekasan, tahun 2005, kerjasama Balitbangda Kab. Pamekasan - Lemlit - Unair (Peneliti Utama)
28. Kajian Pemetaan Daerah Rawan Bencana Sosial di Propinsi Jawa Timur Buku I, tahun 2006 Kerjasama Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur dan FISIP- Unair (Peneliti Utama)
29. Kajian Pemetaan Daerah Rawan Bencana Sosial di Propinsi Jawa Timur, Buku II, tahun 2007. Kerjasama Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur dan FISIP Unair-BHMN (Peneliti Utama)
30. Penyusunan Model Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial "GEPENG" di Jawa Timur, 2006 Proyek swakelola Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur (Anggota Peneliti)
31. Evaluasi Dampak Program Pengembangan Desa/Kelurahan Model Binaan Gerdu Taskin Kerjasama dengan Perguruan Tinggi/LSM Propinsi Jawa Timur, 2007. Kerjasama antara BAPEMAS dan LPPKM- Unair BHMN (Ketua Peneliti)
32. Evaluasi Dampak Program Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL) di Propinsi Jawa Timur, Kerjasama BAPEMAS Propinsi Jawa Timur dan LPPKM-Unair BHMN th. 2007. (Ketua Peneliti)

## VI. Ceramah, Lokakarya dan Penataran

1. Seminar Regional Profil Sosio-Budaya Dalam Keluarga dan Komunitas Lansia di Jawa Timur, Surabaya- Oktober 1999, kerjasama BKKBN-Pusat, PPKP-Lemlit-Unair (sebagai Moderator)
2. Seminar tentang Perubahan Sosial dan Dampaknya Terhadap Perilaku Generasi Muda di Jawa Timur, Surabaya, Agustus 2001, Dinas Pemuda dan Olah Raga Prop. Jawa Timur (sebagai Pembicara)
3. Seminar Nasional "*Modelling Asian Urban Population -Environment Dynamics*" kerjasama Unair dan ILHD, 26 Nopember 2004 (sebagai Peserta)
4. Seminar Nasional "*Pemberdayaan Manusia Indonesia yang Mandiri, Demokratis dan Berbudaya*", kerjasama Universitas Airlangga dan ILHD, 2004 (Sebagai Peserta)
5. Lokakarya "*Pemberdayaan Lansia yang Sehat dan Mandiri*" pada Peringatan Hari Lansia Internasional di Kanwil BKKBN - Jawa Timur, 2000 (sebagai Peserta)
6. *Workshop on Development of I.E.C. Materials on Ageing, collaboration between BKKBN Pusat- WHO and PPKP-Lemlit - Unair (October 2000<sup>th</sup>) as principal Investigator*
7. Pelatihan Materi KIE Tentang Dukungan Keluarga dan Komunitas Terhadap Lanjut Usia, bagi Staf Widya Iswara Kanwil BKKBN Prop. Jawa Timur, Surabaya, 1999 (sebagai Asisten Instruktur)

8. Lokakarya Perumusan Kebijakan Urbanisasi di Jawa Timur, Menuju Era Otonomi Daerah, kerjasama Bappeda Prop. Jawa Timur, 2000 (sebagai Pembicara)
9. Pelatihan Staf Widya Iswara Prop. Jawa Timur, tentang "Sistem Evaluasi dalam Pelatihan" kerjasama Pusdiklat Prop. Jawa Timur, Surabaya, 5- 7 September 2004 (sebagai Pembicara)
10. Pelatihan Staf Widya Iswara Prop. Jawa Timur, tentang " Sistem Evaluasi dalam Pelatihan" kerjasama Program Studi PSDM - Pasca Sarjana - Unair dan Pusdiklat Prop. Jawa Timur di Surabaya 5- 7 September 2004 (sebagai Pembicara)
11. *Workshop on Research Proposal Writing in Reproductive Health*, Surabaya, Desember 1999, kerjasama BKKBN dan WHO (sebagai Peserta)
12. *Workshop on Safe Motherhood*, kerjasama Pusat studi Kesehatan Reproduksi- Lemlit Unair, RS.Dr. Soetomo, Dinas Kesehatan Prop. Jawa Timur dan WHO, di Bojonegoro, 31 Oktober s/d 3 Nopember 2000 (sebagai Pembicara)
13. Lokakarya Applied Aproach (AA) Pekerti, tanggal 15 - 19 Mei 2006 di P4UA (Pusat Peningkatan dan Pengembangan Pendidikan Universitas Airlangga (sebagai Peserta).
14. Pemberdayaan Warga Lanjut Usia di Kota Surabaya, Disajikan dalam Forum Reboan Dewan Kota Surabaya, tgl , 27 Juni 2007 di Kampus Biru UHT-Surabaya (sebagai Pembicara)
15. Migrasi Orang Batak dari *Bona Pasogit ke Parserahan*, Seminar Nasional Peringatan Satu Abad Wafatnya Pahlawan Nasional Sisingamangaraja XII, di Universitas Tanjung Pura bekerjasama dengan Forum Komunikasi Masyarakat Batak Propinsi Kalimantan Barat; Pontianak, tgl. 19 s/d 21 Juli 2007, (sebagai Pembicara)

#### VII. Publikasi Ilmiah.

1. *Metode Penelitian Sosial (co-Author)*, Penerbit Airlangga University Press, 1998
2. *Pekerja Anak di Jawa Timur (co-Author)*, Penerbit Airlangga University Press, 1999
3. *Perencanaan dan Strategi Pembangunan (co-Author)*, Penerbit Jember- University Press, 2000

#### VIII. Penghargaan.

1. Penghargaan sebagai Dosen Teladan I tingkat Fakultas, 12 Juni 1991
2. Penghargaan sebagai Dosen Teladan II tingkat Universitas Airlangga, 17 Agustus 1991
3. Satya Lencana Kesetiaan 10 tahun dan 20 tahun dari Pemerintah Republik Indonesia, 2004

Surabaya, November 2009

(Prof. Dr. Ida Bagus Wirawan, SU)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### I. Identitas

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. Nama lengkap        | : Tuti Budirahayu, Dra., Msi.                                       |
| 2. NIP                 | : 132014465   |
| 3. Pangkat/Golongan    | : Lektor/ III C   |
| 4. Tempat & tgl. Lahir | : Jakarta, 12 Mei 1968  |
| 5. Agama               | : Islam   |
| 6. Alamat Rumah        | : Sidosemo PDK 5A/kav.44, Surabaya, 60239                           |
| 7. Fakultas            | : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik                                      |
| 8. Program Studi       | : Sosiologi   |
| 9. Telepon             | Kantor : 031-5034015<br>Rumah : 031-8499774<br>Ponsel : 0811-324450 |
| 10. E-mail             | : Tutibudirahayu@yahoo.com  |

### II. Riwayat pendidikan tinggi :

| No | Strata | Gelar | Institusi                           | Bidang    | Lulus Tahun |
|----|--------|-------|-------------------------------------|-----------|-------------|
| 1. | S-1    | Dra.  | FISIP Universitas Airlangga         | Sosiologi | 1991        |
| 2. | S-2    | Msi.  | Pasca Sarjana Universitas Indonesia | Sosiologi | 1998        |

### III. Kursus/Pelatihan :

| No | Macam Kursus/Pelatihan   | Status  | Tempat/Penyelenggara  | Tahun |
|----|--|---------|---|-------|
| 1. | Pelatihan Program Pendekatan Terapan/Applied Approach (AA)                 | Peserta | Surabaya, P4 Universitas Airlangga  | 1999  |
| 2. | Pelatihan Analisis Gender dan Hak Azasi Manusia                            | Peserta | Surabaya, Pusat Studi Wanita, Lembaga Penelitian Unair                        | 2001  |
| 3. | Kursus Metodologi Penelitian Kualitatif dan <i>The Ethnograph</i>          | Panitia | Surabaya, FISIP Unair   | 2001  |
| 4. | Pelatihan Metode Penelitian Kualitatif untuk Analisis Situasi Ibu dan Anak | Peserta | Jakarta, UNICEF   | 2001  |
| 5. | Pelatihan Karya Tulis Ilmiah /Jurnal Ilmiah                                | Peserta | Surabaya, Jurusan Antropologi Universitas Indonesia dan The Toyota Foundation | 2002  |
| 6. | Workshop Poverty Research Competition                                      | Peserta | Kantor Perwakilan Bank Dunia Jakarta  | 2004  |

### IV. Pengalaman Penelitian :

| No | Tahun | Judul Penelitian   | Asal Dana      | Keterangan       |
|----|-------|--|----------------|------------------|
| 1. | 1993  | Proses Sosialisasi dan Interaksi Sosial yang Terjadi di Sekolah dan Hubungannya dengan Terbentuknya Modernitas Siswa | DIP/OPF Unair  | Ketua Peneliti   |
| 2. | 1994  | Studi Kelayakan Pemakaian Briket Batu Bara pada Industri Kecil dan Rumah-rumahan di Wilayah Jawa Timur               | PT. Bukit Asam | Team Leader      |
| 3. | 1994  | Profil Keluarga Sejahtera dan Pra Sejahtera di Daerah Pertanian dan Nelayan Jawa Timur                               | ISI dan BKKBN  | Anggota peneliti |

|     |      |   |   |                  |
|-----|------|---|---|------------------|
| 4.  | 1998 | Rencana Siswa SMU untuk Melanjutkan Pendidikan ke Jenjang yang Lebih Tinggi   | TMPD  | Ketua Peneliti   |
| 6.  | 2000 | Analisis Tentang Peran Lembaga Pendidikan Pra Sekolah pada Pencapaian Prestasi Belajar Anak-anak di Sekolah Dasar                           | DIP UNAIR                                     | Ketua Peneliti   |
| 7.  | 2000 | Studi Tentang Penyusunan Model Organisasi Usaha Kecil yang Inovatif dalam Upaya Memberdayakan Industri Kecil                                | DIK Suplemen UNAIR                            | Ketua Peneliti   |
| 8.  | 2000 | Peran Sera Lembaga Non Pemerintah dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat di Bidang Pelayanan   | BALIT-BANGDA Jawa Timur                       | Anggota Peneliti |
| 9.  | 2001 | Studi Tentang Pola Pemilihan Jurusan Di Perguruan Tinggi yang Dikaitkan dengan Rencana Pilihan Pekerjaan pada Siswa-siswa SMU               | DIK Suplemen UNAIR                            | Ketua Peneliti   |
| 10. | 2001 | Mengidentifikasi penyebab Kematian Ibu dan Merumuskan Upaya Menurunkan Angka Kematian Ibu (Maternal Mortality Rate) pada Masyarakat nelayan | DIK Rutin UNAIR                               | Anggota peneliti |
| 11. | 2001 | Kajian Dinamika Sosial: Studi tentang Integrasi dan Wacana Pluralitas dalam Masyarakat Transisional   | MEN-RISTEK                                    | Anggota peneliti |
| 12. | 2001 | Studi UKL dan UPL untuk PT. Premier Oil di Ujung Pangkah, Gresik  | PT.Premier Oil                                | Anggota Peneliti |
| 13. | 2001 | <i>Rapid Qualitative Assessment</i> untuk Analisis Situasi Ibu dan Anak di Lima Kabupaten di Jawa Timur                                     | UNICEF  | Anggota Peneliti |
| 14. | 2002 | Studi Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kota Batu, Jawa Timur  | BAPEKO Batu                                   | Anggota Peneliti |
| 15. | 2002 | Analisis Model Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Tingkat Sekolah Dasar dalam Upaya Mewujudkan Pengelolaan Sekolah yang Otonom             | Lemlit Unair                                  | Ketua Peneliti   |
| 16. | 2003 | Kajian tentang Penanganan Keluarga Miskin Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Era Otonomi Daerah   | Dinas Sosial Prop. Jawa Timur dan FISIP Unair | Anggota Peneliti |
| 17. | 2003 | Efektivitas Peran Peer Educator di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah dalam Menanggulangi Resiko Reproduksi Remaja                           | Lemlit Unair                                  | Ketua Peneliti   |

#### V. Tulisan yang dipublikasikan :

| Tahun | Judul Tulisan  | Media Publikasi  | Author/Co-Author |
|-------|--|--|------------------|
| 1999  | "Aspirasi Siswa SMU dan Orang Tuanya tentang Pendidikan dan Pekerjaan"   | Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, tahun XII nomor 3 | Author           |
| 2000  | "Studi Korelasi Tentang Prestasi Akademis Siswa di Sekolah Dasar yang Dikaitkan dengan Latar Belakang Keluarga dan Pengalaman Belajar Siswa Sebelum Masuk Sekolah" | Jurnal Wacana Pendidikan Sekolah Dasar, Vol.1, no.1          | Author           |
| 2000  | "Masih Perlu Profesionalisme bagi Guru Sekolah Dasar? (Menyongsong Otonomi Pendidikan Daerah di Bidang Pendidikan)",   | Jurnal Wacana Pendidikan Sekolah Dasar, Vol.1, no. 3         | Author           |

|      |  |  |        |
|------|--|--|--------|
| 2002 | "Menggagas Model Pendidikan Alternatif Yang Dialogis untuk Anak-Anak Jalanan"                  | HAKIKI, Vol. 3   | Author |
| 2004 | Buku Sosiologi Untuk SMA   | Surabaya Intellectual Club                                   | Author |
| 2004 | "Kritik terhadap Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah dalam Menyongsong Otonomi Pendidikan " | Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, tahun XVII nomo 3 | Author |

### VII. Seminar / Presentasi :

1. Menjadi pembicara pada Workshop dengan tema: Pendidikan sebagai suatu Transformasi Sosial yang Berwawasan Gender di tingkat Sekolah Dasar, diselenggarakan oleh Pusat Studi Wanita Universitas Airlangga, 15 Mei 2002.
2. Menjadi pembicara pada Seminar, dengan tema: Strategi Pendidikan Indonesia Masa Depan dalam Menghadapi Kompetisi Ekonomi Global, diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya, 18 Mei 2002.
3. Menjadi tutor pada Workshop dengan tema: Studi Sosiologi untuk Guru-Guru SMU, diselenggarakan oleh Pusat Penataran Ilmu-Ilmu Sosial untuk Guru-Guru SMU, Departemen Pendidikan Nasional, 15 Oktober 2002.

### VIII. Lain-Lain :

- Pernah menjadi Konsultan Propinsi untuk UNICEF pada tahun 2001 dalam Studi *Rapid Qualitative Assesment* tentang Analisis Situasi Ibu dan Anak di lima Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
- Pernah menjadi Konsultan Propinsi untuk UNICEF pada tahun 2002 untuk kegiatan Monitoring dan Evaluasi Lima Program di enam kabupaten/kota di Jawa Timur.
- Aktif mengajar dalam bidang studi: Sosiologi Pendidikan, Statistik Sosial, Metodologi Penelitian Sosial, dan Sosiologi Penyimpangan
- Memperoleh penghargaan (*prize*) dari World Bank perwakilan Jakarta dalam kompetisi penulisan proposal Poverty Research Competition, pada tahun 2004

Surabaya; April 2009

(Dra Tuti Budirahayu, Msi)



## CURRICULUM VITAE

- Nama Lengkap : Drs. Doddy Sumbodo Singgih, M.Si
- NIP : 131406096
- Tempat, Tanggal lahir : Yogyakarta, 28 Mei 1959
- Agama : Islam
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Pangkat, Golongan : Pembina Utama Muda, Golongan IV/c
- Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- Alamat Kantor : FISIP Unair, Jl. Airlangga 4 - 6 Surabaya 60286  
Telepon : (031) 5034015  
Faksimili : (031) 5012442  
Email : fisip@unair.ac.id
- Alamat Rumah : Jl. Medayu Selatan 14/N-9, Surabaya 60295  
Telepon : (031) 870-5605  
HP : 0813-3167-9090  
Faksimili : (031) 870-5605  
Email : doddy\_fisip@unair.ac.id
- **Riwayat Pendidikan**
  - Tahun 1971 : Lulus SD Negeri Batang III, Batang, Jawa Tengah
  - Tahun 1974 : Lulus SMP Negeri III Yogyakarta
  - Tahun 1977 : Lulus SMA Negeri I Yogyakarta
  - Tahun 1983 : Lulus S1 Jurusan Sosiologi FISIP UGM Yogyakarta
  - Tahun 1994 : Lulus S2 Program Studi Sosiologi Pedesaan, Program Pasca-sarjana IPB, Bogor
  - Tahun 2007 : Sedang mengikuti Program Doktor Sosiologi di FISIP UGM
- **Riwayat Pelatihan**
  - Tahun 1985 : Mengikuti Latihan Prajabatan (LPJ) Tingkat III
  - Tahun 1988 : Mengikuti Penataran P4 Pola 120 Jam + Korpri
  - Tahun 1984 : Mengikuti Pelatihan Teori "An Overview of Sociological Theory at This Time (1984) and of Related Matters"
  - Tahun 2003 : Mengikuti Pelatihan Pelatih Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (PP - LKMM) Tingkat Dasar Universitas Airlangga Surabaya
  - Tahun 2003 : Mengikuti Pelatihan Orientasi Pengembangan Pembimbing Kema-hasis-waan (OPPEK) Universitas Airlangga Surabaya
  - Tahun 2005 : Mengikuti Lokakarya Penyusunan/Redisain GBPP, SAP dan Kontrak Pembelajaran
  - Tahun 2006 : Mengikuti Lokakarya Applied Approach (AA)

- **Riwayat Jabatan Fungsional**
  - Tahun 1984 : Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
  - Tahun 1985 : Menjadi Asisten Ahli Madya
  - Tahun 1989 : Menjadi Asisten Ahli
  - Tahun 1997 : Menjadi Lektor Muda
  - Tahun 2000 : Menjadi Lektor Madya
  - Tahun 2001 : Menjadi Lektor
  - Tahun 2003 : Menjadi Lektor Kepala
- **Riwayat Jabatan Struktural**
  - Tahun 2002 - 2007 : Menjadi Pembantu Dekan III FISIP Unair Surabaya
- **Pengalaman Jabatan (lainnya)**
  - Tahun 2001 - sekarang: Menjadi anggota Komisi Penilai Penelitian (KPP) pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Unair Surabaya
  - Tahun 2002 - sekarang: Menjadi Pemimpin Redaksi (Pimred) jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik FISIP Unair Surabaya
  - Tahun 2004 : Menjadi Ketua Delegasi Mahasiswa Unair Surabaya dalam PIMNAS XVIII di STT Telkom - Bandung
  - Tahun 2004 - sekarang: Menjadi Station Manager Radio Airlangga FM, Unair Surabaya
  - Tahun 2005 : Menjadi Ketua Delegasi Mahasiswa Unair Surabaya dalam PIMNAS XIX di Universitas Andalas - Padang - Sumatera Barat
- **Pengalaman Mengajar**
  - Tahun 1983 - 1984 : Mengajar matakuliah Sistem Sosial (Program S1)
  - Tahun 1983 - 1991 : Mengajar matakuliah Sistem Masyarakat Indonesia (Program S1)
  - Tahun 1983 - 1991 : Mengajar matakuliah Sosiologi Industri (Program S1)
  - Tahun 1983 - sekarang: Mengajar matakuliah Tipologi Sosial (Program S1)
  - Tahun 1984 - sekarang: Mengajar matakuliah Sosiologi Pedesaan (Program S1)
  - Tahun 1994 - 1996 : Mengajar matakuliah Metode Penelitian Sosial (Program S1)
  - Tahun 1994 - sekarang: Mengajar matakuliah Masyarakat Pedesaan dan Perkotaan (Program S2)
  - Tahun 1994 - sekarang: Mengajar matakuliah Perencanaan Penelitian (Program S2)
  - Tahun 2004 - sekarang: Mengajar matakuliah Stratifikasi Sosial (Program S1)
  - Tahun 2005 - sekarang: Mengajar matakuliah Masalah-masalah Sosial (Program S1)

## ▪ Pengalaman Penelitian

1. Tahun 1983/1984 : Anggota peneliti tentang "National Urban Development Strategy" (UNDP, Jakarta)
2. Tahun 1984 : Anggota peneliti tentang "Organisasi Sosial dan Perilaku Warga Masyarakat dalam Menanggulangi Masalah Sampah" (Bappeda Tingkat II Kota Madya Surabaya)
3. Tahun 1983/1984 : Anggota peneliti tentang "Struktur Sosial Kebudayaan Masyarakat Tepian Kota" (DIP Unair Surabaya)
4. Tahun 1984/1985 : Anggota peneliti tentang "Studi Motivasi Belajar pada Berbagai Lapisan Masyarakat" (DIP Unair Surabaya)
5. Tahun 1984/1985 : Anggota peneliti tentang "Pengaruh Keanekaragaman Struktur Kehidupan Masyarakat Tepian Kota terhadap Derajat Urbanisasi" (DIP Unair Surabaya)
6. Tahun 1985/1986 : Anggota peneliti tentang "Pergeseran Orientasi Penggunaan Pola Konsumsi Di Daerah Pinggiran Kota" (DIP Unair Surabaya)
7. Tahun 1985/1986 : Ketua peneliti tentang "Sikap Konsumtif Masyarakat Kota" (DIP Unair Surabaya)
8. Tahun 1986/1987 : Anggota peneliti tentang "Program Komunikasi - Informasi - Edukasi (KIE) dan Perubahan - Sikap - Praktek (PSP) Ibu-ibu Di Kabupaten-kabupaten Propinsi Jawa Timur yang Mengikuti Program KB-Gizi Terpadu" (USAID-BKKBN Propinsi Jawa Timur)
9. Tahun 1986/1987 : Ketua peneliti tentang "Studi Evaluasi Program Pengembangan Area (PPA) di Kabupaten-kabupaten Di Wilayah Eks Karesidenan Madura Selama Pelita III" (Bappeda Dati I Propinsi Jawa Timur)
10. Tahun 1987/1988 : Anggota peneliti tentang "Pengembangan Sektor In-formal sebagai Alternatif Penyerapan Tenaga Kerja Di Jawa Timur" (Bappeda Dati I Propinsi Jawa Timur)
11. Tahun 1987/1988 : Anggota peneliti tentang "Monitoring Bantuan Ke-camatan Rawan Di Kabupaten Dati II Gresik" (Kandep Bangdes Kab. Dati II Gresik)
12. Tahun 1987/1988 : Anggota peneliti tentang "Praktek Keluarga Berencana (KB) Di Lingkungan Pasangan Usia Subur (PUS) Muda Di Daerah Perkotaan" (SPP/DPP Unair Surabaya)
13. Tahun 1988/1989 : Anggota peneliti tentang "Monitoring Bantuan Kecamatan Rawan Di Kabupaten Dati II Gresik" (Kandep Bangdes Kab. Dati II Gresik)
14. Tahun 1988/1989 : Anggota peneliti tentang "Faktor-faktor Pendukung Percepatan Pencapaian Desa Swasembada Di Jawa Timur" (Bappeda Dati I Jawa Timur)
15. Tahun 1988/1989 : Ketua peneliti tentang "Pola Kepemimpinan pada Masyarakat Desa: Sebuah Studi Sosiologi tentang Implementasi UU No. 5/1979" (SPP/DPP Unair Surabaya)
16. Tahun 1988/1989 : Ketua peneliti tentang "Peranan Kader KB-Gizi dalam Kegiatan Penimbangan (Pokbang) Balita" (SPP/DPP Unair Surabaya)

17. Tahun 1988/1989 : Anggota peneliti tentang "Pergeseran Peran Wanita pada Etnis Madura: Suatu Studi Di Lingkungan Pusat Industri Rungkut" (SPP/DPP Unair Surabaya)
18. Tahun 1989/1990: Anggota peneliti tentang "Pengembangan Sektor Informal sebagai Alternatif Penyerapan Tenaga Kerja di Kotamadya Surabaya" (SPP/DPP Unair Surabaya)
19. Tahun 1989/1990: Ketua peneliti tentang "Dinamika Ekologi Kota: Studi tentang Infiltrasi, Invasi dan Suksesi di Perumnas Simomulyo" (SPP/DPP Unair Surabaya)
20. Tahun 1989/1990: Anggota peneliti tentang "Respons Struktural dan Kultural terhadap Pembangunan Komunitas Nelayan Jawa Timur" (PAU Studi Sosial UGM Yogyakarta)
21. Tahun 1990/1991: Anggota peneliti tentang "Opini Masyarakat Kota terhadap KKBS: Sebuah Studi tentang Idealisme Jumlah dan Nilai Anak dalam Keluarga" (DP3M Depdikbud)
22. Tahun 1990/1991: Anggota peneliti tentang "Respons Struktural dan Kultural terhadap Pembangunan di Sektor Perkebunan Tebu di Jawa Timur" (PAU Studi Sosil UGM Yogyakarta)
23. Tahun 1993/1994: Peneliti mandiri tentang "Dinamika Sosial Ekonomi Rumah Tangga Petani: Studi Kasus di Daerah Sekitar Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER)" (tesis: TMPD Depdikbud)
24. Tahun 2007/2008: Anggota peneliti tentang "Opini Warga Kampus terhadap Implementasi PT BHMN: Studi Kasus di Universitas Airlangggga" (LPPM Unair Surabaya)
25. Tahun 2007/2008: Anggota peneliti tentang "Identifikasi Gerakan Sosial Politik Mahasiswa Pasca Reformasi: Studi Kasus di Universitas Airlangga" (LPPM Unair Surabaya)
26. Tahun 2009 : Peneliti mandiri tentang Otonomi Kampus dan Kapitalisme Pen-didikan: Kajian Dekonstruksi di Universitas Airlangga - Surabaya.

#### • Publikasi Karya Ilmiah

1. Tahun 1996 : Menulis artikel "Pembangunan Kawasan Industri dan Dinamika Sosial Ekonomi Rumah Tangga Petani Kecil" (dalam jurnal ANALISIS, Tahun XXV, No. 4 Juli - Agustus 1996, diterbitkan oleh CSIS, ISSN 0126-222X)
2. Tahun 1997 : Menulis artikel "Pembangunan Kota dan Keseimbangan Ekosistem: Kasus Perkembangan Surabaya" (dalam PRISMA: Majalah Kajian Ekonomi dan Sosial, Tahun XXVI, No. 6, Juni-Juli 1997, diterbitkan oleh LP3ES, ISSN 0301-6269)
3. Tahun 1999 : Menulis artikel "Krisis, Kerusakan Massa dan Keseimbangan Sistem Sosial di Indonesia" (dalam jurnal ANALISIS, Tahun XXVIII, No. 1 1999, diterbitkan oleh CSIS, ISSN 016-222X)
4. Tahun 1999 : Menulis artikel "Metode Analisis Fungsi Lahan dalam Perspektif Sosiologi Pedesaan" (dalam jurnal MASYARAKAT, KEBUDAYAAN DAN POLITIK, Tahun XII, No. 3 Juli 1999, diterbitkan oleh FISIP Unair, ISSN 0216-2407)

5. Tahun 1999 : Menulis artikel "Pemberdayaan Anak: Menggagas Sebuah Model" (dalam jurnal HAKIKI No. 1, September 1999, diterbitkan oleh LPA Jatim dan UNICEF, ISSN 1411-2523)
6. Tahun 2000 : Menulis artikel "Menelusuri Eksploitasi Ekonomi terhadap Anak: dari Ekonomi Agraris ke Ekonomi Industri" (dalam jurnal HAKIKI No. 3, Februari 2000, diterbitkan oleh LPA Jatim dan UNICEF, ISSN 1411-2523)
7. Tahun 2001 : Menulis artikel resensi buku "Mengurai Pertikaian Etnis Migrasi Swakarsa Etnis Madura ke Kalimantan Barat" (dalam jurnal MASYARAKAT, KEBUDAYAAN DAN POLITIK, Tahun XIV, No. 2, April 2001, diterbitkan oleh FISIP Unair, ISSN 0216-2407)
8. Tahun 2001 : Menulis artikel resensi buku "Uang, Rentenir dan Hutang-Piutang di Jawa" (dalam jurnal MASYARAKAT, KEBUDAYAAN DAN POLITIK, Tahun XIV, No. 3, Juli 2001, diterbitkan oleh FISIP Unair, ISSN 0216-2407)
9. Tahun 2001 : Menulis artikel "Pangan, Penduduk dan Teknologi Pertanian: Sebuah Pendekatan Teoritis" (dalam jurnal MASYARAKAT, KEBUDAYAAN DAN POLITIK, Tahun XIV, No. 4 Oktober 2001, diterbitkan oleh FISIP Unair, ISSN 0216-2407)
10. Tahun 2002 : Menulis artikel "Upaya Memasyarakatkan Kembali Anak-anak Pengungsi: Sebuah Gagasan Sosiologis" (dalam jurnal HAKIKI No. 4, Januari 2002, diterbitkan oleh LPA Jatim dan UNICEF, ISSN 1411-2523)
11. Tahun 2002 : Menulis artikel "Anak Jalanan, Ekonomi Kapitalistik dan Kelangsungan Hidup Kaum Lemah" (dalam jurnal HAKIKI No. 5, Maret 2002, diterbitkan oleh LPA Jatim dan UNICEF, ISSN 1411-2523)
12. Tahun 2002 : Menulis artikel "Mata Rantai Pelacuran Anak: Sebuah Tinjauan Sosiologis" (dalam jurnal HAKIKI No. 6, September 2002, diterbitkan oleh LPA Jatim dan UNICEF, ISSN 1411-2523)
13. Tahun 2002 : Menulis artikel "Konflik Tapal Kuda Jawa Timur" (dalam jurnal DINAMIKA MASYARAKAT No. 1, diterbitkan oleh Kantor Menristek RI, ISSN 1421-6192)
14. Tahun 2002 : Menulis artikel "Otonomi Daerah dan Birokrasi Desa" (dalam jurnal DINAMIKA MASYARAKAT, No. 2, Oktober 2002, diterbitkan oleh Kantor Menristek RI, ISSN 1421-6192)
15. Tahun 2002 : Menulis artikel resensi buku "Kapitalisme Birokrasi: Kritik Reinventing Government Osborne - Gaebler" (dalam jurnal MASYARAKAT, KEBUDAYAAN DAN POLITIK, Tahun XV, No. 2, April 2002, diterbitkan oleh FISIP Unair, ISSN 0216-2407)
16. Tahun 2002 : Menulis artikel resensi buku "Mendobrak Sentralisme Ekonomi: Indonesia 1986 - 1992" (dalam jurnal MASYARAKAT, KEBUDAYAAN DAN POLITIK, Tahun XV, No. 4, Oktober 2002, diterbitkan oleh FISIP Unair, ISSN 0216-2407)
17. Tahun 2002 : Menulis artikel "Memahami dan Mengukur Kemiskinan" (dalam KESRA, jurnal Pembangunan Propinsi Jawa Timur, No. 1, Juni 2002, diterbitkan oleh Bappeprop Jatim)
18. Tahun 2002 : Menulis artikel "Dinamika Internal Masyarakat Perkotaan: Tinjauan dari Berbagai Perspektif Ekologis" (dalam JURNAL SUROBOYO: Menuju Metropolitan Madani, No. 1, Mei 2002, diterbitkan oleh Balitbang Pemkot Surabaya, ISSN 1421-7385)

19. Tahun 2002 : Menulis artikel "Tipologi Komunitas Surabaya" (dalam JURNAL SUROBOYO: Menuju Metropolitan Madani, No. 2, Nopember 2002, diterbitkan oleh Balitbang Pemkot Surabaya, ISSN 1421-7385)
20. Tahun 2002 : Menulis artikel "Revolusi Paradigmatik: Otokritik dan Catatan Kritis Untuk Masa Depan FISIP" (dalam buku kenangan Peringatan 25 Tahun Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga - MENGENANG MASA LALU, MENATAP MASA DEPAN)
21. Tahun 2003 : Menulis artikel "Perspektif Ekologi Manusia dalam Manajemen Lingkungan Kota" (dalam JURNAL SUROBOYO: Menuju Metropolitan Madani, No. 3, Mei 2003, diterbitkan oleh Balitbang Pemkot Surabaya, ISSN 1421-7385)
22. Tahun 2003 : Menulis artikel resensi buku "Sex'n the City: Jakarta Undercover" (dalam jurnal MASYARAKAT, KEBUDAYAAN DAN POLITIK, Tahun XVI, No. 2, April 2003, diterbitkan oleh FISIP Unair, ISSN 0216-2407)
23. Tahun 2003 : Menulis artikel "Sistem Kekerabatan dan Pembangunan Ekosistem Pertanian pada Komunitas Indonesia: Analisis Kasus Keluarga Jawa" (dalam jurnal MASYARAKAT, KEBUDAYAAN DAN POLITIK, Tahun XVI, No. 4, Oktober 2003, diterbitkan oleh FISIP Unair, ISSN 0216-2407)
24. Tahun 2003 : Menulis artikel "Mengukuhkan Kembali Paradigma Keilmuan" (dalam buku kenangan Refleksi 20 Tahun Pendidikan Psikologi Universitas Airlangga)
25. Tahun 2004 : Menulis artikel "Memperdebatkan Wacana Otonomi dalam Birokrasi Pemerintah Desa" (dalam jurnal MASYARAKAT, KEBUDAYAAN DAN POLITIK, Tahun XVI, No. 2, April 2004, diterbitkan oleh FISIP Unair, ISSN 0216-2407)
26. Tahun 2005 : Menulis artikel resensi buku "Penghakiman Massa: Kajian atas Kasus dan Pelaku" (dalam jurnal MASYARAKAT, KEBUDAYAAN DAN POLITIK, Tahun XVIII, No. 4 Oktober 2005, diterbitkan oleh FISIP Unair, ISSN 0216-2407)
27. Tahun 2006 : Menulis artikel "Masalah-masalah Sosial di Indonesia: Pemahaman Konsep, Fokus Analisis, Skema Hubungan antar-variabel dan Metode Analisis" (dalam jurnal MASYARAKAT, KEBUDAYAN DAN POLITIK, Tahun XIX, No. 1, Januari 2006, diterbitkan oleh FISIP Unair, ISSN 0216-2407)
28. Tahun 2006 : Menulis artikel resensi buku "Formasi dan Struktur Gerakan Sosial Petani: Studi Kasus Reklaiming/Penjarahan atas Tanah PTPN XII (Persero) Kalibakar Malang Selatan" (dalam jurnal MASYARAKAT, KEBUDAYAAN DAN POLITIK, Tahun XIX, No. 3, Juli 2006, diterbitkan oleh FISIP Unair, ISSN 0216-2407)
29. Tahun 2007 : Menulis artikel "Prosedur Analisis Stratifikasi Sosial dalam Perspektif Sosiologi" (dalam jurnal MASYARAKAT, KEBUDAYAAN DAN POLITIK, Tahun XX, No. 1, Januari 2007, diterbitkan oleh FISIP Unair, ISSN 0216-2407)

#### ▪ Pengalaman Berorganisasi

- Tahun 1983 - sekarang: Menjadi anggota HIPIIS
- Tahun 1990 - sekarang: Menjadi anggota ISI
- Tahun 1983 - sekarang: Menjadi anggota KAGAMA

- Tahun 1994 - sekarang: Menjadi anggota Ikatan Alumni Institut Pertanian Bogor
- Tahun 2003 - sekarang: Menjadi anggota IKA-LANGGA
- Tahun 2003 - sekarang: Menjadi penasehat IKA FISIP Unair

Surabaya, April 2009  
Hormat Saya,

**Drs. Doddy Sumbodo Singgih, M.Si**  
**NIP 131406096**